

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

## DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN





---

**LAPORAN KINERJA**  
**[ LKj ]**

**DIREKTORAT**  
***PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM***  
**DITJEN KSDAE**  
**TAHUN 2018**



**Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019**  
**Januari, 2019**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2018 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem Nomor : P.2/Ksdae/Set/Ren.2/4/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Reviu Atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2018 memuat pertanggungjawaban/akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja Direktorat PIKA dengan menyajikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran, Indikator Kinerja Kegiatan ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan (pencapaian kinerja kegiatan) sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja (Lkj) Direktorat PIKA Tahun 2018 ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas waktu, tenaga dan pemikirannya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian.

Jakarta, Januari 2019

Direktur,



Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc  
NIP.195905201985012001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem, khususnya peningkatan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian Alam, melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam. Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan di lingkungan Direktorat PIKA dalam menyusun perencanaan jangka menengah.

Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia. Tugas Direktorat PIKA merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai dua sasaran konservasi, yaitu:

- Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; serta
- Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 2018, Direktorat PIKA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Renstra Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktur PIKA dengan Direktur Jenderal KSDAE. Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat PIKA Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata capaian IKK tahun 2018 adalah sebesar 199,37%. Realisasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2018 sebesar Rp.19.384.883.962 atau 98,54% dari total anggaran sebesar Rp19.671.700.000.
2. Capaian Kinerja IKK 1 (Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Konservasi yang Tersusun dan Mendapat Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok) tahun 2018 adalah 121 dokumen dari target 30 dokumen (403,33%), Capaian Kinerja s.d tahun 2018 Renstra 2015-2019 adalah 284 dokumen dari target 150 dokumen (189,33%), dan realisasi anggaran pada IKK 1 sebesar 98,96%. Secara teknis dalam pencapaian Kinerja s.d tahun 2018 sudah baik karena sudah melebihi target, namun untuk mendukung pencapaian target Kebijakan Satu Peta (KSP) Dirjen KSDAE maka keseluruhan total kawasan konservasi harus sudah tertata kawasannya sehingga masih banyak tersisa kawasan konservasi yang harus di tata kawasannya. Kendala yang dihadapi dalam



mendukung pencapaian penataan zona blok seluruh Indonesia antara lain beberapa kawasan memiliki permasalahan tenurial, batas dan pengukuhan kawasan, serta rancangan Zona atau Blok Pengelolaan tidak segera disampaikan untuk pengesahan oleh Direktur Jenderal KSDAE. Untuk peningkatan efektifitas pelaksanaan penataan zona/blok pengelolaan KSA/KPA dan implementasi KSP dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis, optimalisasi penyusunan penataan zona/blok, penilaian dan pengesahan dokumen zona/blok pengelolaan, dukungan anggaran dari kemitraan, serta peningkatan koordinasi Ditjen KSDAE dan Ditjen PKTL.

3. Capaian Kinerja IKK 2 (Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi untuk 521 Unit KSA, KPA, dan TB di Seluruh Indonesia) tahun 2018 adalah 111 unit dari target 110 unit rekomendasi (100,91%), Capaian Kinerja s.d tahun 2018 Renstra 2015-2019 adalah 469 unit dari target 521 unit rekomendasi (90,02%), dan realisasi anggaran pada IKK 2 sebesar 99,38%. Kendala dalam IKK ini antara lain lamanya kegiatan dan panjangnya proses pengadaan, dan membuat kegiatan pengkajian dilaksanakan pada periode terakhir anggaran, menjadikan kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi tidak dapat dilakukan secara optimal. Tindak lanjut dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi adalah bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE, dan alokasi yang cukup untuk kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi kepada UPT-UPT.
4. Capaian Kinerja IKK 3 (Jumlah Paket Data dan Informasi Kawasan Konservasi yang *Valid* dan *Reliable* pada 521 KSA, KPA dan TB di Seluruh Indonesia) tahun 2018 adalah 521 dari target 521 paket data (100%), Capaian Kinerja s.d tahun 2018 Renstra 2015-2019 adalah 521 dari target 521 paket data (100%), dan realisasi anggaran pada IKK 3 sebesar 97,75%. Kendala dalam pencapaian IKK ini antara lain UPT belum memiliki data yang lengkap pada KK yang dikelola dan membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan inventarisasi sesuai amanat Permenhut No.P.81/2014. Strategi dalam rangka penyempurnaan jumlah paket data adalah sosialisasi Permenhut No. P.81/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Potensi pada KSA dan KPA, diperlukan anggaran yang lebih besar untuk UPT dalam melakukan inventarisasi data, percepatan hasil, sosialisasi dan bimbingan teknis tentang IPK pada UPT.
5. Capaian Kinerja IKK 4 (Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional yang Terbentuk Sebanyak 100 Unit KPHK) tahun 2018 adalah 101 dari target 100 unit usulan KPHK (101.00%), Capaian Kinerja s.d tahun 2018 Renstra 2015-2019 adalah 101 dari target 100 unit usulan KPHK (101%), dan realisasi anggaran pada IKK 4 sebesar 97,76%. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian IKK ini antara lain belum dipahaminya materi



penyusunan rancang bangun KPHK oleh UPT lingkup KSDAE. Selain itu, KPHK juga belum dianggap sebagai sesuatu yang perlu segera dilakukan oleh UPT.

6. Capaian Kinerja IKK 5 (Jumlah Kerja Sama Pembangunan Strategis dan Kerja Sama Penguatan Fungsi pada Kawasan Konservasi Sebanyak 100 PKS) tahun 2018 adalah 76 PKS dari target 20 PKS (380%), Capaian Kinerja s.d tahun 2018 Renstra 2015-2019 adalah 210 PKS dari target 100 PKS (210%), dan realisasi anggaran pada IKK 5 sebesar 98,39%. Secara umum tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam rangka pencapaian IKK ini mengingat Perjanjian Kerja Sama (PKS) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengisi celah kekurangan (*filling the gap*) antara perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Kerja sama juga banyak diminati oleh berbagai pihak yang ingin turut langsung berkontribusi dalam upaya konservasi baik melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun yang memang karena kepentingan usahanya perlu dinaungi dengan skema kerja sama. Permasalahan yang ada dalam pencapaian IKK ini lebih banyak bersifat teknis yaitu masih belum sinkronnya peraturan terkait kerja sama, masih belum dipatuhinya prosedur kerja sama serta monitoring dan pelaporan hasil kegiatan kerja sama yang belum optimal dilakukan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan dan sebagai strategi dalam peningkatan IKK ini adalah dengan melakukan sosialisasi teknis prosedur yang ada dalam peraturan terkait kerja sama kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) khususnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/MENHUT-II/2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan P.85 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Peraturan lain yang erat kaitannya dengan substansi kerja sama juga terus menerus disosialisasikan guna memperkuat pemahaman dalam pelaksanaan kerja sama.

Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Menteri LHK No. P.48/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam dan Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam merupakan salah satu cara yang cukup efektif dalam rangka meningkatkan kualitas keberhasilan pencapaian IKK.



Selain beberapa hal tersebut, dalam rangka meningkatkan tertib administrasi kerja sama, sosialisasi beberapa surat edaran Dirjen KSDAE yang sebelumnya telah ada juga tetap disosialisasikan, antara lain adalah Surat Edaran Dirjen KSDAE Nomor: SE.9/VII-PIKA/2015 Tanggal 15 Juli 2015 tentang adendum perjanjian kerja sama, Surat Edaran Dirjen KSDAE Nomor: SE.3/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Kegiatan Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat dilakukan di kawasan konservasi yang sebelumnya melalui IPPKH Arahan terkait Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan di Kawasan Hutan Konservasi yang telah Berakhir Masa Berlakunya.

Berkaitan dengan beberapa permasalahan yang selama ini secara terus menerus muncul dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama di UPT seperti konflik kewenangan dan tidak tersusunnya Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RKT), Dirjen KSDAE telah memerintahkan penyelesaian secara komprehensif melalui Surat Edaran Dirjen KSDAE No. SE.12/KSDAE/Set/Kum.3/10/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Tertib Administrasi dan Tertib Aturan Perjanjian Kerja Sama Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

7. Capaian Kinerja IKK 6 (Jumlah integrasi peta zonasi/blok/arahan pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa) tahun 2018 adalah 551 KK dari target 551 KK (100%), Capaian Kinerja s.d tahun 2018 Renstra 2015-2019 adalah 551 KK dari target 551 KK (100%), dan realisasi anggaran pada IKK 6 sebesar 99,66%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada tahun 2018 diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan pada masing-masing kegiatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing unit kerja.

Jakarta, Januari 2019  
Direktur,

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc  
NIP. 195905201985012001



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Penataan Kawasan.....	5
B. Pemolaan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan .....	6
C. Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan.....	7
D. Kebijakan Satu Peta.....	8
E. Kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA.....	10
BAB II .....	13
PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis (Renstra) .....	13
B. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III .....	18
AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	18
A.1 IKK 1 : Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok.    19	
A.2 IKK 2 : Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi Untuk 521 Unit KSA, KPA, dan TB di Seluruh Indonesia.....	26
A.3 IKK 3 : Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia. ....	30
A.4 IKK 4 : Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK. ....	33
A.5 IKK 5: Jumlah Kerja sama Pembangunan Strategis dan Kerja sama Penguatan Fungsi pada Kawasan Konservasi Sebanyak 100 PKS. ....	40
A.6 IKK 6 : Jumlah integrasi peta zonasi/blok/arahan pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa.....	44
B. Realisasi Anggaran.....	45
BAB IV.....	47
PENUTUP .....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	49



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pegawai PNS Direktorat PIKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	3
Tabel 2. Target output KSP Per bulan pada tahun 2018.....	8
Tabel 3. Target Jangka Menengah Direktorat PIKA Tahun 2015-2019.....	15
Tabel 4. Perjanjian Kinerja 2018 .....	16
Tabel 5. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2018.....	18
Tabel 6. Pencapaian IKK 1 Direktorat PIKA Tahun 2018.....	19
Tabel 7. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1 .....	20
Tabel 8. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan .....	21
Tabel 9. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1 .....	22
Tabel 10. Pencapaian IKK 2 Direktorat PIKA Tahun 2018 .....	26
Tabel 11. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2.....	26
Tabel 12. Rekapitulasi status kesesuaian fungsi hasil kajian evaluasi kesesuaian fungsi.....	27
Tabel 13. Persentase Capaian Kinerja IKK 2 Tahunan dan Renstra .....	28
Tabel 14. Pencapaian IKK 3 Direktorat PIKA Tahun 2018 .....	30
Tabel 15. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 3.....	30
Tabel 16. Jumlah Paket Data dan Informasi KK Tahun 2015 – 2018.....	32
Tabel 17. Persentase Capaian Kinerja IKK 3 Tahunan dan Renstra .....	32
Tabel 18. Target dan Data KPHK s/d Tahun 2018.....	34
Tabel 19. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 4.....	34
Tabel 20. Pencapaian IKK 4 Direktorat PIKA Tahun 2018 .....	35
Tabel 21. Persentase Capaian Kinerja IKK 4 Tahunan dan Renstra .....	35
Tabel 22. Pencapaian IKK 5 Direktorat PIKA Tahun 2018 .....	41
Tabel 23. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 5.....	41
Tabel 24. Rekapitulasi Perkembangan Proses Permohonan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2018 .....	42
Tabel 25. Kategori Permohonan Kerja sama Pembangunan Strategis Tahun 2018.....	42
Tabel 26. Persentase Capaian Kinerja IKK 5 Tahunan dan Renstra .....	42
Tabel 27. Target dan Realisasi IKK Kebijakan Satu Peta (KSP) Direktorat PIKA.....	44
Tabel 28. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat PIKA Tahun 2018.....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PIKA.....	2
Gambar 2. Komposisi PNS Direktorat PIKA Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	3
Gambar 3. Penyusunan Penataan Kawasan Konservasi di Taman Hutan Raya Gunung Menumbing di Bangka Barat.....	6
Gambar 4. Kegiatan Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi Kawasan.....	7
Gambar 5. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan dan Supervisi Pemetaan.....	9
Gambar 6. Foto bersama Sekditjen KSDAE, Direktur PIKA, Kepala Pusat Keteknikan LHK, Kepala Balai TN Tesso Nilo, Kepala Sub dari Direktorat KK dan Mitra.....	11
Gambar 7. Diagram Persentase Penganggaran Setiap IKK pada Direktorat PIKA.....	17
Gambar 8. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1.....	20
Gambar 9. Diagram Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Berdasarkan Fungsi Kawasan.....	21
Gambar 10. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1.....	23
Gambar 11. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2.....	27
Gambar 12. Diagram Status Kesesuaian Fungsi Hasil EKF Desk Study Tahun 2018.....	28
Gambar 13. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2.....	29
Gambar 14. Diagram Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 3.....	31
Gambar 15. Halaman login website SIPIKA.....	31
Gambar 16. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 3.....	33
Gambar 17. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian IKK 4.....	35
Gambar 18. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 4.....	36
Gambar 19. Sosialisasi Kerja sama Permenhut P.85/Menhut-II/2014 Jo P.44/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tanggal 26 – 27 September 2018 di Semarang.....	40
Gambar 20. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 5.....	41
Gambar 21. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 5.....	43
Gambar 22. Berita Acara Kegiatan Integrasi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu.....	44



---

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 .....	50
Lampiran 2 .....	52
Lampiran 3 .....	54
Lampiran 4 .....	60
Lampiran 5 .....	73
Lampiran 6 .....	74
Lampiran 7 .....	76
Lampiran 8 .....	85



---

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) bertujuan untuk mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari. Untuk meningkatkan pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah selaku pengelola negara yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), telah membentuk satuan kerja setingkat Eselon II salah satunya adalah Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA) yang melaksanakan tugas di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam untuk mendukung penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem pada kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan di Indonesia.

Sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Direktorat PIKA mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pemolaan dan informasi konservasi alam.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat PIKA menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerja sama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan cagar alam (CA), suaka margasatwa (SM), taman nasional (TN), taman wisata alam (TWA), taman hutan raya (Tahura), dan taman buru (TB);
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerja sama pengelolaan, serta pengelolaan data sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerja sama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB;

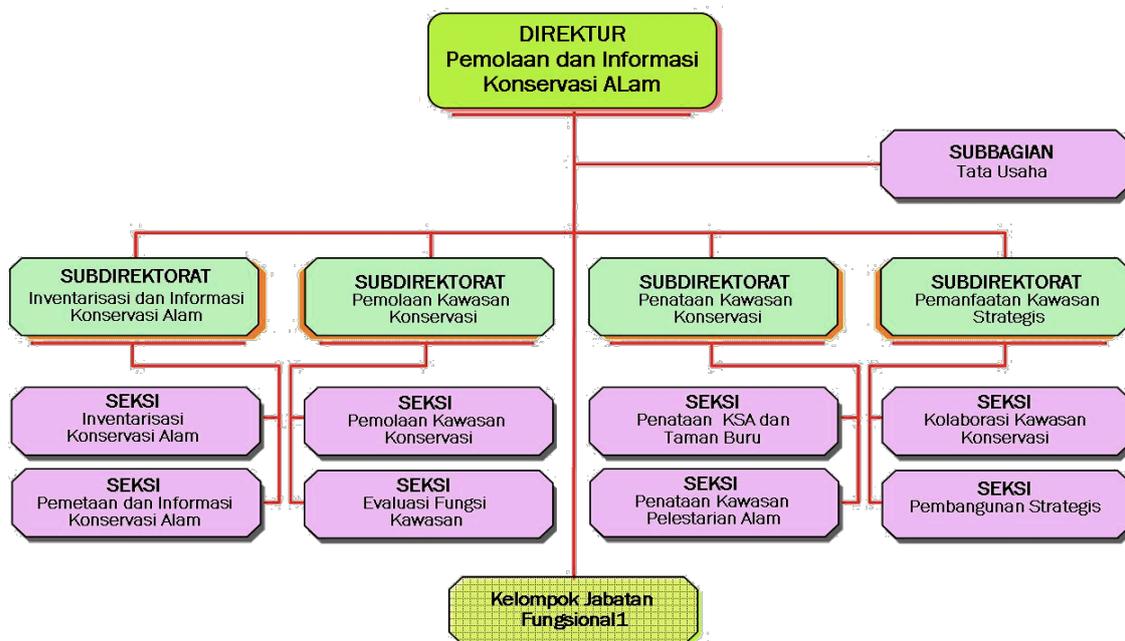


- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi potensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerja sama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan CA, SM, TN, TWA, Tahura, dan TB;
- e. Pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi petensi, penataan, pemolaan, evaluasi kesesuaian fungsi, kerja sama pengelolaan, serta pengelolaan data dan sistem informasi manajemen kawasan Tahura; dan
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat PIKA didukung oleh perangkat organisasi yang terdiri dari:

- a. Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam;
- b. Subdirektorat Pemolaan Kawasan Konservasi;
- c. Subdirektorat Penataan Kawasan Konservasi;
- d. Subdirektorat Pemanfaatan Kawasan Strategis;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Struktur Organisasi Direktorat PIKA adalah sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1 dibawah ini.



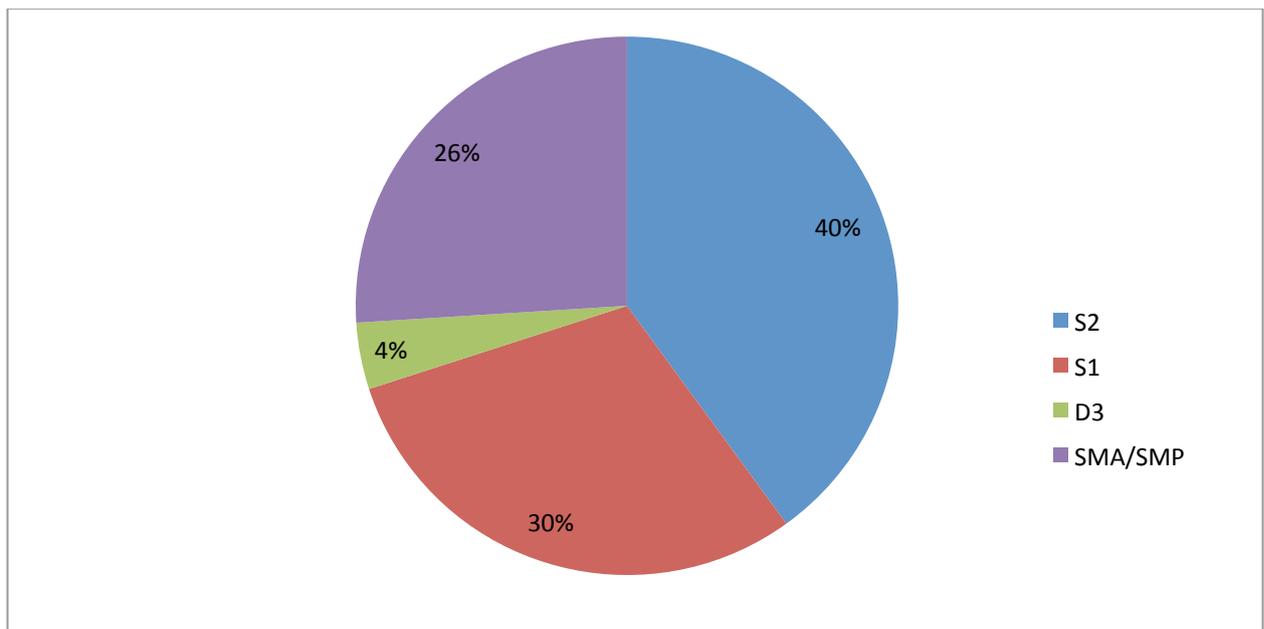
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat PIKA



Direktorat PIKA sampai saat ini memiliki jumlah pegawai sebanyak 51 orang (PNS) dan 20 orang (Non PNS) yang tersebar dimasing-masing Subdirektorat dan Subbagian Tata Usaha. Dari jumlah pegawai (PNS), apabila dilihat dari tingkat/jenis pendidikannya, maka pegawai Direktorat PIKA didominasi lulusan S2 sebanyak 20 orang (38%), lulusan S1 sebanyak 15 orang (30%), SMA/SMP sebanyak 14 orang (28%), dan D3 sebanyak 2 orang (3,9%) dari seluruh pegawai yang ada. Gambaran lengkap terkait jumlah kepegawaian dan tingkat pendidikan pegawai sebagaimana disajikan dalam tabel 1 dan gambar 2.

Tabel 1. Jumlah Pegawai PNS Direktorat PIKA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Jabatan/Subdit/Subbag	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		S2	S1	D3	SMA/SMP	
1	Direktur	1	-	-	-	1
2	Subdit Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam	5	3	-	2	10
3	Subdit Pemolaan Kawasan Konservasi	2	3	-	2	7
4	Subdit Penataan Kawasan Konservasi	4	3	-	3	10
5	Subdit Pemanfaatan kawasan Strategis	5	3	1	2	11
6	Sub Bagian Tata Usaha	3	3	1	5	12
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>51</b>



Gambar 2. Komposisi PNS Direktorat PIKA Tahun 2018 Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sesuai aspek strategis organisasi, Direktorat PIKA mengemban sasaran kegiatan untuk menjamin efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam. Untuk mencapai sasaran kegiatan tersebut, Direktorat PIKA selaku penanggungjawab kegiatan pemolaan dan informasi konservasi alam mempunyai ruang lingkup tugas, yang meliputi:

- a. Perencanaan pengelolaan kawasan konservasi di tingkat tapak melalui penataan kawasan konservasi yang meliputi penyusunan zonasi/blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja.
- b. Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) kawasan konservasi yang terindikasi mengalami degradasi berat, yang tidak sesuai dengan model/fungsi, yang masih berstatus HSA/KSA/KPA/HK, dan kawasan konservasi baru hasil proses revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk ditindak lanjut baik dalam bentuk pemulihan bagi kawasan yang terdegradasi, maupun melalui perubahan fungsi.
- c. Inventarisasi petensi melalui analisis data kondisi kawasan konservasi sampai tingkat resort sehingga dapat menyediakan kebutuhan data dan informasi yang *reliable* dan *upto date*, baik hayati maupun non hayati pada kawasan konservasi yang masih banyak belum ditemukenali dan terdokumentasikan dengan baik.
- d. Pembangunan KPHK dalam bentuk wadah penyelenggara kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari ditingkat tapak.
- e. Kerja sama penyelenggara KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, tidak terlepas dari timbulnya permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan utama (*strategicissued*) dalam rangka mendukung pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:



---

## **A. Penataan Kawasan**

Berdasarkan data Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, sampai dengan tahun 2018, dari 552 unit kawasan konservasi yang dikelola, telah dilakukan penataan kawasan (zonasi/blok) sebanyak 317 unit kawasan dengan rincian : 52 Zonasi Taman Nasional; 95 Blok Pengelolaan Taman Wisata Alam; 14 Blok Pengelolaan Taman Hutan Raya; 102 Blok Cagar Alam; 46 Blok Suaka Margasatwa, dan 8 Blok Taman Buru.

Dengan demikian masih ±235 KK yang belum memiliki rencana penataan zona atau blok. Berdasarkan data dan informasi ini masih banyak unit kawasan konservasi, khususnya pada kawasan Non Taman Nasional yang belum dikelola berdasarkan rencana penataan kawasan.

Rendahnya tingkat penyelesaian penataan kawasan disebabkan antara lain masih banyak status pengukuhan kawasan konservasi yang belum selesai sehingga menimbulkan keraguan dalam melakukan penataan kawasan, masih terdapat kawasan konservasi yang belum ditetapkan fungsinya (KSA, KPA, HSA) sehingga belum dapat dilakukan penataan, kurangnya data dan informasi potensi kawasan konservasi hasil inventarisasi potensi.

Mengingat pentingnya penataan zona dan blok sebagai dasar perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi, maka dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015 – 2019 telah ditetapkan salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya yaitu tersusunnya 150 Dokumen Penataan Zonasi Taman Nasional maupun Penataan Blok Non Taman Nasional.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000 Direktorat Jenderal KSDAE juga diamanatkan untuk menyelesaikan penataan zona /blok seluruh Kawasan Konservasi skala 1:50.000 yang harus diselesaikan sampai akhir tahun 2018 pada semua Provinsi di Indonesia.



Gambar 3. Penyusunan Penataan Kawasan Konservasi di Taman Hutan Raya Gunung Menumbing di Bangka Barat

## **B. Pemolaan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan**

Kegiatan Evaluasi Kesesuaian Fungsi merupakan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimana pada Pasal 41 ayat (1) dijelaskan bahwa Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dievaluasi secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Selain merupakan amanah undang-undang, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kawasan konservasi. Evaluasi Kesesuaian Fungsi (EKF) KSA dan KPA adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi kawasan untuk diketahui kesesuaiannya dengan kriteria kawasan dan tujuan pengelolaannya.



Dalam periode RENSTRA sebelumnya (2009-2015), kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi baru dilakukan di beberapa kawasan konservasi saja dengan rincian sebagai berikut: CA Guci (2011), Tahura Ngurah Rai (2012), CA Kawah Kamojang (2012), CA Watu Ata (2013), CA Gunung Ambang (2013), hal itu menunjukkan bahwa evaluasi kesesuaian fungsi tidak menjadi *tools* dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, dalam periode RENSTRA 2015-2019 rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi Kawasan konservasi diharapkan dapat dihasilkan untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.

### **C. Inventarisasi Potensi, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Kawasan**

Kegiatan inventarisasi potensi di kawasan konservasi yang telah dilaksanakan relatif belum cukup komprehensif untuk melengkapi data dan informasi yang dikumpulkan dan dikelola di Dit. PIKA. Data dan informasi potensi kawasan konservasi perlu terus diupayakan untuk dilengkapi, baik keanekaragaman jenis, habitat/ekosistem, populasi, dan distribusinya dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi. Oleh karena itu diperlukan peningkatan intensitas pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi di lapangan, dan di sisi lain diperlukan sebuah sistem basis data yang mampu menghimpun dan menyajikan data dan informasi yang tersebar di berbagai kalangan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan konservasi.



Gambar 4. Kegiatan Bimbingan Teknis Inventarisasi Potensi Kawasan



#### **D. Kebijakan Satu Peta**

Berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Direktorat Jenderal KSDAE mendapat tugas untuk membuat Peta Zonasi/Blok Kawasan Konservasi (KK) skala 1:50.000. Tugas tersebut diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2016-2018)

UPT berkewajiban membuat Peta Integrasi Zona/Blok Pengelolaan Kawasan Konservasi ke dalam Peta RBI skala 1:50.000 untuk KK yang sudah memiliki Penataan zona/blok KK. Bagi KK yang belum memiliki Penataan zona/blok, UPT berkewajiban membuat Peta Arahan Penataan zona/blok KK.

Tugas dari SubDit Inventarisasi dan Informasi dalam Kebijakan Satu Peta yang didanai DIPA tahun 2018 adalah :

1. Membimbing UPT untuk membuat Peta Arahan Blok KK dan mengintegrasikan Peta Zona/Blok/arahan KK ke skala 1:50.000 melalui kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan dan supervisi yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan mengundang perwakilan tenaga teknis perpetaan dari UPT/UPTD
2. Finalisasi integrasi peta Peta Zona/Blok/arahan pengelolaan KK ke dalam peta RBI skala 1:50.000 sesuai Kriteria Penilaian Tim KSP sebelum hasilnya diserahkan kepada Ditjen PKTL selaku walidata untuk diverifikasi oleh BIG selanjutnya dinilai oleh Tim Kesekretariatan KSP. Adapun kriteria verifikasi data geospasial Kegiatan Percepatan Pelaksanaan KSP antara lain:
  - kondisi data meliputi: format data, datum, sistem proyeksi dan skala
  - Kualitas data meliputi: kelengkapan data, konsistensi logis, akurasi posisi, akurasi tematik dan akurasi temporal.
3. Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholders terkait, antara lain dengan Direktorat Kawasan Konservasi, dan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk sinkronisasi integrasi peta Zona/Blok/arahan pengelolaan KK

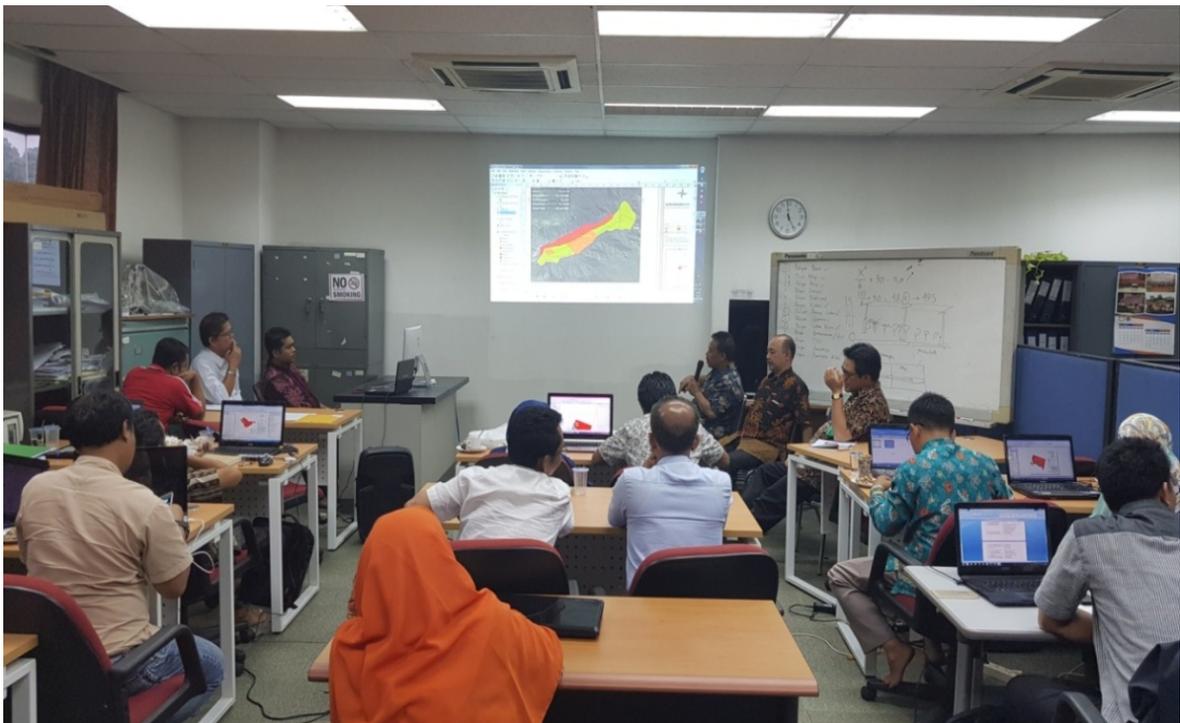
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya peta zonasi/blok/arahan pengelolaan yang terintegrasi pada peta RBI skala 1:50.000 pada 551 Kawasan Konservasi. Target output KSP Per bulan pada tahun 2018 seperti pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Target output KSP Per bulan pada tahun 2018



NO	BULAN	JUMLAH
1	Januari	50 KK
2	Februari	50 KK
3	Maret	50 KK
4	April	50 KK
5	Mei	50 KK
6	Juni	50 KK
7	Juli	50 KK
8	Agustus	50 KK
9	September	50 KK
10	Oktober	25 KK
11	Nopember	25 KK
12	Desember	51 KK

Untuk Kegiatan Kebijakan Satu Peta, proses integrasi telah selesai di tahun 2018. Pada tahun 2019 akan dilakukan sinkronisasi peta zonasi/blok Kawasan Konservasi dengan peta tematik dari Kementerian/Lembaga lain dan proses update integrasi peta zonasi/blok Kawasan Konservasi.



Gambar 5. Kegiatan Bimbingan Teknis Pemetaan dan Supervisi Pemetaan



---

## **E. Kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA**

Kerja sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) merupakan kegiatan kerja bersama dengan mitra dengan menggunakan naungan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Skema kerja sama memberikan peluang yang besar bagi Ditjen KSDAE dalam upaya melaksanakan kegiatan konservasi serta memberikan manfaat positif kepada UPT dan kawasan konservasi. Selain hal tersebut, pelaksanaan kegiatan kerja sama dan hasil-hasilnya juga bermanfaat untuk mitra kerja, masyarakat sekitar serta pihak-pihak lain yang terkait.

Titik berat kerja sama yang dilakukan pada dasarnya adalah bertujuan untuk mengisi kesenjangan input dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal KSDAE, khususnya dalam hal pendanaan, keahlian serta peningkatan kapasitas kelembagaan yang keseluruhan pelaksanaannya dimaksudkan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati. Namun demikian, masih terdapat kendala dan tantangan dalam pelaksanaannya baik yang bersifat regulatif maupun teknis, antara lain:

- a. Masih terdapat ketidaksinkronan antar peraturan yang terkait kerja sama sehingga seringkali membuat bias dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja sama;
- b. Belum adanya pedoman teknis Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA;
- c. Belum ada pedoman baku yang mengatur besaran kontribusi kerja sama sehingga belum dapat ditentukan standar yang wajar dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Penganggaran Program Kegiatan Kerja Sama yang lebih banyak di sektor lingkungan hidup dan kehutanan seringkali tidak sesuai tupoksi Pihak Kedua;
- e. Permohonan Kerja Sama Pembangunan Strategis belum seluruhnya termasuk dalam Perpres Proyek Strategis Nasional;
- f. Penggunaan Kawasan Konservasi khususnya bekas Pinjam Pakai Kawasan belum sepenuhnya ditransformasi ke mekanisme kerja sama;
- g. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kerja sama masih lemah;



- h. Tidak terdapat sanksi Pihak Kedua yang wanprestasi khususnya bagi mitra yang memiliki kerja sama terkait dengan penggunaan kawasan;
- i. UPT Ditjen KSDAE bersama mitra belum sepenuhnya memenuhi kewajiban menyusun Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT0 dan melakukan Addendum kerja sama.



Gambar 6. Foto bersama Sekditjen KSDAE, Direktur PIKA, Kepala Pusat Keteknikan LHK, Kepala Balai TN Tesso Nilo, Kepala Sub dari Direktorat KK dan Mitra

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, maka Direktorat PIKA berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kerjanya atau Laporan Kinerja (LKj), sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.



---

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA Tahun 2018 ini disusun dengan maksud sebagai wujud pertanggungjawaban/akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kinerja Direktorat PIKA Tahun Anggaran 2018. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.



---

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis (Renstra)**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 telah ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 merupakan periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019, yang sekaligus berfungsi sebagai acuan dilingkungan Direktorat PIKA dalam menyusun perencanaan jangka menengah. Karena lingkupnya sebagai penanggung jawab kegiatan dari program yang ditetapkan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Rencana Strategis Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 hanya menjabarkan strategi pencapaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

**Visi** : Berdasarkan RPJMN tahun 2015-2019, visi pembangunan adalah **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”** .

**Misi** : Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, pembangunan nasional dilaksanakan dengan misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;



6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

**Tujuan** : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan pembangunan tahun 2015-2019, yaitu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan dan mutu kehidupan manusia.

**Sasaran** : Tugas Direktorat PIKA merupakan bagian dari embanan Direktorat Jenderal KSDAE untuk mencapai dua sasaran konservasi, yaitu:

1. Memanfaatkan potensi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan; dan
2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumber Daya Alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

**Program** : Direktorat PIKA termasuk dalam Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

**Kegiatan** : Sebagai salah satu penanggungjawab kegiatan dilingkungan Direktorat Jenderal KSDAE, maka Direktorat PIKA melaksanakan kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam tahun 2015-2019, antara lain :

1. Penyusunan dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi untuk mendapatkan pengesahan dokumen zonasi dan/atau blok.
2. Pemantapan rekomendasi hasil EKF kawasan konservasi untuk KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.
3. Pengelolaan data dan informasi kawasan konservasi yang *valid* dan *reliable* pada KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.
4. Pembentukan KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional.
5. Pemantapan kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi.
6. Pemantapan peta zonasi/blok/arahan penataan KK yang terintegrasi ke dalam peta RBI Skala 1:50.000 sesuai kriteria tim penilai KSP di seluruh Indonesia.



Target Jangka Menengah yang harus dicapai Direktorat PIKA dalam kegiatan Program KSDAE adalah rencana jangka menengah yang telah disusun dan ditetapkan dalam dokumen Renstra Direktorat PIKA Tahun 2015-2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Target Jangka Menengah Direktorat PIKA Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja (Volume dan Satuan) Per Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Doku- men	60 Doku- men	90 Doku- men	120 Doku- men	150 Doku- men
2.	Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	100 Unit	200 Unit	310 Unit	420 Unit	521 Unit
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data	521 Paket Data
4.	Terbentuk dan ditetapkannya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	40 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit
5.	Terwujudnya kerja sama pembangunan dan kerja sama penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	40 PKS	60 PKS	80 PKS	100 PKS
6.	Terintegrasinya zonasi/blok pengelolaan KK ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa	Jumlah integrasi peta zonasi/blok/arahan pengelolaan KK kedalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa	-	-	551 KK	551 KK	-



Target-target sebagaimana pada tabel di atas harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, sedangkan target setiap tahun akan dijabarkan di dalam dokumen Rencana Kerja setiap tahunnya.

## B. Perjanjian Kinerja

Direktorat PIKA telah menetapkan target tahunan yang dituangkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PIKA. Dalam tahun 2018 terjadi dinamika penganggaran yang mengakibatkan perubahan anggaran, namun jumlah target kinerja kegiatan tidak berubah. Perjanjian Kinerja tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

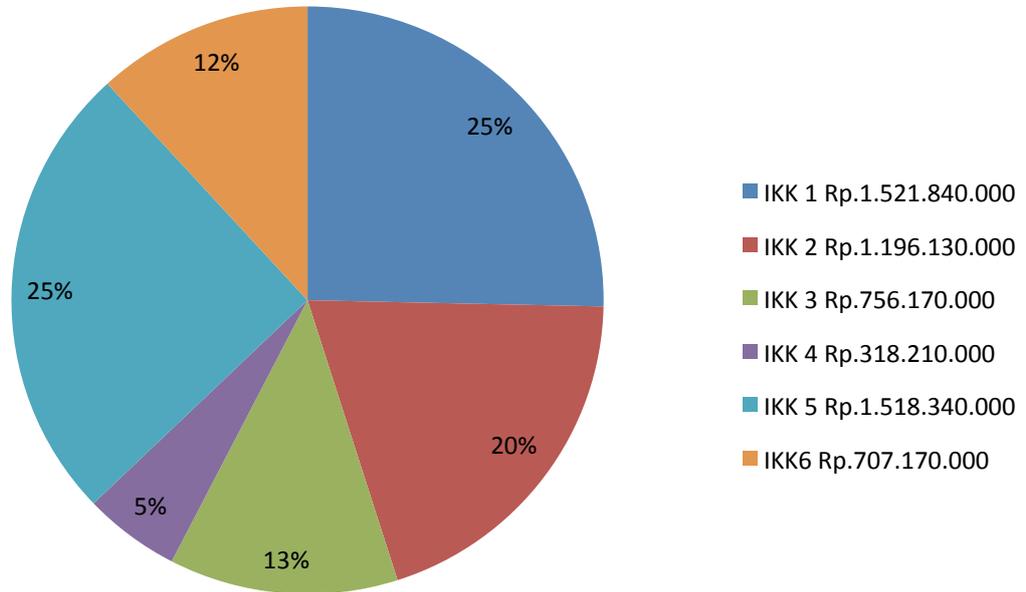
Tabel 4. Perjanjian Kinerja 2018

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			Perjanjian Kinerja Awal	Perjanjian Kinerja Revisi
1.	Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	30 Dokumen
2.	Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	110 Unit	110 Unit
3.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data
4.	Terbentuk dan ditetapkannya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	100 Unit	100 Unit
5.	Terwujudnya kerja sama pembangunan dan kerja sama penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	20 PKS
6.	Terintegrasinya zonasi/blok pengelolaankawasan konservasi ke dalam PetaRBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa	Jumlah Integrasi zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat	551 KK	551 KK

Untuk mewujudkan pencapaian IKK tersebut, Direktorat PIKA mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp19.671.700.000,-. Rincian penganggaran setiap IKK dapat dilihat pada gambar berikut.



## Persentase Penganggaran Setiap IKK pada Direktorat PIKA Tahun 2018



Gambar 7. Diagram Persentase Penganggaran Setiap IKK pada Direktorat PIKA



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dapat membantu suatu organisasi dalam mendeteksi kelebihan/kekurangan dari target yang telah ditentukan, sehingga kelebihan/kekurangan tersebut dapat dianalisa untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan setiap tahun untuk mengetahui capaian kinerja yang dihasilkan dalam rangka mendukung program yang ditetapkan dalam Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015-2019, Renja Ditjen KSDAE Tahun 2018, dan Renstra Direktorat PIKA Tahun 2015-2019.

Direktorat PIKA sebagai penanggungjawab salah satu kegiatan Program KSDAE, yaitu kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dicapai pada tahun 2018.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat PIKA yang harus dicapai sebanyak 6 (enam) kinerja kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani Direktur PIKA sebagai Komitmen Pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal KSDAE atas Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Direktorat PIKA seperti disajikan pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5. Pencapaian IKK Direktorat PIKA Tahun 2018

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Renstra (2015-2019)	Target 2018	Capaian 2018	% Capaian 2018
1.	Tersedianya dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	121 Dokumen	403,33
2.	Terbentuknya rekomendasi hasil evaluasi fungsi kawasan konservasi	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	110 Unit	111 Unit	100,91
3.	Jumlah paket data	Jumlah paket data dan	521	521	100



	dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	informasi kawasan konservasi yang <i>valid</i> dan <i>reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	Paket Data	Paket Data	
4.	Terbentuk dan ditetapkannya 100 unit KPHK pada kawasan konservasi	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	100 Unit	112 Unit	112
5.	Terwujudnya kerja sama pembangunan dan kerja sama penguatan pada kawasan konservasi	Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	76 PKS	380
6.	Terintegrasinya zonasi/blok pengelolaankawasan konservasi ke dalam PetaRBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa	Jumlah Integrasi zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (One Map Policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa/adat	551 KK	551 KK	100
<b>RATA-RATA</b>					<b>199,37</b>

### A.1 IKK 1 : Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok.

Tabel 6. Pencapaian IKK 1 Direktorat PIKA Tahun 2018

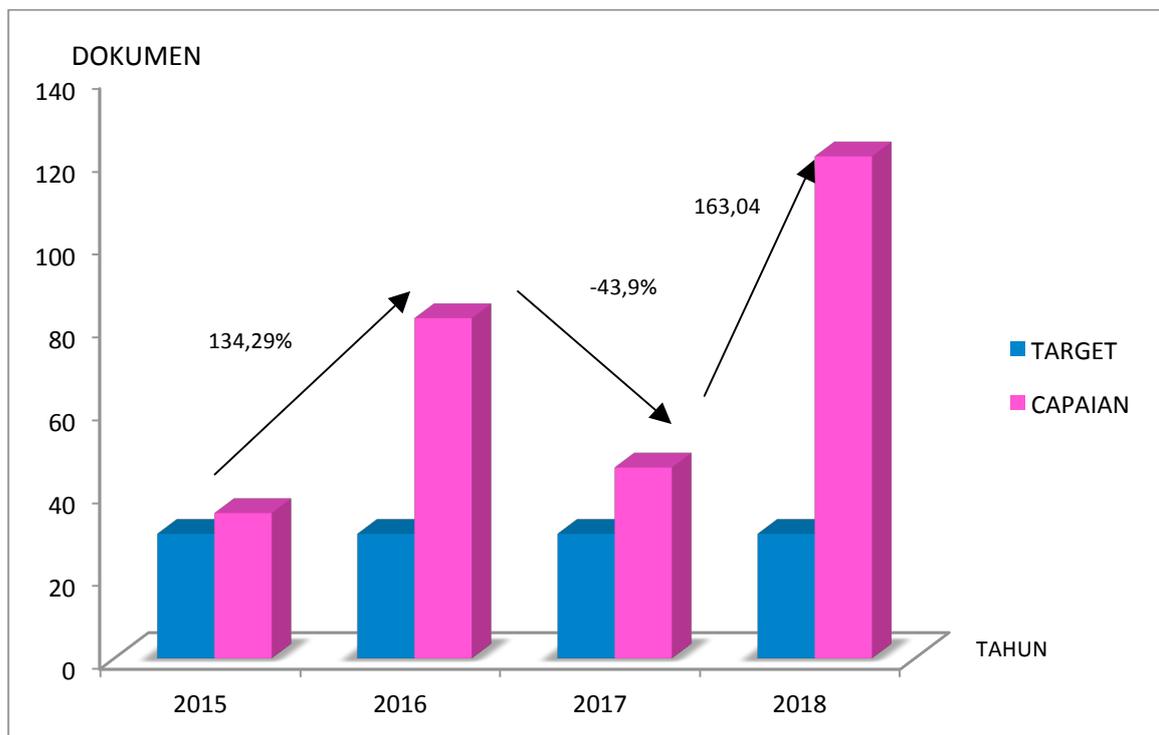
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2018	Realisasi IKK Tahun 2018	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen	121 Dokumen	403,33	1.521.840.000	1.506.073.760	98,96



Tabel 7. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1

No.	Tahun	Target	Jumlah Dokumen Penataan Blok	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1.	2015	30	35	-
2.	2016	30	82	134,29
3.	2017	30	46	-43,9
4.	2018	30	121	163,04
Total		120	284	

Dapat juga dilihat pada gambar diagram kenaikan/penurunan capaian kinerja IKK 1 sebagai berikut :



Gambar 8. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 1

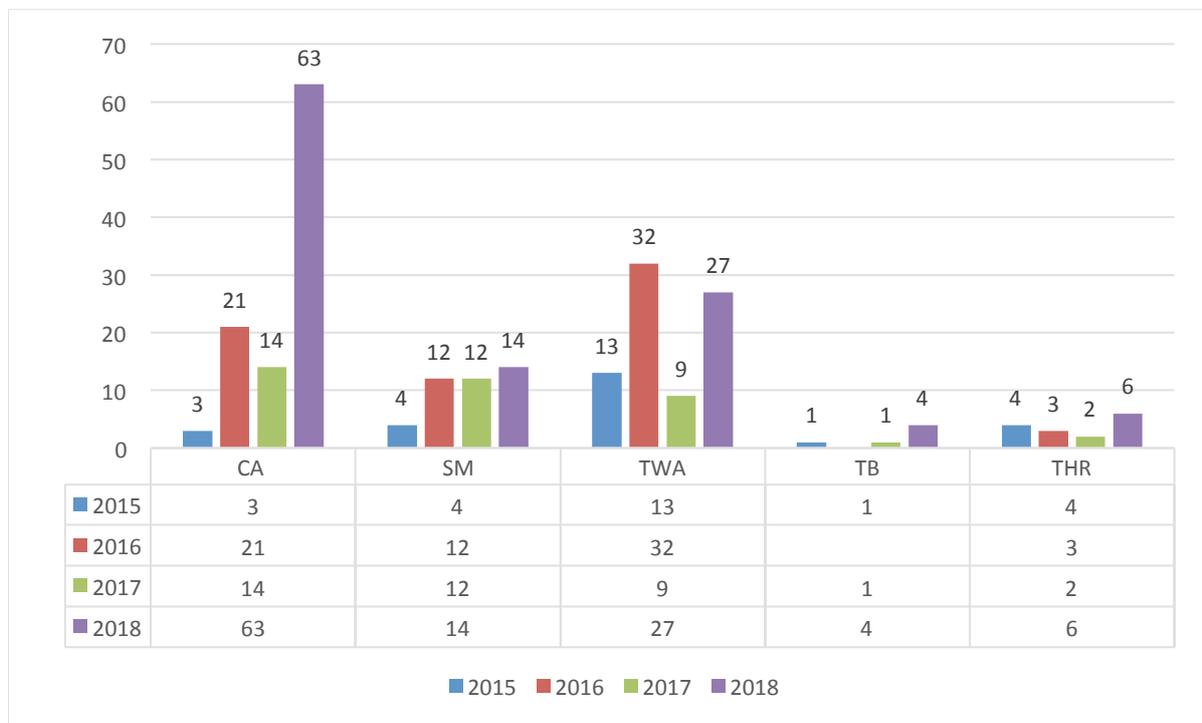
Pada tahun 2015, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 116,7% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 35 dokumen zonasi dan/atau blok. Data capaian kinerja pada IKK 1 dapat dilihat pada lampiran 3, untuk ringkasan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.



Tabel 8. Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Pengelolaan Berdasarkan Fungsi Kawasan

No.	Tahun	Fungsi Kawasan Konservasi						Total
		CA	SM	TWA	TB	THR	TN	
1.	2015	3	4	13	1	4	10	35
2.	2016	21	12	32	-	3	14	82
3.	2017	16	12	9	1	2	6	46
4.	2018	63	14	27	4	6	7	121
<b>TOTAL</b>		<b>103</b>	<b>42</b>	<b>81</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>284</b>

Dapat juga dilihat pada gambar diagram Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Berdasarkan Fungsi Kawasan sebagai berikut :



Gambar 9. Diagram Jumlah Dokumen Penataan Zona/Blok Berdasarkan Fungsi Kawasan

Pada tahun 2016, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 273,3% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 85 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.



Pada tahun 2017, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 146,67% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 44 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.

Pada tahun 2018, ditargetkan jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 dokumen zonasi dan/atau penataan blok. Realisasi pencapaian kinerja ini dapat tercapai sebesar 400,33% dari target 30 dokumen atau telah tersusun dan disahkan sebanyak 121 dokumen zonasi dan/atau penataan blok.

Dengan tercapainya jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sampai dengan tahun 2018, maka persentase target jangka menengah yang telah dicapai adalah sebesar 191,33% atau 287 dokumen zonasi dan/atau penataan blok dari rencana 150 dokumen.

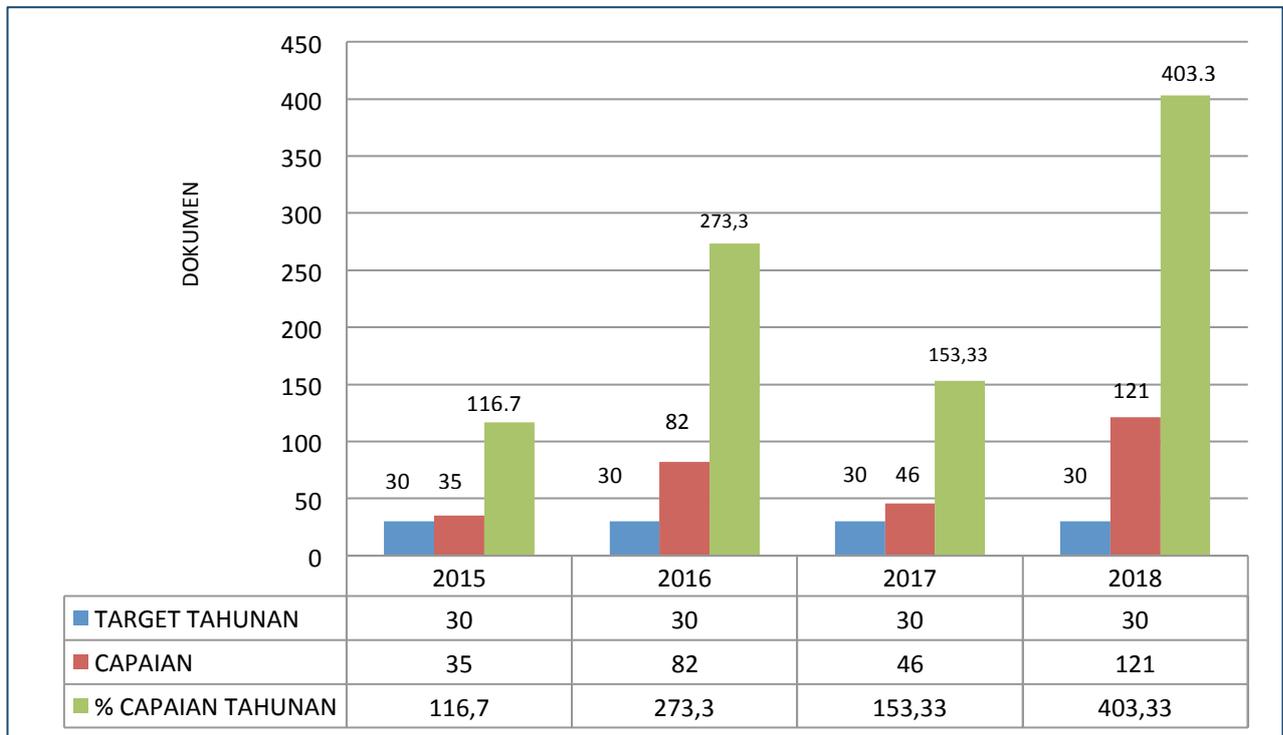
Jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kawasan konservasi (552 unit), maka sampai tahun 2018 dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang telah disusun dan mendapat pengesahan sebanyak 121 dokumen, sehingga jika di total dengan jumlah seluruh kawasan yang telah memiliki dokumen zona dan blok yang sudah disahkan sebanyak 317 dokumen atau dengan kata lain bahwa 57,43% kawasan konservasi telah memiliki zonasi dan/atau penataan blok pengelolaan.

Tabel 9. Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1

No.	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra (2015-2019)	Capaian IKK (Dokumen Penataan Zonasi/Blok)	% Capaian Tahunan	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2015-2019)
1.	2015	30	150	35	116,7	23,3
2.	2016	30	150	82	273,3	78,00
3.	2017	30	150	46	153,33	108,67
4.	2018	30	150	121	403,33	189,33
<b>Total</b>		<b>120</b>	<b>150</b>	<b>284</b>		



Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 1 sebagai berikut :



Gambar 10. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 1

Beberapa permasalahan dan rekomendasi terkait pencapaian kinerja pada IKK 1 :  
Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok.

1. Penyusunan Zona Blok masih ada keterbatasan informasi:
  - a. Informasi belum ada;
  - b. Informasi ada belum mutakhir atau belum terhimpun;
  - c. Manajemen survey/inventarisasi di pusat dan UPT terhimpun;
  - d. Manajemen survey/inventarisasi di pusat dan UPT belum kuat;
  - e. Menerapkan konsep KMK untuk memenuhi informasi kawasan secara cepat.
2. Kompetensi Masih perlu ditingkatkan dalam memahami :
  - a. Tujuan pengelolaan;
  - b. Nilai penting dan tekanan kawasan;
  - c. Merumuskan alokasi ruang dan tindakan yang tidak boleh dilakukan;
  - d. Mengkomunikasikan dengan masyarakat sekitar;
  - e. Peran Pokja Penilaian masih perlu dioptimalkan;



- f. Partisipasi dalam bentuk bimtek UPT;
  - g. Peningkatan kapasitas anggota Pokja;
  - h. Meluaskan latar anggota Pokja (tidak sebatas orang pusat KSDAE);
  - i. Perbaiki Job Description.
3. Kecepatan masih perlu ditingkatkan dalam hal :
- a. Pengiriman dokumen paska konsultasi publik;
  - b. Proses penilaian dokumen di Pusat;
  - c. Pengiriman dokumen paska Penilaian;
  - d. Proses pengesahan di Pusat.

Tindak Lanjut penanganan permasalahan dalam pencapaian kinerja :

1. Dalam rangka mendukung pencapaian target IKK 1, jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok, maka perlu dilakukan perbaikan dan pencermatan kegiatan yang mendukung langsung pencapaian target IKK;
2. Perlu diseleksi kegiatan yang prioritas yang mendukung pencapaian target IKK untuk dilaksanakan di awal tahun kegiatan, untuk menghindari terjadi hambatan karena self blocking;
3. Akan tetap berkoordinasi dengan UPT dan UPTD yang mengundang terkait dengan konsultasi publik, apabila UPT/UPTD mengalokasikan anggaran untuk Pusat menghadiri konsultasi publik.

*Cerita Sukses :*

*Keberhasilan Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam di Tahun 2018, dalam rangka pencapaian target IKK 1 yaitu dengan telah tercapainya pengesahan sebanyak 121 Dokumen. Beberapa langkah upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan penataan zona/blok, salah satunya dengan memfasilitasi penyusunan blok pengelolaan pada Taman Hutan Raya (Tahura) seluruh Indonesia, maka Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam melaksanakan Lokakarya Sinkronisasi terkait Dokumen Zona/Blok Tahun 2018 Lingkup Tahura di Bali pada Tanggal 07 – 10 Mei 2018.*

*Berdasarkan data Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, untuk*



*pengelolaan Tahura di Indonesia tercatat sebanyak 33 Unit Kawasan Tahura. Kondisi perkembangan penataan Blok Tahura pada Bulan Mei 2018 terdapat 9 unit Tahura yang baru disahkan, yaitu : Tahura Ir. H. Juanda di Provinsi Jawa Barat, Tahura Banten di Provinsi Banten, Tahura R. Soeryo di Provinsi Jawa Timur, Tahura Bunder di Provinsi Jogjakarta, Tahura Ngurah Rai di Provinsi Bali, Tahura Abdul Latief/Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahura Murhum/Nipa-Nipa di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Tahura Wan Abdur Rahman di Provinsi Lampung.*

*Selanjutnya perkembangan Blok Tahura dari pasca pelaksanaan lokakarya tersebut memperoleh hasil yang baik, beberapa pengelola kawasan Tahura segera menyusun dan mengusulkan rancangan dokumen blok pengelolaan ke Pusat. Sehingga sampai akhir Bulan Desember 2018, beberapa dokumen blok Tahura telah mendapatkan pengesahan bloknnya sebanyak 6 dokumen, diantaranya Tahura Have Worang di Provinsi Sulawesi Utara, Tahura Moh. Hatta di Provinsi Sumatera Barat , Tahura Gunung Menumbing di Provinsi Bangka Belitung, Tahura Gunung Mangkol di Provinsi Bangka Belitung, Tahura Lati Petangis di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahura Sultan Thaha Syaifuddin di Provinsi Jambi.*

*Selain itu, dampak dari pelaksanaan kegiatan lokakarya tersebut beberapa blok Tahura telah di bahas dan proses penilaian dipusat diantaranya Tahura Pancoran Mas Depok di Provinsi Jawa Barat, Tahura Lapak Jaru di Provinsi Kalimantan Tengah, TAHURA Palu di Provinsi Sulawesi Tengah, Tahura Pocut Meurah Intan, Tahura Nuraksa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan juga terdapat beberapa pengelola Tahura telah berproses dalam penyusunan maupun konsultasi public di daerah seperti Tahura Ir. Herman Yohanes di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahura Sekitar Tanjung di Provinsi Jambi, Tahura Bukit Suharto di Provinsi Kalimantan Timur, Tahura Bukit Barisan, dan Tahura Sutan Syarif di Provinsi Riau.*



## A.2 IKK 2 : Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi Untuk 521 Unit KSA, KPA, dan TB di Seluruh Indonesia.

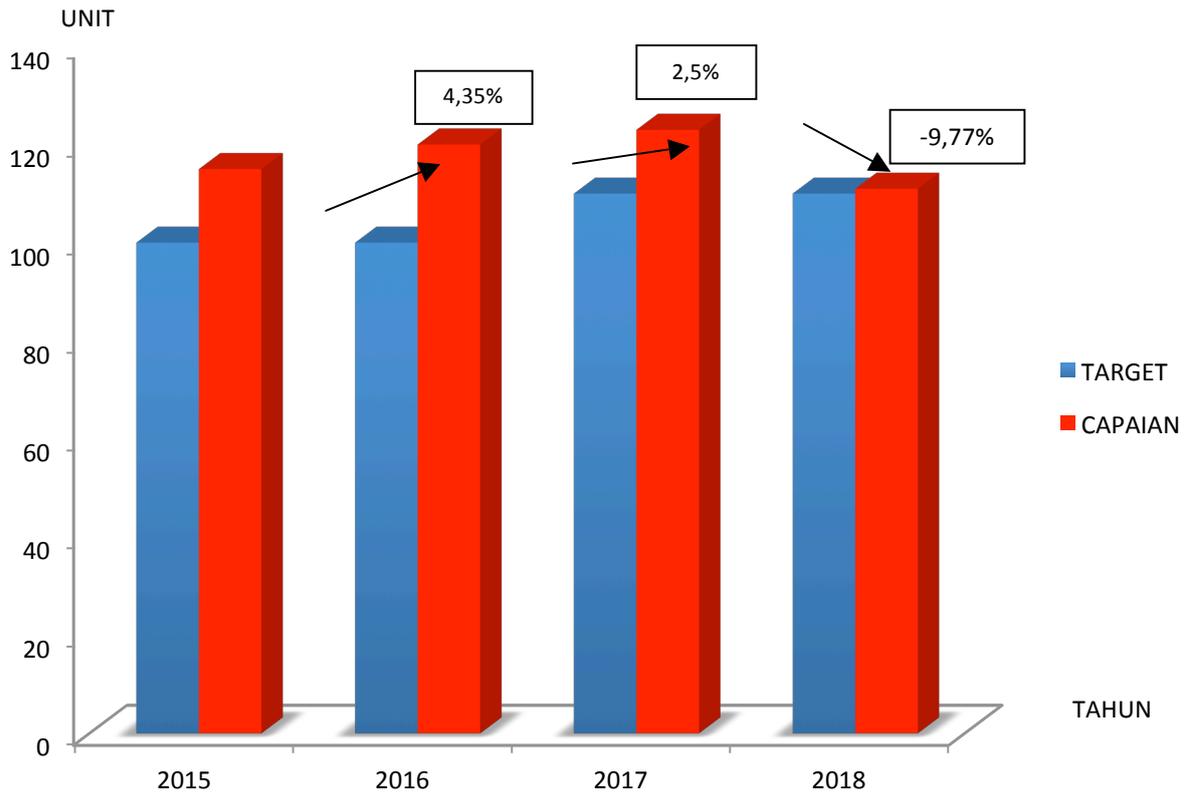
Pelaksanaan EKF yang dilakukan dimaksudkan agar dalam perkembangannya, pengelola dapat memahami secara ilmiah bagaimana kondisi KSA dan KPA yang menjadi lingkup kerjanya dari waktu ke waktu. Dalam rangka pencapaian IKK, maka dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE No. P.14/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2015-2019, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi dilakukan dengan metode *desk study*. Pencapaian kinerja Pada IKK 2 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 10. Pencapaian IKK 2 Direktorat PIKA Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2017	Realisasi IKK Tahun 2017	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA, dan TB di seluruh Indonesia	110 Unit	111 Unit	100,91	1.196.130.000	1.188.703.480	99,38%

Tabel 11. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2

No.	Tahun	Target	Jumlah Rekomendasi EKF	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1	2015	100	115	-
2	2016	100	120	4,35
3	2017	110	123	2,5
4	2018	110	111	-9,77
<b>TOTAL</b>		<b>420</b>	<b>469</b>	



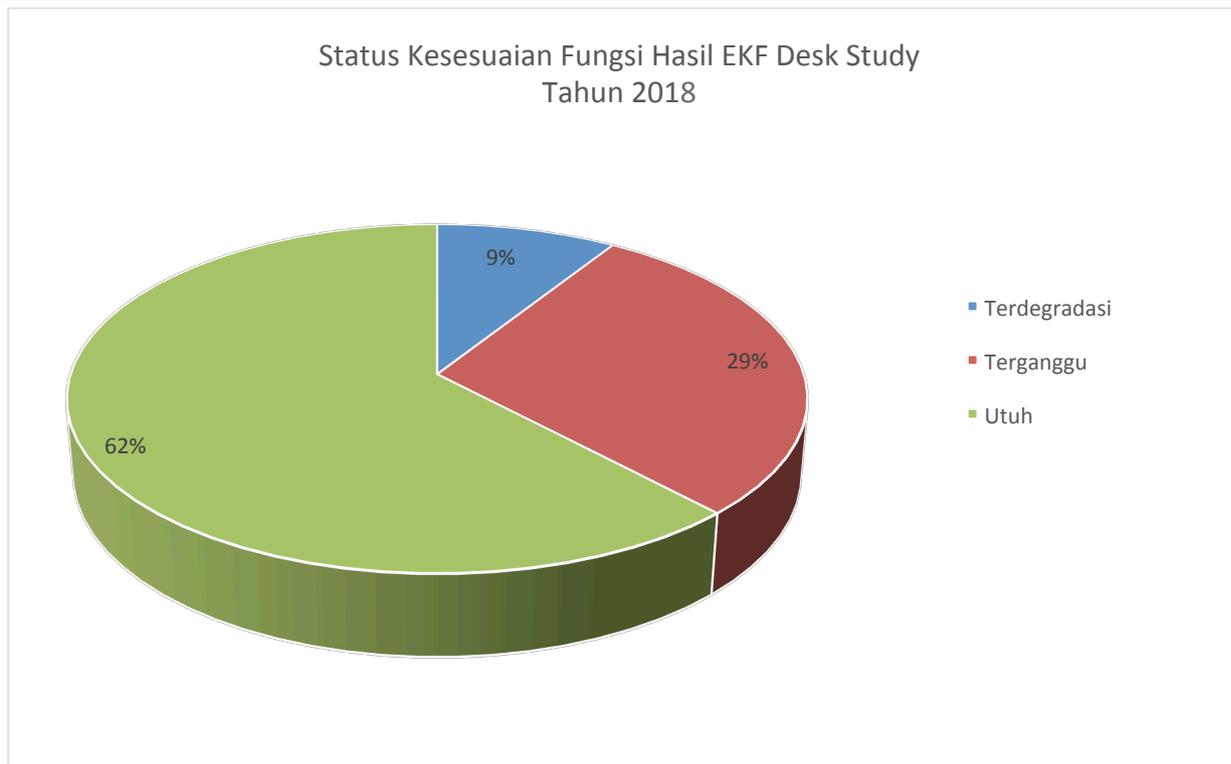
Gambar 11. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 2

Tahun 2015 telah dilaksanakan evaluasi kesesuaian fungsi dengan *desk study* pada 115 kawasan Taman Wisata Alam di seluruh Indonesia, pada tahun 2016 dilaksanakan pada 120 kawasan konservasi di Pulau Sumatera, kemudian pada tahun 2017 dilaksanakan pada 123 kawasan di pada region Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Pada tahun 2018 dilaksanakan kajian untuk kawasan di sebagian wilayah Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi sebanyak 111 kawasan.

Kawasan yang dikaji dalam kajian evaluasi kesesuaian fungsi dengan metode *desk study* tahun 2018 antara lain kawasan konservasi yang berada pada region Jawa Barat, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Rekapitulasi status kesesuaian fungsi untuk kawasan yang dikaji disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Rekapitulasi status kesesuaian fungsi hasil kajian evaluasi kesesuaian fungsi

No	Status Kesesuaian Fungsi	Jumlah Kawasan	Persentase
1	Terdegradasi	10	9%
2	Terganggu	32	29%
3	Utuh	69	62%
	<b>Total</b>	<b>111</b>	<b>100%</b>



Gambar 12. Diagram Status Kesesuaian Fungsi Hasil EKF Desk Study Tahun 2018

Untuk tahun 2018, capaian jumlah rekomendasi hasil EKF kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia adalah sebanyak 111 unit kawasan atau 100,91% dari target tahun 2018. Data terkait capaian kinerja pada IKK 2 dapat dilihat pada lampiran 6.

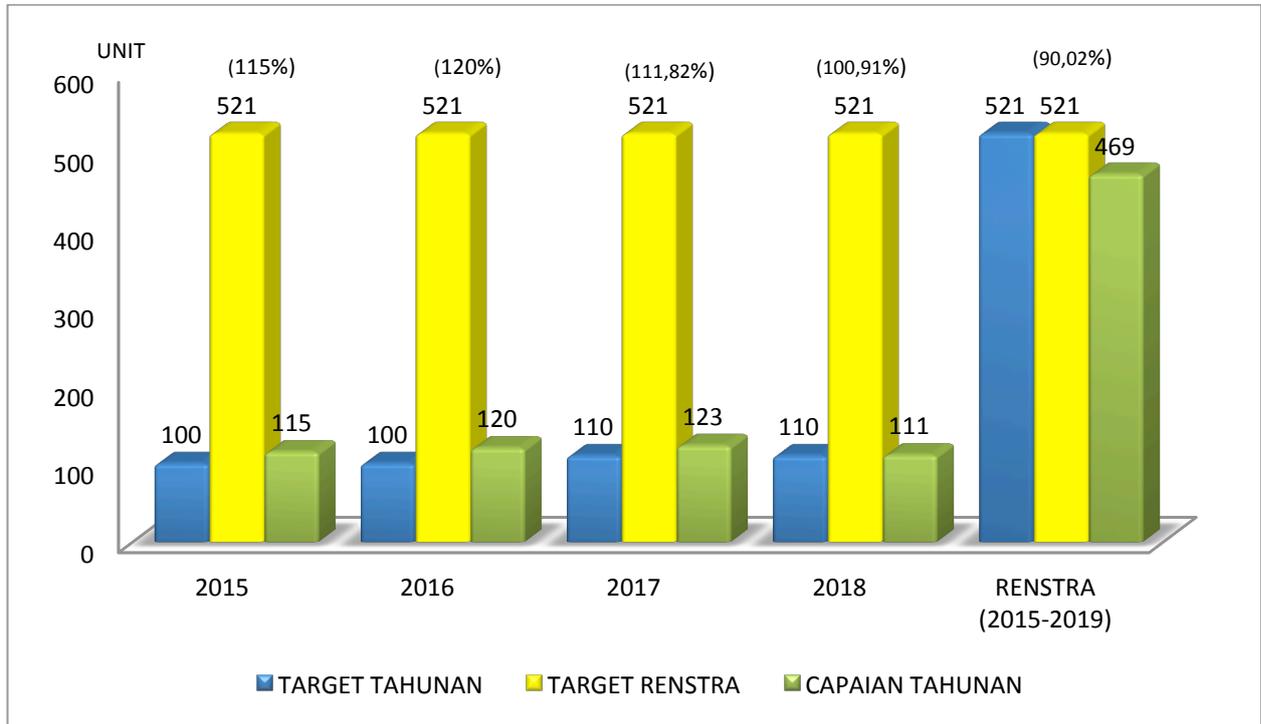
Jika dibandingkan dengan target jumlah kawasan konservasi (521 unit) yang harus di evaluasi, maka sampai dengan tahun 2018 telah dihasilkan rekomendasi terhadap 469 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia atau dengan kata lain telah direkomendasikan sebanyak 90,02% KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.

Tabel 13. Persentase Capaian Kinerja IKK 2 Tahunan dan Renstra

No.	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra (2015-2019)	Capaian IKK (Unit Rekomendasi EKF)	% Capaian Tahunan	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2015-2019)
1.	2015	100	521	115	115,00	22,07
2.	2016	100	521	120	120,00	45,11
3.	2017	110	521	123	111,82	68,71
4	2018	110	521	111	100,91	90,02
<b>Total</b>			<b>521</b>	<b>469</b>		



Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 2 sebagai berikut :



Gambar 13. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 2

Dalam upaya mencapai IKK jumlah rekomendasi hasil EKF kawasan konservasi, terdapat beberapa kendala yang dihadapi:

- Belum dipahaminya oleh UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE bahwa kegiatan EKF merupakan kewajiban yang harus dilakukan terhadap setiap kawasan, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015. Hal tersebut juga berimplikasi pada kesiapan UPT untuk mengalokasikan anggaran kegiatan EKF.
- Standar biaya pelaksanaan EKF yang besar, sehingga dibutuhkan alokasi yang besar untuk kegiatan EKF di UPT-UPT.
- Persiapan pelaksanaan EKF yang panjang, sehingga dibutuhkan perencanaan yang lebih terencana dengan baik.
- Tidak semua rekomendasi hasil EKF dapat diltindaklanjuti dengan segera dikarenakan terbatasnya anggaran.
- Terbatasnya penyedia jasa konsultan yang memahami bidang evaluasi kesesuaian fungsi.



Solusi sebagai tindak lanjut permasalahan adalah:

- a. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE;
- b. Alokasi yang cukup untuk kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi kepada UPT-UPT.

**Cerita Sukses :**

*Selama Tahun 2015-2018 mendapat kondisi kesesuaian fungsi dari seluruh kawasan konservasi sebanyak 469 unit Rekomendasi Evaluasi Kesesuaian Fungsi.*

**A.3 IKK 3 : Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia.**

Tabel 14. Pencapaian IKK 3 Direktorat PIKA Tahun 2018

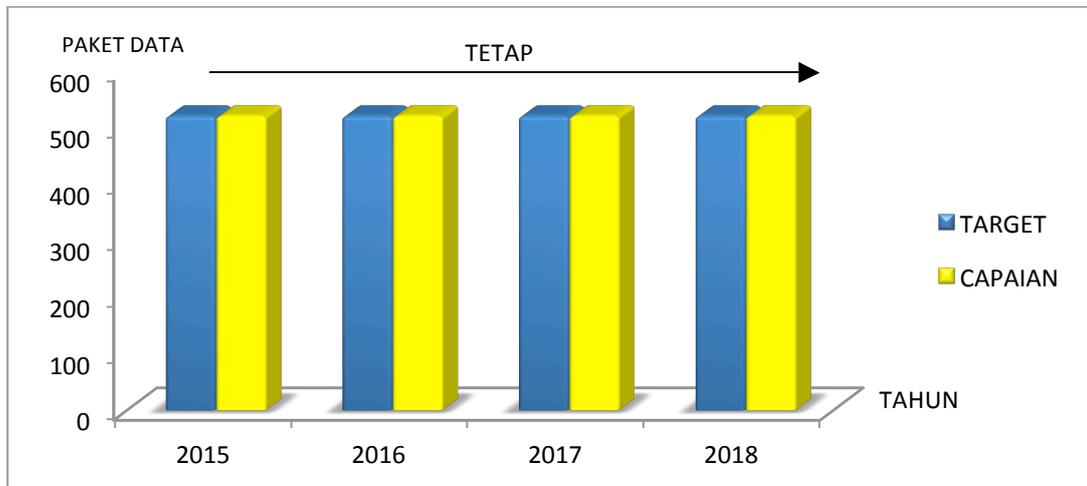
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2018	Realisasi IKK Tahun 2018	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data	521 Paket Data	100	756.170.000	739.178.594	97,75

Tabel 15. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 3

No.	Tahun	Target	Jumlah Paket Data	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1	2015	521	521	-
2	2016	521	521	-
3.	2017	521	521	-
4.	2018	521	521	-



Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 2 sebagai berikut :



Gambar 14. Diagram Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 3

Persentase kenaikan/penurunan yang dicapai bernilai 0 atau tetap, karena target sepanjang tahun (2015 - 2019) konstan yaitu paket data pada 521 kawasan konservasi. Hasil pengumpulan data dan peta potensi kawasan konservasi, kemudian dikelompokkan, dianalisa, disimpan, dan kemudian didokumentasikan dalam bentuk aplikasi data. Paket data yang diinput sampai dengan tahun 2018 dimasukan dan disimpan ke dalam aplikasi SIPIKA. SIPIKA merupakan sistem informasi yang memuat data tupoksi pada setiap subdit yang berada di Direktorat PIKA. Tujuan dibentuknya SIPIKA berbasis online adalah untuk mempermudah proses pertukaran data setiap subdit yang terdapat di Direktorat PIKA. Website SIPIKA disimpan di server Subdit IKA dan telah terhubung oleh jaringan publik, sehingga website tersebut dapat diakses secara online pada alamat <http://121302216648.ip-dynamic.com/>.



Gambar 15. Halaman login website SIPIKA



Tabel 16. Jumlah Paket Data dan Informasi KK Tahun 2015 – 2018

No.	Tahun	Target	Lokasi Satker	Keterangan
1.	2015	521 KK	53 TN	KK non TN terdiri dari CA, SM, TWA dan THR dan TB
			21 BKSDA (486 Kawasan)	
2.	2016	521 KK	28 Tahura	
			53 TN	
3.	2017	521 KK	21 BKSDA (486 Kawasan)	
			28 Tahura	
4.	2018	521 KK	53 TN	
			21 BKSDA (486 Kawasan)	
			28 Tahura	

Target IKK paket data adalah konstan dari tahun 2015 - 2019, yaitu paket data pada 521 kawasan konservasi. Oleh karena itu paket data dibagi menjadi paket data tahun 2015 sampai dengan paket data tahun 2019. Pengisian paket data tiap tahun berbeda akan tetapi jumlah KK yang didata tetap yaitu 521 kawasan konservasi, oleh karena itu tidak bisa dilakukan penghitungan kenaikan/penurunan persentase paket data yang terkumpul. Setiap tahun targetnya sama yaitu 521 kawasan konservasi, dengan isi paket data yang berbeda. Isian paket data dapat dilihat pada lampiran 7.

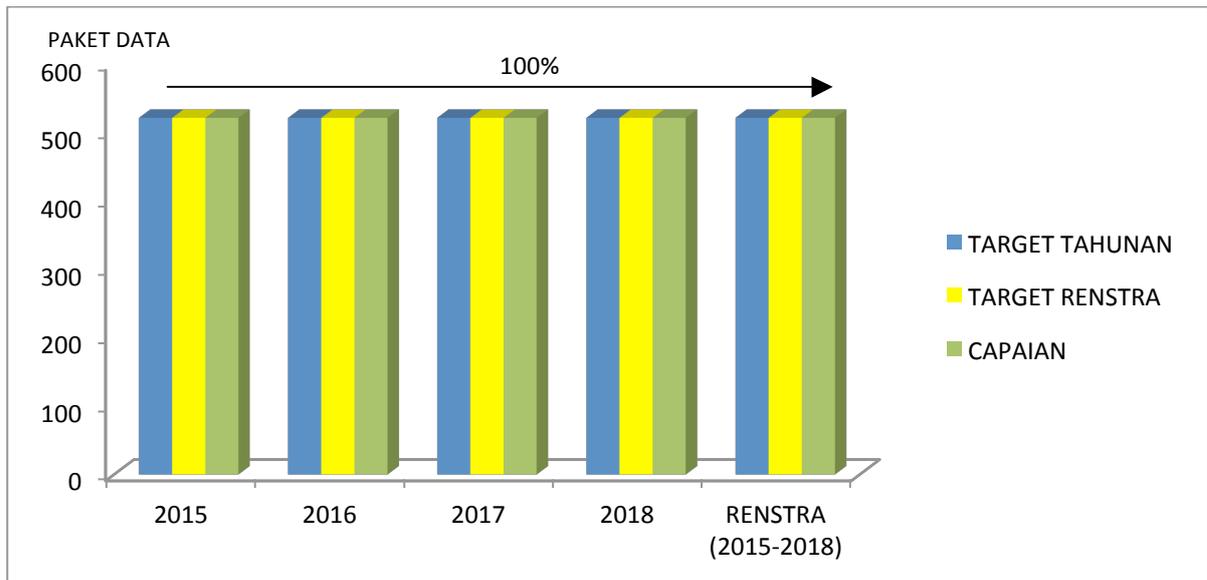
Untuk perhitungan pencapaian IKK ini pada Capaian Renstra (2015-2019) adalah bukan akumulasi dari capaian tahunan, melainkan tetap dikarenakan indikator paket data adalah pemutakhiran paket data 521 kawasan konservasi.

Tabel 17. Persentase Capaian Kinerja IKK 3 Tahunan dan Renstra

No.	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra (2015-2019)	Capaian IKK (Paket Data KK)	% Capaian Tahunan	%Pencapaian Renstra (2015-2019)
1.	2015	521	521	521	100	100
2.	2016	521	521	521	100	100
3.	2017	521	521	521	100	100
4.	2018	521	521	521	100	100
<b>Total</b>		<b>521</b>	<b>521</b>	<b>521</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan Renstra IKK 3 sebagai berikut :



Gambar 16. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 3

#### *Cerita Sukses :*

*Adanya revitalisasi website Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia. Melaksanakan Soft launching portal website BKKHI pada 28 Agustus 2018. Mendapatkan Penghargaan emas (Gold Award) untuk Portal Balai Kliring Keanekaragaman Hayati Indonesia dalam kategori Mekanisme Balai Kliring Nasional Baru (New National Clearing House Mechanism) dalam ajang penilaian Clearing House Mechanism (CHM) Award pada COP CBD ke 14 di Mesir.*

#### **A.4 IKK 4 : Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK.**

Penentuan target KPHK pada Renstra Direktorat PIKA dan Perjanjian Kinerja (PK) 2018 sebesar 100 Unit KPHK, target tersebut merupakan akumulasi dari target yang harus diselesaikan dalam 2 tahun yaitu 2015 dan 2016. Target 2015 dan 2016 semula pembentukan KPHK sebanyak 20 dan 80 unit setiap tahun selama periode Renstra 2015-2019. Dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tahun 2015-2019, maka target pembentukan KPHK pada tahun 2015 dan 2016 disesuaikan menjadi sebanyak 40 dan 60 Unit KPHK yang terbentuk.



Verifier pembentukannya adalah "Usulan Dirjen KSDAE kepada Menteri LHK tentang pembentukan KPHK dan SK Menteri LHK". Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar pada akhir Renstra 2015-2019 semua KPHK yang dibentuk dapat beroperasi. Sementara di dalam Renstra Direktorat Jenderal KSDAE masih tercantum target pembentukan KPHK untuk tahun 2015 dan 2016 masing-masing 20 unit dan 80 unit. Direncanakan akan ada review Renstra Ditjen KSDAE sehingga Direktorat PIKA mengusulkan untuk tahun 2015 dan 2016, jumlah unit KPHK yang terbentuk diusulkan menjadi 40 dan 60 Unit KPHK.

Target KPHK pada tahun 2015 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 18. Target dan Data KPHK s/d Tahun 2018

No.	Tahun	Target Renstra (Unit)	Target PK (Unit)	KPHK Disahkan (Unit)		Pengusulan KPHK kepada Menteri (Unit)
				TN	Non TN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	2015	40	40		42	42
2.	2016	100	60		59	59
3.	2017	100	100	-	-	-
4.	2018	100	100	1	11	12
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>112</b>	<b>113</b>

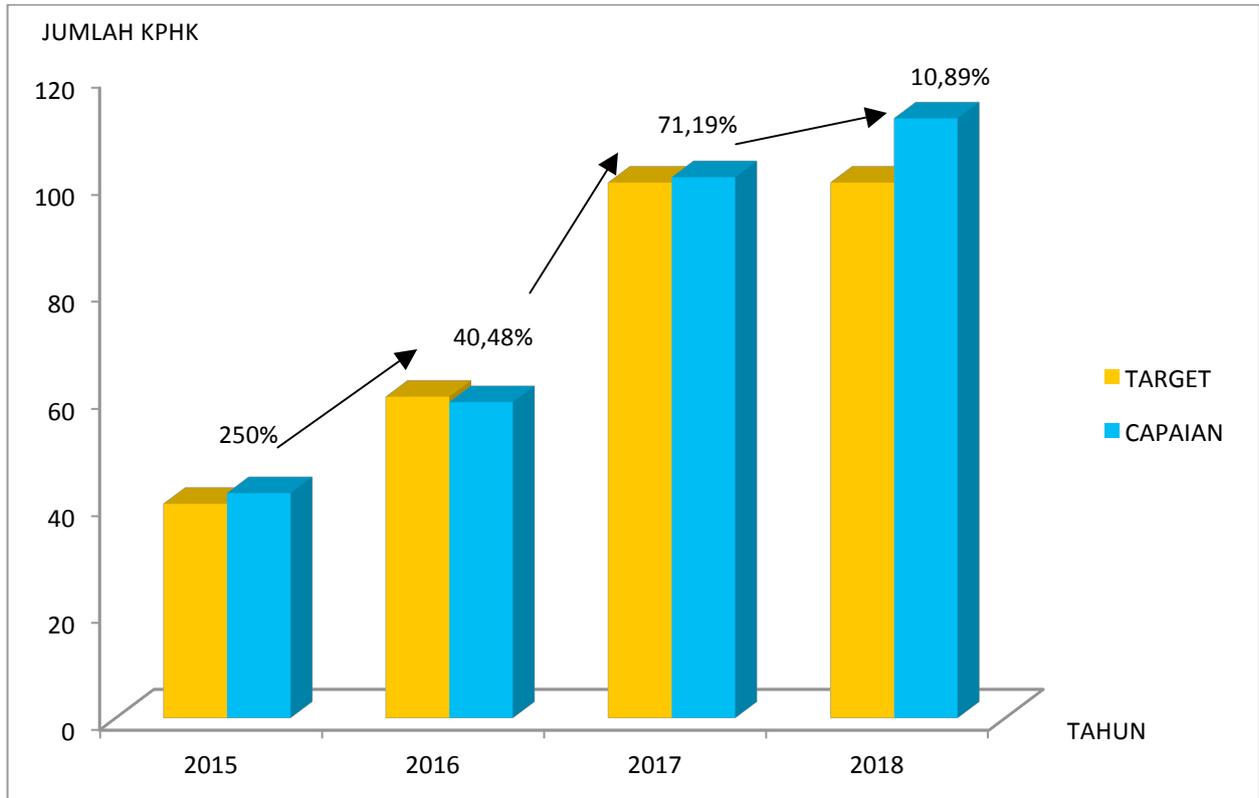
Dalam kurun waktu tahun 2015-2019 direncanakan terbentuk sebanyak 100 unit KPHK Non Taman Nasional baru. Sampai akhir tahun 2018, dari sejumlah 113 usulan KPHK, yang telah mendapat pengesahan KPHK Non Taman Nasional sebanyak 112 unit, sedangkan 1 (satu) usulan lagi merupakan usulan KPHK Taman Nasional, yakni KPHK Taman Nasional Zamrud. Persentase kenaikan/penurunan pada IKK 4 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 19. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 4

No.	Tahun	Target	Jumlah KPHK Non TN Yang Diusulkan (unit)	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1.	2015	40	42	250
2.	2016	60	59	40,48
3.	2017	100	101	71,19
4.	2018	100	112	10,89
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>112</b>	



Dapat juga dilihat pada gambar diagram kenaikan/penurunan capaian IKK 4 sebagai berikut :



Gambar 17. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian IKK 4

Tabel 20. Pencapaian IKK 4 Direktorat PIKA Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2018	Realisasi IKK Tahun 2018	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit KPHK	100 Unit	112 Unit	112	318.210.000	311.074.118	97,76

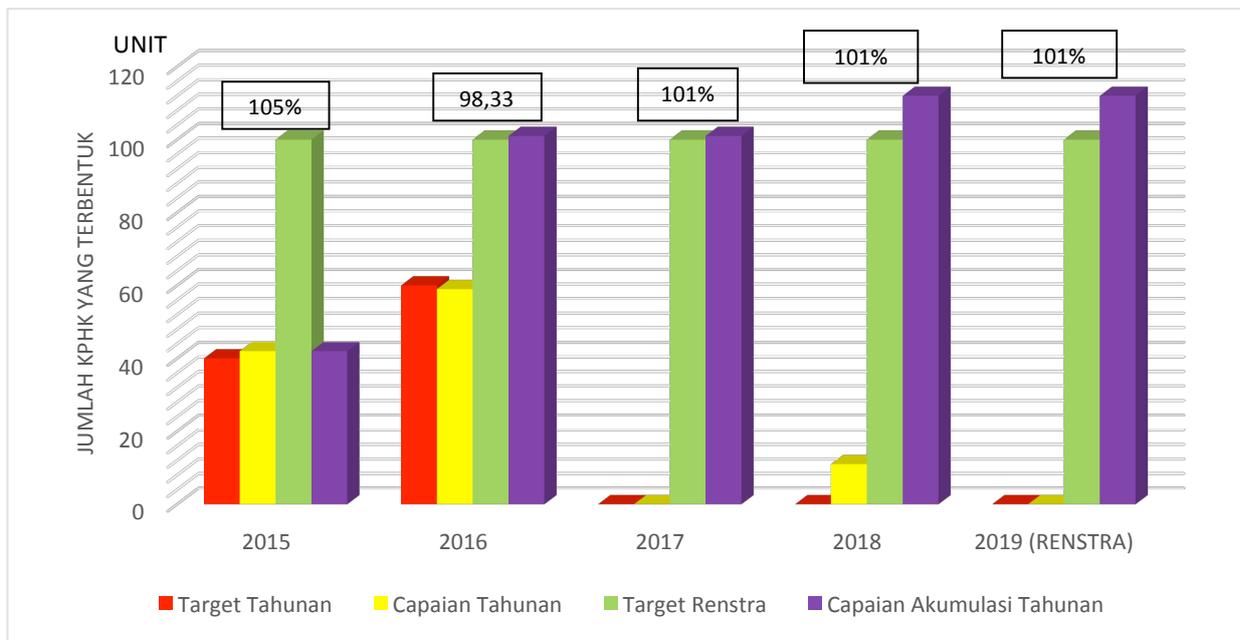
Tabel 21. Persentase Capaian Kinerja IKK 4 Tahunan dan Renstra

No.	Tahun	Target Tahunan PK	Target Tahunan Renstra	Target Renstra (2015-2019)	Capaian IKK (Unit KPHK)	% Capaian Tahunan	%Pencapaian Thdp Renstra (2015-2019)
1.	2015	40	40	40	42	105	42
2.	2016	60	100	100	59	98,33	101
3.	2017	100	100	100	101	101	101
4.	2018	100	100	100	112	112	112
<b>Total</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>112</b>			



Pencapaian kinerja IKK 4 target Renstra Direktorat PIKA 2015-2019 telah terpenuhi sejak tahun 2017, yaitu sebesar 101%, dengan verifiser target IKK berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.14/KSDAE-SET/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencapaian Target Kinerja Program KSDAE Tahun 2015-2019, yaitu "Usulan Dirjen KSDAE kepada Menteri LHK tentang pembentukan KPHK dan SK Menteri LHK". Namun demikian, pembentukan KPHK baik KPHK Taman Nasional maupun KPHK Non Taman Nasional terus dilanjutkan. Sehingga pada tahun 2018, terdapat 12 usulan pembentukan KPHK dari Dirjen KSDAE kepada Menteri LHK, yang terdiri dari 11 (sebelas) usulan Rancang Bangun KPHK Non Taman Nasional dan 1 (satu) usulan Rancang Bangun KPHK Taman Nasional.

Dapat juga dilihat pada gambar diagram persentase capaian kinerja tahunan dan renstra ikk 4 sebagai berikut :



Gambar 18. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 4

Dalam pencapaian IKK Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK, terdapat beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2018, yaitu:

1. Pembinaan dan Koordinasi Bidang Pemolaan Kawasan Konservasi.

Pembinaan dan koordinasi dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi di bidang pemolaan. Pada tahun 2018 dilakukan pada 5 (lima) UPT, yaitu: Balai Besar KSDA Jawa Barat, Balai Besar KSDA Papua, Balai KSDA Sumatera



Selatan, Balai KSDA Kalimantan Tengah dan Balai KSDA Jawa Tengah, dan 6 (enam) lokasi, yaitu: Cibodas, Batam, Makasar, Kebumen, Tangkoko dan Manokwari.

2. Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyusunan Rancang Bangun KPHK.

Bimbingan teknis dan supervisi dilakukan kepada UPT yang sedang menyusun rancang bangun KPHK. Pada tahun 2018, kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Penyusunan Rancang Bangun KPHK dilakukan pada 4 (empat) UPT, yaitu Balai Besar KSDA Jawa Barat, Balai KSDA Sumatera Barat, Balai TN Tanjung Puting dan Balai TN Meru Betiri.

3. Reviu Penetapan KPHK

Reviu Penetapan KPHK dilaksanakan dengan tujuan untuk perbaikan terhadap SK (Surat Keputusan) Penetapan KPHK yang sudah terbit sejak tahun 2009. Pada tahun 2018, kegiatan ini dilaksanakan pada beberapa lokasi, yaitu Balai Besar KSDA Jawa Barat, Balai KSDA Sulawesi Utara, Balai KSDA Jawa Tengah, UPTD Tahura Ngurah Rai, Balai KSDA Sumatera Barat, Balai TN Tanjung Puting, Balai TN Merapi.

4. Monitoring dan Evaluasi KPHK dan Bidang Pemolaan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi KPHK dan Bidang Pemolaan dilatarbelakangi oleh perlunya mereview data/informasi/ pembentukan KPHK serta data/informasi/bahan dari pemantapan dan penataan kawasan, evaluasi dan perubahan fungsi serta tumpang tindih peruntukan Kawasan Konservasi. Pada tahun 2018, kegiatan ini dilakukan pada Calon Tahura Wanagama 3 di Kebumen dan Tahura KGPA di Solo.

5. Rapat Penyusunan Pedoman Pembentukan KPHK

Rapat dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2018, bertempat di Sahira Butik Hotel, Bogor. Rapat dibuka oleh Kepala Sub Direktorat Penataan Kawasan Konservasi dan dihadiri oleh perwakilan dari Gugus Tugas Multipihak Ditjen KSDAE, Sub Direktorat lingkup Direktorat PIKA, Sekretariat Ditjen KSDAE, GIZ *Forclime* dan USAID BIJAK.

Sesuai target Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2015 – 2019, maka capaian IKK Jumlah KPHK pada kawasan konservasi Non Taman Nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK, dengan *verifier* berupa Usulan KPHK oleh Dirjen KSDAE kepada Menteri LHK. Pada tahun 2018, kegiatan difokuskan untuk mendorong pembentukan KPHK pada



Kawasan Konservasi yang belum menjadi KPHK, dan juga melakukan reviu penetapan KPHK terhadap beberapa wilayah KPHK yang sudah ditetapkan.

Dari 101 usulan rancang bangun KPHK Non Taman Nasional yang sudah disampaikan kepada Menteri LHK, sampai dengan akhir tahun 2018 telah terbit 97 SK Menteri LHK tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi. Dari 101 usulan rancang bangun tersebut juga terdapat 1 (satu) usulan yang tidak dapat dilanjutkan prosesnya, yakni KPHK Danau Pulau Besar/Danau Bawah, dikarenakan perubahan fungsi kawasan hutan. Sesuai dengan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK. 350/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa serta kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap menjadi Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak, Provinsi Riau seluas ± 31.480 Hektar. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) usulan KPHK yang belum diterbitkan surat keputusan penetapannya, yaitu usulan KPHK Isau-isau di Provinsi Sumatera Selatan, KPHK Gunung Api Banda di Provinsi Maluku, dan KPHK Lembah Anai di Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan pada tahun 2018 difokuskan untuk mendorong terbitnya SK KPHK yang usulannya telah disampaikan dan melakukan reviu terhadap Surat Keputusan Penetapan Wilayah KPHK yang telah terbit sejak tahun 2009. Kegiatan reviu penetapan KPHK dilakukan pada KPHK yang berada dibawah pengelolaan Balai Besar KSDA Jawa Barat, KPHK Taman Nasional Gunung Merapi, KPHK Taman Nasional Tanjung Puting, KPHK Taman Nasional Meru Betiri dan KPHK Tambora. Selain itu, pada tahun 2018 juga terdapat 12 usulan rancang bangun KPHK baru yang disampaikan kepada Menteri LHK, yaitu KPHK Taman Nasional Zamrud, KPHK Kimaam, KPHK Bupul Bian, KPHK Membramo Foja, KPHK Muka Rempang, KPHK Buluh Cina, KPHK Karakelang, KPHK Lokon Manembo, KPHK Panua Tanjung Panjang, KPHK Gunung Ambang, KPHK Tahura Bukit Suharto dan KPHK Tahura Bunder.

Kegiatan tahun 2019 difokuskan untuk:

- a. Penyelesaian pedoman pembentukan KPHK;
- b. mendorong terbitnya 12 SK KPHK yang telah diusulkan pada tahun 2018;
- c. menyelesaikan permasalahan kawasan konservasi yang menjadi kendala dalam penetapan wilayah KPHK Isau-isau di Provinsi Sumatera Selatan, KPHK Gunung Api Banda di Provinsi Maluku, dan KPHK Lembah Anai di Provinsi Sumatera Bara, yang



hingga saat ini masih dalam proses penelaahan di Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;

- d. Mendorong UPT untuk mengusulkan rancang bangun KPHK terhadap Kawasan-kawasan yang belum menjadi KPHK;
- e. Memproses usulan KPHK baru serta melakukan reviu terhadap SK Penetapan KPHK.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IKK Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK adalah:

1. Permasalahan dalam hal pengukuhan kawasan sebagai unit pembentukan KPHK;
2. Belum dipahaminya materi penyusunan rancang bangun KPHK oleh UPT lingkup KSDAE;
3. Belum adanya pedoman dalam pembentukan KPHK, terutama untuk KPHK Tahura;
4. UPT pengelola Tahura belum mendapatkan pendampingan dalam pembentukan KPHK.

Beberapa solusi sebagai tindak lanjut permasalahan dalam pencapaian IKK ini adalah:

1. Perlu ditindaklanjuti penyelesaian permasalahan kawasan hutan konservasi, terkait pengukuhan kawasan, untuk mendorong pembentukan KPHK dan reviu terhadap SK Penetapan Wilayah KPHK;
2. Perlu dilakukan koordinasi dengan Ditjen PKTL dalam upaya percepatan penerbitan SK Pembentukan KPHK, dan terkait upaya percepatan penyelesaian permasalahan pengukuhan kawasan konservasi;
3. Percepatan penyusunan peraturan tentang Pembentukan KPHK;
4. Perlunya bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE dan UPT Tahura;
5. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendampingan perlu dilakukan lebih intensif;
6. Perlunya pendampingan dan alokasi anggaran baik untuk UPT lingkup Ditjen KSDAE, maupun UPT pengelola Tahura dalam rangka pembentukan KPHK.

*Cerita Sukses :*

*Target Pencapaian usulan penetapan KPHK Non Taman Nasional selama 5 tahun yaitu sebesar 100 KPHK, pada Tahun 2015 capaian usulan penetapan KPHK Non Taman Nasional (TN) melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 42 KPHK Non TN dari 40 KPHK Non TN. Pada Tahun 2016 capaian usulan penetapan KPHK Non Taman*



*Nasional (TN) yaitu 59 KPHK Non TN dari 60 KPHK, hal ini merupakan keberhasilan pencapaian usulan penetapan KPHK Non Taman Nasional selama 5 tahun dari target 100 KPHK, tercapai usulan penetapan KPHK Non Taman Nasional sebanyak 101 KPHK. Pada Tahun 2018 terdapat pula usulan baru penetapan KPHK yaitu sebanyak 11 KPHK Non TN dan 1 KPHK Taman Nasional.*

#### **A.5 IKK 5: Jumlah Kerja sama Pembangunan Strategis dan Kerja sama Penguatan Fungsi pada Kawasan Konservasi Sebanyak 100 PKS.**

Dalam upaya mendukung tata kelola pengelolaan KSA dan KPA, Pemerintah telah membuka ruang kerja sama penyelenggaraan di KSA dan KPA berdasarkan Pasal 43, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Jo. Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA. Kerja sama Penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan kegiatan bersama para pihak (mitra) yang dibangun atas kepentingan bersama untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan, atau karena adanya pertimbangan khusus bagi penguatan ketahanan nasional.



Gambar 19. Sosialisasi Kerja sama Permenhut P.85/Menhut-II/2014 Jo P.44/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tanggal 26 – 27 September 2018 di Semarang

Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KSA dan KPA, bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan



konservasi dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA tersebut meliputi:

- a. Kerja sama penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman hayati, dan
- b. Kerja sama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan.

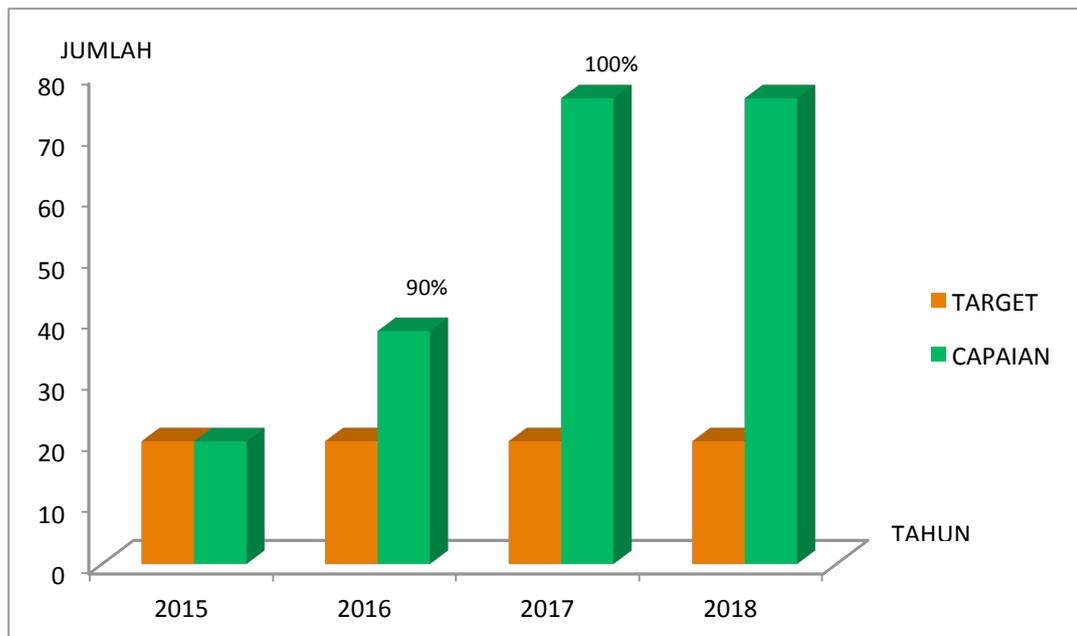
Tabel 22. Pencapaian IKK 5 Direktorat PIKA Tahun 2018

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target IKK Tahun 2018	Realisasi IKK Tahun 2018	% Realisasi IKK	Anggaran pada IKK (Rp.)	Realisasi Anggaran pada IKK (Rp.)	% Realisasi Anggaran
1.	Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS	76 PKS	380%	1.518.340.000	1.493.929.903	98,39%

Tabel 23. Persentase Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 5

No.	Tahun	Target	Jumlah PKS	% Kenaikan/Penurunan (Dibandingkan Tahun Sebelumnya)
1.	2015	20	20	-
2.	2016	20	38	90
3.	2017	20	76	100
4.	2018	20	76	-
<b>TOTAL</b>		<b>80</b>	<b>210</b>	

Kenaikan capaian kinerja IKK 5 dapat dilihat pada diagram di bawah ini:



Gambar 20. Diagram Kenaikan/Penurunan Capaian Kinerja IKK 5



Sesuai dengan Renstra yang memiliki target PKS sebanyak 20 per tahun, maka sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 Sub Direktorat Pemanfaatan Kawasan Strategis memiliki target akumulasi sebanyak 80 (Delapan Puluh) dokumen Perjanjian Kerja Sama. Namun demikian, terhitung pada akhir 2018, Sub Direktorat Pemanfaatan Kawasan Strategis telah menyelesaikan penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama sebanyak 210 atau 262,5% dokumen perjanjian kerjasama terdiri atas:

- a. Tahun 2015 sebanyak 20 PKS;
- b. Tahun 2016 sebanyak 38 PKS;
- c. Tahun 2017 sebanyak 76 PKS; dan
- d. Tahun 2018 sebanyak 76 PKS.

Khusus pada tahun 2018, telah diselesaikan 76 naskah Perjanjian Kerja sama dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 24. Rekapitulasi Perkembangan Proses Permohonan Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA Tahun 2018

No.	Uraian	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Kerja sama Penguatan Fungsi</b>	<b>48</b>
1.	Perjanjian Kerja sama telah ditandatangani	48
<b>B.</b>	<b>Kerja sama Pembangunan Strategis</b>	<b>28</b>
1.	Perjanjian Kerja sama telah ditandatangani	28
<b>JUMLAH TOTAL (A+B)</b>		<b>76</b>

Tabel 25. Kategori Permohonan Kerja sama Pembangunan Strategis Tahun 2018

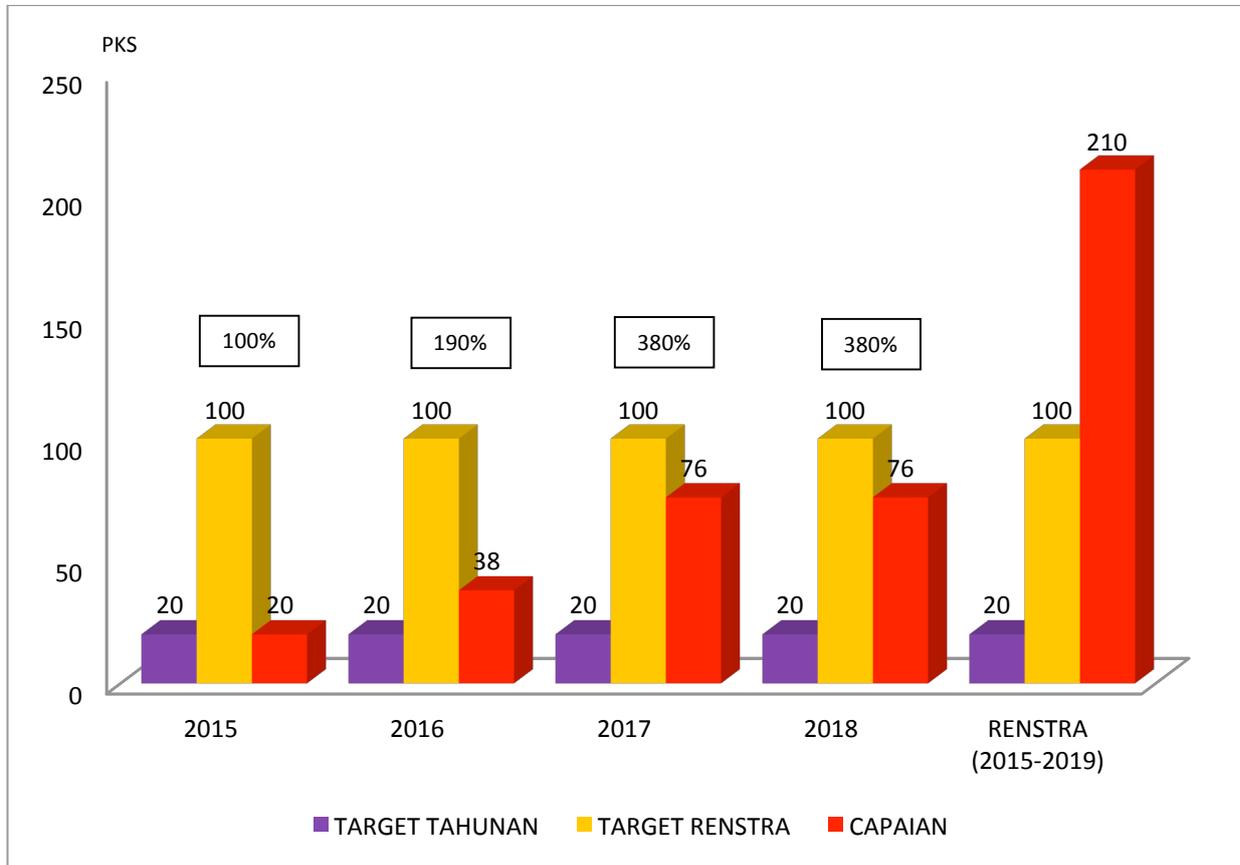
No.	Kategori Kerja sama	Jumlah
1.	Sarana Komunikasi dan pendukungnya	6
2.	Transportasi terbatas	13
3.	Energi Baru dan Jaringan Listrik Nasional	7
4.	Mitigasi Bencana	1
5.	Lain-lain (a.l. TPA, Iklan)	1
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>

Tabel 26. Persentase Capaian Kinerja IKK 5 Tahunan dan Renstra

No.	Tahun	Target Tahunan	Target Renstra (2015-2019)	Capaian IKK PKS	% Capaian Tahunan	% Akumulasi Pencapaian Renstra (2015-2019)
1.	2015	20	100	20	100	20
2.	2016	20	100	38	190	58
3.	2017	20	100	76	380	134
4.	2018	20	100	76	380	210
<b>Total</b>		<b>80</b>	<b>100</b>	<b>210</b>		



Dengan tercapainya jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 210 PKS (2015 s/d 2018), maka persentase target jangka menengah yang telah dicapai adalah 210 PKS atau 210%.



Gambar 21. Diagram Persentase Capaian Kinerja Tahunan dan Renstra IKK 5

#### *Cerita Sukses :*

*Kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati. Dalam Tahun 2015-2019 sudah terjalin kerja sama sebanyak 210 PKS yaitu kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada Kawasan Konservasi. Dimana kerja sama yang terbentuk menjadi kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang meliputi sarana komunikasi, transportasi terbatas, energi baru, jaringan listrik nasional, mitigasi bencana, TPA, dan lain-lain.*



**A.6 IKK 6 : Jumlah integrasi peta zonasi/blok/arahana pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa.**

Integrasi peta zonasi/blok/arahana pengelolaan KK ke dalam peta RBI 1:50.000 (OMP) merupakan mandat Presiden melalui Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 1 Februari 2016. Hal tersebut merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000.

Tabel 27. Target dan Realisasi IKK Kebijakan Satu Peta (KSP) Direktorat PIKA

No.	Tahun	Target	Realisasi	% Realisasi
1.	2018	551 KK	551 KK	100

Dari pelaksanaan kegiatan IKK 6 Direktorat PIKA, diperoleh hasil sesuai target dengan tersedianya peta zonasi/blok/arahana pengelolaan bagi 551 Kawasan Konservasi dengan rincian: peta zona KK yang telah diintegrasikan pada peta RBI skala 1:50.000 (format digital.shp) adalah 52 KK; peta blok KK yang telah diintegrasikan pada peta RBI skala 1:50.000 (format digital .shp) adalah 259 KK, dan peta arahan zona/blok Kawasan Konservasi yang telah diintegrasikan pada peta RBI skala 1:50.000 (format digital.shp) sejumlah 240 KK.

**BERITA ACARA KEGIATAN INTEGRASI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA**

Dalam rangka peninjauan Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk pemenuhan target Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, bersama ini kami menerangkan bahwa:

Kelompok IGT : IGT Potensi  
 Peta Tematik : Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000  
 ID IGT : 84  
 Penanggung Jawab Peta : Endarmiyati (081287571588)

Direktorat Pemetaan dan Informasi Konservasi Alam  
 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

telah selesai di-update dan diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Geospasial (SIG) skala 1:50.000 dengan cakupan wilayah di 30 Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka:

- Data spasial Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 hasil update dan integrasi akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bila diperlukan perubahan/update data spasial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berkoordinasi dengan Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dalam melakukan pemutakhiran terhadap perubahan/update tersebut.
- Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 hasil update dan integrasi siap dijadikan bahan untuk tahap Sinkronisasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas II di Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Jakarta, 04 Desember 2018

Koordinator Peta Tematik (Data Spasial Kebijakan Satu Peta) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
*Tuti Setiawan*

Mengetahui,  
 Badan Informasi Geospasial  
*Endarmiyati*

Koordinator Bidang Perencanaan  
*Wahyu Dicky*

Mengetahui,  
 Badan Informasi Geospasial  
*Yulius*

Catatan Klinik Fasilitas Integrasi terkait Peta Zonasi Kawasan Konservasi, 04 Desember 2018

- Telah dilakukan update Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 yaitu berupa penambahan 2 (dua) Zonasi Kawasan Konservasi yaitu:
  - Taman Nasional Kepulauan Togean di Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Taman Nasional Zamrud di Provinsi Riau
- Zonasi Kawasan Konservasi hanya terdapat di 30 Provinsi di Indonesia. Zonasi Kawasan Konservasi tidak terdapat di 4 provinsi berikut:
  - Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Provinsi Sulawesi Barat;
  - Provinsi Bangka Belitung; serta
  - Provinsi Kepulauan Riau;

Jakarta, 04 Desember 2018  
Mengetahui,

No	Instansi	Nama	Paraf
1	Koordinator Peta Tematik (Data Spasial Kebijakan Satu Peta) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tuti Setiawan	<i>Tuti Setiawan</i>
2	Wakil Data Peta Zonasi Kawasan Konservasi	Endarmiyati	<i>Endarmiyati</i>
3	Koordinator Bidang Perencanaan	Wahyu Dicky	<i>Wahyu Dicky</i>
4	Badan Informasi Geospasial	Yulius	<i>Yulius</i>

Gambar 22. Berita Acara Kegiatan Integrasi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu



### *Cerita Sukses :*

*Direktorat PIKA telah memenuhi IKK 6, yaitu Jumlah integrasi peta zonasi/blok/arahan pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa untuk 551 Kawasan Konservasi.*

*Penghargaan Bhumandala Award Kanaka/Emas untuk Geoportal terbaik tingkat Kementerian/Lembaga untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peta tematik KLHK yang telah terintegrasi dalam Kebijakan Satu Peta ialah berjumlah 9 (Sembilan) tema, diantara 9 (Sembilan) tema tersebut adalah Peta Zona Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Direktorat PIKA.*

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka pencapaian IKK Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam Tahun 2018, Direktorat PIKA telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan alokasi anggaran Rp.19.671.700.000,-. Secara umum realisasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2018 sebesar Rp.19.384.883.962 atau 98,54% dari total anggaran sebesar Rp.19.671.700.000,-. Sebagaimana disajikan pada tabel 15 dibawah ini.

Tabel 28. Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat PIKA Tahun 2018

No	Kegiatan/IKK	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</b>				
1	Layanan Perkantoran	900.000.000	842.248.897	93,58
<b>Kegiatan : Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam</b>				
2	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 30 Dokumen Zonasi dan/atau Blok	1.521.840.000	1.506.073.760	98,96
3	Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	1.196.130.000	1.188.703.480	99,38
4	Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang <i>valid dan reliable</i> pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	756.170.000	739.178.594	97,75
5	Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 unit	318.210.000	311.074.118	97,76



	KPHK			
6	Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	1.518.340.000	1.493.929.903	98,39
7	Jumlah integrasi peta zonasi/blok/arahan pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000	707.170.000	704.766.863	99,66
8	Forest Programme III (Direktorat PIKA)	11.000.000.000	10.887.044.588	98,97
9	Layanan Internal (Overhead)	1.753.840.000	1.711.863.759	97,61
<b>TOTAL</b>		<b>19.671.700.000</b>	<b>19.384.883.962</b>	<b>98,54</b>



---

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat PIKA tahun 2018 merupakan alat yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kinerja guna mengetahui keberhasilan/kegagalan organisasi Direktorat PIKA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Capaian kinerja Direktorat PIKA tersaji sebagai berikut :

1. Rata-rata capaian akumulasi IKK Renstra (2015-2019) sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 199,37%, realisasi anggaran Direktorat PIKA tahun 2018 sebesar Rp.19.384.883.962 atau 98.54% dari total anggaran sebesar Rp19.671.700.000.
2. Capaian Kinerja IKK 1 (Jumlah Dokumen Perencanaan Penataan Kawasan Konservasi yang Tersusun dan Mendapat Pengesahan Sebanyak 150 Dokumen Zonasi dan/atau Blok) tahun 2018 adalah 121 dokumen dari target 30 dokumen (403,33%), Capaian Kinerja s.d tahun 2017 Renstra 2015-2019 adalah 284 dokumen dari target 150 dokumen (189,33%), dan realisasi anggaran pada IKK 1 sebesar 98,96%.
3. Capaian Kinerja IKK 2 (Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi untuk 521 Unit KSA, KPA, dan TB di Seluruh Indonesia) tahun 2018 adalah 111 unit dari target 110 unit rekomendasi (100,91%), Capaian Kinerja s.d tahun 2018 Renstra 2015-2019 adalah 469 unit dari target 521 unit rekomendasi (90,02%), dan realisasi anggaran pada IKK 2 sebesar 99,38%. Tindak lanjut dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi adalah bimbingan teknis yang lebih intensif kepada UPT-UPT lingkup Ditjen KSDAE, dan alokasi yang cukup untuk kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi kepada UPT-UPT.
4. Capaian Kinerja IKK 3 (Jumlah Paket Data dan Informasi Kawasan Konservasi yang *Valid* dan *Reliable* pada 521 KSA, KPA dan TB di Seluruh Indonesia) tahun 2018 adalah 521 dari target 521 paket data (100%), Capaian Kinerja s.d tahun 2018 Renstra 2015-2019 adalah 521 dari target



- 521 paket data (100%), dan realisasi anggaran pada IKK 3 sebesar 97,75%.
5. Capaian Kinerja IKK 4 (Jumlah KPHK pada Kawasan Konservasi Non Taman Nasional yang Terbentuk Sebanyak 100 Unit KPHK) tahun 2018 adalah 101 usulan dari target Renstra 100 unit usulan KPHK (101%). Capaian Kinerja s.d tahun 2018 Renstra 2015-2019 adalah 101 dari target 100 unit usulan KPHK (101%) dan realisasi anggaran pada IKK 4 sebesar 97,76%.
  6. Capaian Kinerja IKK 5 (Jumlah Kerja Sama Pembangunan Strategis dan Kerja Sama Penguatan Fungsi pada Kawasan Konservasi Sebanyak 100 PKS) tahun 2018 adalah 76 PKS dari target 20 PKS (380%), Capaian Kinerja s.d tahun 2018 Renstra 2015-2019 adalah 210 PKS dari target 100 PKS (210%), dan realisasi anggaran pada IKK 5 sebesar 98,39%.
  7. Capaian kerja IKK 6 (Terintegrasinya peta zonasi/blok/arahan pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa) tahun 2018 adalah 551 KK (100%) dan realisasi anggaran pada IKK 6 sebesar 99,66%. Untuk IKK 6, yaitu terintegrasinya peta zonasi/blok/arahan pengelolaan kawasan konservasi ke dalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) berakhir di tahun 2018.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja kegiatan Direktorat PIKA pada tahun 2018 diharapkan dapat terus berlanjut pada tahun mendatang dengan terus melakukan pembinaan dan pembenahan pada masing-masing kegiatan yang mendukung langsung pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing unit kerja.



---

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





				<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan NSPK</li> <li>b. Bimbingan Teknis dan Supervisi</li> <li>c. Pembinaan dan Koordinasi</li> <li>d. Pembangunan Sistem IKA</li> <li>e. <i>Operasional dan Pemeliharaan Sistem IKA</i></li> </ul>						
				<p>4. Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan NSPK</li> <li>b. Bimbingan Teknis dan Supervisi</li> <li>c. Pembinaan dan Koordinasi</li> <li>d. Penyusunan Indikatif Rancang Bangun KPHK</li> <li>e. Penilaian Rancang Bangun KPHK</li> <li>f. Penetapan KPHK</li> <li>g. Monitoring dan Evaluasi</li> </ul>	Unit	20	100	100	100	100
				<p>5. Jumlah kerja sama pemba ngunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan NSPK</li> <li>b. <i>Bimbingan Teknis dan Supervisi</i></li> <li>c. <i>Pembinaan dan Koordinasi</i></li> <li>d. <i>Monitoring dan Evaluasi</i></li> </ul>	PKS	20	40	60	80	100
				<p>6. Jumlah integrasi peta zonasi/blok/arahan pengelolaan KK kedalam Peta RBI Skala 1:50.000 (OMP) sebagai dasar pengelolaan KK dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat/desa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan NSPK</li> <li>b. <i>Bimbingan Teknis dan Supervisi</i></li> <li>c. <i>Pembinaan dan Koordinasi</i></li> <li>d. Finalisasi OMP</li> </ul>	KK	-	-	551	551	-



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc.  
Jabatan : Direktur Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (PIKA)  
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir. Wiratno, M.Sc.  
Jabatan : Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem  
(KSDAE)

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal KSDAE

Ir. Wiratno, M.Sc.  
NIP. 19620328 198903 1 003

Pihak Pertama,  
Direktur PIKA

Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc.  
NIP. 195905201985012001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2015 – 2019	Target Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	Jumlah dokumen perencanaan penataan kawasan konservasi yang tersusun dan mendapat pengesahan sebanyak 150 dokumen Zonasi dan/atau Blok	30 Dokumen
		Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kesesuaian fungsi kawasan konservasi untuk 521 unit KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	110 Unit
		Jumlah paket data dan informasi kawasan konservasi yang valid dan reliable pada 521 KSA, KPA dan TB di seluruh Indonesia	521 Paket Data
		Jumlah KPHK pada kawasan konservasi non taman nasional yang terbentuk sebanyak 100 Unit KPHK	100 Unit KPHK
		Jumlah kerja sama pembangunan strategis dan kerja sama penguatan fungsi pada kawasan konservasi sebanyak 100 PKS	20 PKS
		Jumlah data spasial zonasi/blok pengelolaan kawasan konservasi yang terverifikasi dan terintegrasi ke dalam peta RBI skala 1 : 50.000(one map policy) sebagai dasar pengelolaan KK untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	551 kawasan konservasi

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (5419)  
Anggaran : Rp.900.000.000,-  
Kegiatan : Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam (5420)  
Anggaran : Rp.18.771.700.000,-  
Total Anggaran : Rp.19.671.700.000,-

Jakarta, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal KSDAE



Ir. Wiratno, M.Sc.  
NIP. 19620328 198903 1 003

Pihak Pertama,  
Direktur PIKA



Ir. Listya Kusumawardhani, M.Sc.  
NIP. 195905201985012001

**Data Capaian Penataan Zonasi/Blok Pengelolaan Kawasan Konservasi Tahun 2018**

NO	PROVINSI	FUNGSI	KAWASAN	NOMOR /TANGGAL SK PENGESAHAN	TAHUN PENGESAHAN
1	Jawa Tengah	TWA	TWA Gunung Selok	SK.47/IV-SET/2015 tanggal 20 Februari 2015 dan SK.412/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tanggal 22 November 2018	2018
2	Jawa Barat	TWA	TWA Kawah Gunung Tangkuban Perahu	Dirjen PHKA No. SK. 63/IV-KK/2008, tgl 18 Juni 2008 dan SK.76/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
3	Jawa Barat	TWA	TWA Kawah Kamojang	SK.255/KSDAE/SET/KSA.0/9/2016 tanggal 13 September 2016 dan SK 215/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 16 Mei 2018	2018
4	Kepulauan Riau	TWA	TWA Muka Kuning	SK.149/KSDAE/SET/KSDAE.0/5/2016 tanggal 20 Mei 2016 dan SK 2018	2018
5	Jawa Barat	CA	CA Gunung Papandayan	SK.23/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 17 Januari 2018	2018
6	Bengkulu	CA	CA Sungai Baheuwu	SK.24/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 17 Januari 2018	2018
7	Bengkulu	CA	CA Teluk Klowe	SK.24/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 17 Januari 2018	2018
8	Jawa Barat	CA	CA Leuweung Sancang	SK.25/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 17 Januari 2018	2018
9	Bengkulu	CA	CA Talang Ulu I	SK.26/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 17 Januari 2018	2018
10	Bengkulu	CA	CA Talang Ulu II	SK.26/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 17 Januari 2018	2018
11	Jawa Barat	TB	TB Masigit Kareumbi	SK.13/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
12	Sumatera Barat	SM	SM Malampah Alahan Panjang	SK.19/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
13	Jawa Barat	CA	CA Gunung Burangrang	SK.4/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
14	Bengkulu	TWA	TWA Bukit Kaba	SK.15/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
15	Bengkulu	CA	CA Kioyo I dan II	SK.8/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
16	Sumatera Barat	TWA	TWA Singgalang Tandikat	SK.9/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
17	Jawa Barat	TWA	TWA Gunung Guntur	SK.14/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
18	Jawa Barat	SM	SM Sindangkerta	SK.21/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
19	Bengkulu	CA	CA Taba Penajung I	SK.20/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
20	Bengkulu	CA	CA Taba Penajung II	SK.20/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018



21	Nusa Tenggara Timur	TB	TB Bena	SK.3/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
22	Jawa Barat	CA	CA Gunung Jagat	SK.16/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
23	Nusa Tenggara Timur	CA	CA Wae Wuul	SK.29/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 17 Januari 2018	2018
24	Bengkulu	CA	CA Pagar Gunung III	SK.6/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
25	Bengkulu	CA	CA Pagar Gunung IV	SK.6/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
26	Bengkulu	CA	CA Pagar Gunung V	SK.6/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
27	Maluku	TWA	TWA Pulau Marsegu	SK.32/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 22 Januari 2018	2018
28	Jawa Tengah	CA	CA Pantodomas	SK.42/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 25 Januari 2018	2018
29	Jawa Tengah	CA	CA Gebugan	SK.43/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 25 Januari 2018	2018
30	Sulawesi Tengah	TWA	TWA Bancea	SK.35/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 22 Januari 2018	2018
31	Bengkulu	TB	TB Gunung Nanua	SK.32/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 22 Januari 2018	2018
32	Jawa Barat	CA	CA Gunung Simpang	SK.36/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 22 Januari 2018	2018
33	Nusa Tenggara Timur	CA	CA Hutan Bakau Maubesi	SK.38/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 22 Januari 2018	2018
34	Maluku	SM	SM Pulau Kassa	SK.34/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 22 Januari 2018	2018
35	Kalimantan Selatan	CA	CA Sungai Lulan dan Sungai Bulan	SK.33/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 22 Januari 2018	2018
36	Jawa Tengah	CA	CA Wijaya Kususma	SK.49/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 29 Januari 2018	2018
37	Nusa Tenggara Timur	SM	SM Egon Ile Medo	SK.11/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
38	Aceh	SM	SM Rawa Singkil	SK.7/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 16 Januari 2018	2018
39	Bengkulu	CA	CA Tanjung Laksaha	SK.22/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 17 Januari 2018	2018
40	Jawa Tengah	CA	CA Nusakambangan Barat	SK.44/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 25 Januari 2018	2018
41	Jawa Tengah	CA	CA Karang Bolong	SK.70/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
42	Jawa Tengah	CA	CA Sub Vak 18/C/19B	SK.64/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
43	Sumatera Barat	THR	THR DR. Mohammad Hatta	SK.65/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
44	Jawa Barat	CA	CA Gunung Tangkuban Perahu	SK.58/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018



45	Maluku	SM	SM Tanimbar	SK.57/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
46	Jawa Tengah	CA	CA Sepakung	SK.62/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
47	Jawa Barat	TWA	TWA Gunung Tampomas	SK.63/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
48	Jawa Barat	TWA	TWA Gunung Pancar	SK.69/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
49	Riau	CA	CA Bukit Bungkok	SK.61/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
50	Sulawesi Tenggara	CA	CA Napabalano	SK.68/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
51	Jawa Tengah	CA	CA Nusakambangan Timur	SK.67/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
52	Sulawesi Tengah	TWA	TWA Pulau Tokobae	SK.84/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 20 Februari 2018	2018
53	Bengkulu	CA	CA Pagar Gunung I	SK.72/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
54	Bengkulu	CA	CA Pagar Gunung II	SK.72/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 5 Februari 2018	2018
55	Yogyakarta	CA	CA Imogiri	SK.85/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 20 Februari 2018	2018
56	Sumatera Selatan	SM	SM Isau isau	SK.86/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tanggal 20 Februari 2018	2018
57	Jawa Timur	CA	CA Curah Manis Sempolan I-VIII	SK.111/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
58	Banten	CA	CA Rawa Danau	SK.114/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
59	Kalimantan Barat	TWA	TWA Gunung Asuansang	SK.118/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
60	Sulawesi Tengah	CA	CA Gunung Dako	SK.120/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
61	Jawa Timur	CA	CA Janggangan Rogojampi	SK.115/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
62	Jawa Timur	CA	CA Watangan Puger	SK.113/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
63	Bangka Belitung	TWA	TWA Jering Menduyung	SK.103/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
64	Papua Barat	CA	CA Waigeo Barat	SK.106/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
65	Jawa Barat	CA	CA Dungus Iwul	SK.119/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
66	Nusa Tenggara Barat	TWA	TWA Pulau Moyo	SK.102/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
67	Jawa Barat	TWA	TWA Cimanggu	SK.107/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018



68	Papua Barat	CA	CA Waigeo Timur	SK.117/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
69	Kalimantan Selatan	CA	CA Teluk Pamukan	SK.116/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
70	Sulawesi Tengah	TB	TB Landusa Tomata	SK.108/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
71	Jawa Barat	CA	CA Bojonglarang Jayanti	SK.109/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
72	Kalimantan Barat	TWA	TWA Gunung Dungan/Gunung Batu	SK.105/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
73	Sulawesi Tengah	CA	CA Pamona	SK.104/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
74	Sulawesi Tengah	SM	SM Pulau Pasoso	SK.101/KSDAE/SET/KSA.0/3/2018 tanggal 2 Maret 2018	2018
75	Bali	TWA	TWA Sangeh (RTK.21)	SK.181/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tanggal 19 April 2018	2018
76	Jawa Timur	CA	CA Manggis Gadungan	SK.180/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tanggal 19 April 2018	2018
77	Bali	TWA	TWA Panelokan	SK.175/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tanggal 16 April 2018	2018
78	Bali	TWA	TWA Danau Buyan Danau Tamblingan (RTK.4)	SK.167/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tanggal 16 April 2018	2018
79	Jawa Barat	CA	CA Yan Lapa	SK.209/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 14 Mei 2018	2018
80	Bangka Belitung	THR	THR Bukit Mangkol	SK.206/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 14 Mei 2018	2018
81	Sulawesi Utara	TWA	TWA Gunung Ambang	SK.189/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tanggal 25 April 2018	2018
82	Jawa Timur	CA	CA Gunung Picis	SK.190/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tanggal 25 April 2018	2018
83	Jawa Timur	CA	CA Pulau Noko dan Nusa	SK.202/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 4 Mei 2018	2018
84	Jawa Timur	CA	CA Gunung Sigogor	SK.191/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tanggal 25 April 2018	2018
85	Jawa Timur	CA	CA Ceding	SK.192/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tanggal 25 April 2018	2018
86	Jawa Timur	CA	CA Besowo Gadungan	SK.193/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tanggal 25 April 2018	2018
87	Sulawesi Tenggara	SM	SM Lambusango	SK.168/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tanggal 16 April 2018	2018
88	Papua	TWA	TWA Nabire	SK.222/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 21 Mei 2018	2018
89	DI Yogyakarta	TWA	TWA Batu Gamping	SK.235/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 23 Mei 2018	2018
90	Jawa Barat	CA	CA Gunung Tilu	SK.224/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 21 Mei 2018	2018



91	Jawa Barat	CA	CA Tjigenteng Tjipanji	SK.233/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 23 Mei 2018	2018
92	Jawa Barat	CAL	CAL Leuweung Sancang	SK.240/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 25 Mei 2018	2018
93	Papua	CA	CA Pegunungan Yapen Tengah	SK.223/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 21 Mei 2018	2018
94	DI Yogyakarta	CA	CA Batu Gamping	SK.225/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 21 Mei 2018	2018
95	Jawa Barat	TWA	TWA Papandayan Gn Drajat	SK.214/KSDAE/SET/KSA.0/5/2018 tanggal 16 Mei 2018	2018
96	Papua	TWA	TWA Supiori	SK.265/KSDAE/SET/KSA.0/6/2018 tanggal 22 Juni 2018	2018
97	Sumatera Barat	TWA	TWA Gunung Marapi	SK.276/KSDAE/SET/KSA.0/6/2018 tanggal 28 Juni 2018	2018
98	Maluku	CA	CA Pulau Nustaram	SK.275/KSDAE/SET/KSA.0/6/2018 tanggal 28 Juni 2018	2018
99	Maluku	CA	CA Pulau Angwarmase	SK.273/KSDAE/SET/KSA.0/6/2018 tanggal 28 Juni 2018	2018
100	Maluku	CA	CA Pulau Nustowar	SK.282/KSDAE/SET/KSA.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018	2018
101	Jawa Timur	CA	CA Jagangan Rogojampi II	SK.311/KSDAE/SET/KSA.0/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018	2018
102	Bali	CA	CA Batukau	SK.314/KSDAE/SET/KSA.0/8/2018 tanggal 16 Agustus 2018	2018
103	Sulawesi Utara	THR	THR Gunung Tumpa H.V. Worang	SK.343/KSDAE/SET/KSA.0/9/2018 tanggal 6 September 2018	2018
104	Kalimantan Timur	THR	THR Lati Petangis	SK.345/KSDAE/SET/KSA.0/9/2018 tanggal 6 September 2018	2018
105	Sumatera Barat	SM	SM Tarusan Arau Hilir	SK.384/KSDAE/SET/KSA.0/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018	2018
106	Sumatera Barat	SM	SM Barisan	SK.383/KSDAE/SET/KSA.0/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018	2018
107	Sumatera Barat	CA	CA Baringin Sati	SK.389/KSDAE/SET/KSA.0/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018	2018
108	Jambi	THR	THR Sultan Thaha Syaifuddin	SK.385/KSDAE/SET/KSA.0/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018	2018
109	Bangka Belitung	THR	THR Gunung Menumbing	SK.409/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tanggal 22 November 2018	2018
110	Riau	SM	SM Tasik Besar Serkap	SK.418/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tanggal 29 November 2018	2018
111	Riau	SM	SM Tasik Serkap	SK.417/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tanggal 29 November 2018	2018
112	Riau	CA	CA Pulau Berkey	SK.420/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tanggal 30 November 2018	2018
113	Riau	SM	SM Tasik Belat	SK.438/KSDAE/SET/KSA.0/12/2018 tanggal 20 Desember 2018	2018
114	Sumatera Barat	TWA	TWA Sago Malintang	SK.448/KSDAE/SET/KSA.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018	2018
115	Riau	TN	TN Zamrud	SK.66/KSDAE/SET/KSA.0/2/2018 tgl 5 Februari 2018	2018



116	Sulawesi Tengah	TN	TN Kepulauan Togean	SK.173/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tgl 16 April 2018	2018
117	Jawa Barat	TN	TN Gunung Ciremai	Dirjen PHKA No. SK.87/IV-Set/2015 tanggal 30 Maret 2015 dan SK.176/KSDAE/SET/KSA.0/4/2018 tanggal 16 April 2018	2018
118	Bali	TN	TN Bali Barat	Dirjen PHKA No.SK. 143/IV-KK/2010 tgl 20 September 2010 dan SK.413/KSDAE/SET/KSA.0/11/2018 tanggal 22 November 2018	2018
119	Kalimantan Barat	TN	TN Betung Kerihun	Dirjen PHKA No. SK.121/IV-KK/ 2009 tgl 12 Des 2009 Revisi SK.342/KSDAE/SET/KSA.0/9/2018 tanggal 6 September 2018	2018
120	Maluku Utara	TN	TN Aketajawe Lolobata	Blok Aketajawe : Dirjen PHKA No. SK.56/IV-SET/2014 tgl 17 Maret 2014; Blok Lolobata : Dirjen PHKA No. SK.57/IV-SET/2014 tgl 17 Maret 2014 SK.48/KSDAE/SET/KSA.0/1/2018 tanggal 29 Januari 2018	2018
121	Papua Barat	TN	TN Lorentz	Dirjen PHKA No. SK.92/IV-SET/ 2013 tgl 27 Maret 2013 dan 2018	2018

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KAJIAN AWAL EVALUASI KESESUAIAN FUNGSI NASIONAL DENGAN DESK STUDY TAHUN 2018**

No	Nama Kawasan Konservasi	Nilai (%)	Status Kesesuaian Fungsi	Rekomendasi
<b>I</b>	<b>PROVINSI JAWA BARAT</b>			
1.	Cagar Alam Kawah Kamojang	69,05	Terganggu	- Pemulihan Fungsi kawasan dan Ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi - memperkuat tindakan pengawasan untuk menghindari kejadian perambahan dan <i>illegal logging</i> - sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi dan meniadakan tindakan perambahan areal pada kawasan.
2.	Cagar Alam Cadas Malang	80,95	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal
3.	Cagar Alam Cibanteng	66,67	Terganggu	- Pemulihan Fungsi kawasan dan Ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi - memperkuat tindakan pengawasan untuk menghindari kejadian perambahan dan <i>illegal logging</i> - sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi dan meniadakan tindakan perambahan areal pada kawasan.
4.	Cagar Alam Cigenteng Cipanji	80,95	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal
5.	Cagar Alam Dungus Iwul	90,48	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal
6.	Cagar Alam Gunung Burangrang	83,33	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal
7.	Cagar Alam Gunung Jagat	83,33	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal
8.	Cagar Alam Gunung Simpang	90,48	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal
9.	Cagar Alam Tangkuban Perahu	90,48	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal
10.	Cagar Alam Gunung Tilu	92,86	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal
11.	Cagar Alam Junghuhn	83,33	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal



12.	Cagar Alam Malabar	76,19	Terganggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan Fungsi kawasan dan Ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi</li> <li>- memperkuat tindakan pengawasan untuk menghindari kejadian perambahan dan <i>illegal logging</i></li> <li>- sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi dan meniadakan tindakan perambahan areal pada kawasan.</li> </ul>
13.	Cagar Alam Nusa Gede Panjalu	88,10	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> </ul>
14.	Cagar Alam Sukawayana	80,95	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> </ul>
15.	Cagar Alam Takokak	90,84	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> </ul>
16.	Cagar Alam Talaga Bodas	78,57	Terganggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan Fungsi kawasan dan Ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi</li> <li>- memperkuat tindakan pengawasan untuk menghindari kejadian perambahan dan <i>illegal logging</i></li> <li>- sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi dan meniadakan tindakan perambahan areal pada kawasan.</li> </ul>
17.	Cagar Alam Tangkuban Prahupelabuhan Ratu	80,95	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> </ul>
18.	Cagar Alam Telaga Patenggang	92,86	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> </ul>
19.	Cagar Alam Telaga Warna	92,86	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> </ul>
20.	Cagar Alam Yanlapa	92,86	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> </ul>
<b>II PROVINSI KALIMANTAN UTARA</b>				
1.	Taman Nasional Kayan Mentarang	95,24	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan dan terus menjaga kehati yang telah baik, dengan tetap mewaspadai potensi gangguan yang dapat muncul</li> </ul>
<b>III PROVINSI KALIMANTAN TIMUR</b>				
1.	Cagar Alam Muara Kaman Sedulang	86,10	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan dan terus menjaga kehati yang telah baik, dengan tetap mewaspadai meningkatnya gangguan perambahan</li> </ul>
2.	Cagar Alam Padang Luwai	80,95	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempertahankan dan terus menjaga kehati yang telah baik, dengan tetap mewaspadai potensi gangguan yang dapat muncul</li> </ul>
3.	Cagar Alam Teluk Apar	69,05	Terganggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu tindakan pemulihan dengan segera menuntaskan tata batas</li> <li>- memperbaiki tutupan lahan,</li> <li>- menyelesaikan kasus tumpang tindih kawasan</li> </ul>



				- meningkatkan upaya pengendalian perambahan dan pencurian
4.	Cagar Alam Teluk Adang	69,05	Terganggu	- Diperlukan tindakan pemulihan dengan memperbaiki tutupan lahan - menyelesaikan tumpah tindih pemanfaatan kawasan - memperkuat upaya pengendalian perburuan, juga mempertimbangkan kepatian area yang telah terhuni warga
5.	Taman Nasional Kutai	83,33	Utuh	- Mempertahankan dan terus menjaga kehati yang telah baik, dengan tetap mewaspadaai potensi gangguan yang dapat muncul
6.	Tahura Bukit Soeharto	76,54	Terganggu	- Melakukan pemulihan tutupan lahan - pemulihan kehati satwa endemik - meningkatkan upaya pengendalian kebakaran, perburuan dan ilegal logging.
7.	Suaka Margasatwa Pulau Semama	84,95	Utuh	- Mempertahankan dan terus menjaga kehati yang telah baik, dengan tetap mewaspadaai potensi gangguan yang dapat muncul
8.	Tahura Lati Petangis	74,67	Terganggu	- Diperlukan pemulihan tutupan lahan - meningkatkan upaya pengendalian gangguan seperti pembalakan liar dan perburuan
<b>IV PROVINSI KALIMANTAN BARAT</b>				
1.	Cagar Alam Gunung Raya Pasi	83,33	Utuh	- Mempertahankan dan terus menjaga kehati yang telah baik, dengan tetap mewaspadaai potensi gangguan yang dapat muncul
2.	Cagar Alam Lo Fat Fun Fie	69,05	Terganggu	- Melakukan pemulihan pada area yang dirambah, dan penertiban pertambangan ilegal
3.	Cagar Alam Mandor	80,95	Utuh	- Walaupun secara umum masih utuh, namun perlu ada upaya mempertahankan tutupan lahan yang ada dengan meningkatkan upaya pengendalian gangguan yang sudah mulai muncul, seperti pertambangan, penebangan dan perambahan
4.	Cagar Alam Muara Kendawangan	76,19	Terganggu	- Diperlukan pemulihan penutupan lahan hutan - mewaspadaai beberapa gangguan seperti perambahan, penebangan, juga kebakaran dengan upaya pengendalian yang lebih intensif
5.	Cagar Alam Gunung Nyiut-Gunung Penrissen	78,57	Terganggu	- Diperlukan pemulihan untuk meningkatkan penutupan lahan hutan - menyelesaikan tata batas - mewaspadaai melakukan upaya pengendalian berbagai gangguan seperti



				pemukiman, permabahan, juga kebakaran
6.	Taman Nasional Gunung Palung	87,50	Utuh	- Mempertahankan penutupan lahan yang berupa hutan dengan ekosistem dan keanekaragaman hayatinya, dan dapat lebih meningkatkan peran TN, walau tetap mewaspadaai potensi gangguan
7.	Taman Nasional Danau Sentarum	85,42	Utuh	- Mempertahankan penutupan lahan yang berupa hutan dengan ekosistem dan keanekaragaman hayatinya - meningkatkan pendekatan sosail dan ekonomi untuk menekan adanya gangguan
8.	Taman Nasional Betung Kerihun	87,50	Utuh	- Mempertahankan penutupan lahan yang berupa hutan dengan ekosistem dan keanekaragaman hayatinya, dan dapat lebih meningkatkan peran TN, walau tetap mewaspadaai potensi gangguan
9.	Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya	85,42	Utuh	- Mempertahankan penutupan lahan yang berupa hutan - meningkatkan upaya pengendalian berbagai gangguan seperti kebakaran, <i>illegal logging</i> , konflik satwa dan perburuan
<b>V</b>	<b>PROVINSI KALIMANTAN SELATAN</b>			
1.	Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku	92,31	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
2.	Cagar Alam Sungai Bulan-Sungai Lulan	90,48	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
3.	KSA/KPA P. Kerayaan, P. Kerasian dan P. Kerumput	45,24	<b>Terdegradasi</b>	- KSA dan KPA merupakan kawasan konservasi yang penunjukannya relatif masih baru mengikuti RTRWP. Masih belum banyak data lapangan yang bisa digalidan justifikasi lebih banyak menggunakan interpretasi citra satelit. Melihat kerusakan dan perubahan yang terjadi dari tutupan lahan yang sangat besar maka sangat perlu dilakukan evaluasi lapangan guna menilai kesesuaian fungsi.
4.	KSA/KPA Tanjung Pengharapan-S. Embung	38,10	<b>Terdegradasi</b>	- KSA dan KPA merupakan kawasan konservasi yang penunjukannya relatif masih baru mengikuti RTRWP. Masih belum banyak data lapangan yang bisa digalidan justifikasi lebih banyak menggunakan interpretasi citra satelit. Melihat kerusakan dan perubahan yang terjadi dari tutupan lahan yang sangat besar maka sangat perlu dilakukan evaluasi lapangan guna menilai kesesuaian fungsi.



5.	Suaka Margasatwa Pelaihari Tanah Laut	93,55	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
6.	Tahura Sultan Adam	86,67	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
7.	KSA/KPA Tanjung Asam-Asam	66,67	Terganggu	- Pemulihan Fungsi kawasan dan Ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi, memperkuat tindakan pengawasan, sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan areal pada kawasan.
8.	Cagar Alam Gunung Kentawan	80,95	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
9.	Cagar Alam Teluk Pamukan	80,95	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
10.	Suaka Margasatwa Pulau Kaget	77,01	Terganggu	- Pemulihan Fungsi kawasan dan Ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi, memperkuat tindakan pengawasan, sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan areal pada kawasan.
11.	Suaka Margasatwa Kuala Lupak	75,00	Terganggu	- Pemulihan Fungsi kawasan dan Ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi, memperkuat tindakan pengawasan, sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan areal pada kawasan.
<b>VI</b>	<b>PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b>			
1.	Cagar Alam Pararawen I dan II	92,24	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
2.	Suaka Margasatwa Lamandau	86,06	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
3.	Taman Nasional Sebagau	90,48	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
4.	Taman Nasional Tanjung Puting	93,33	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
5.	Cagar Alam Tangkiling	61,90	Terganggu	- Pemulihan Fungsi kawasan dan Ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi, memperkuat tindakan pengawasan, sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan areal pada kawasan.
6.	Cagar Alam Bukit Sapat Hawung	69,05	Terganggu	- Pemulihan Fungsi kawasan dan Ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi, memperkuat tindakan pengawasan, sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan areal pada kawasan.
7.	Taman Hutan Raya Lapak Jaru	85,51	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem



8.	KSA/KPA Tanjung Malatayur	42,86	<b>Terdegradasi</b>	- KSA dan KPA merupakan kawasan konservasi yang penunjukannya relatif masih baru mengikuti RTRWP. Masih belum banyak data lapangan yang bisa digalidan justifikasi lebih banyak menggunakan interpretasi citra satelit. Melihat kerusakan dan perubahan yang terjadi dari tutupan lahan yang sangat besar maka sangat perlu dilakukan evaluasi lapangan guna menilai kesesuaian fungsi.
9.	KSA/KPA Marang	48,72	<b>Terdegradasi</b>	- KSA dan KPA merupakan kawasan konservasi yang penunjukannya relatif masih baru mengikuti RTRWP. Masih belum banyak data lapangan yang bisa digalidan justifikasi lebih banyak menggunakan interpretasi citra satelit. Melihat kerusakan dan perubahan yang terjadi dari tutupan lahan yang sangat besar maka sangat perlu dilakukan evaluasi lapangan guna menilai kesesuaian fungsi.
10.	KSA/KPA Bukit Rawi (Eks PLG II)	42,86	<b>Terdegradasi</b>	- KSA dan KPA merupakan kawasan konservasi yang penunjukannya relatif masih baru mengikuti RTRWP. Masih belum banyak data lapangan yang bisa digalidan justifikasi lebih banyak menggunakan interpretasi citra satelit. Melihat kerusakan dan perubahan yang terjadi dari tutupan lahan yang sangat besar maka sangat perlu dilakukan evaluasi lapangan guna menilai kesesuaian fungsi.
11.	KSA/KPA Sungai Kapuas	42,86	<b>Terdegradasi</b>	- KSA dan KPA merupakan kawasan konservasi yang penunjukannya relatif masih baru mengikuti RTRWP. Masih belum banyak data lapangan yang bisa digalidan justifikasi lebih banyak menggunakan interpretasi citra satelit. Melihat kerusakan dan perubahan yang terjadi dari tutupan lahan yang sangat besar maka sangat perlu dilakukan evaluasi lapangan guna menilai kesesuaian fungsi.
12.	KSA/KPA Sungai Barito	42,86	<b>Terdegradasi</b>	- KSA dan KPA merupakan kawasan konservasi yang penunjukannya relatif masih baru mengikuti RTRWP. Masih belum banyak data lapangan yang bisa digalidan justifikasi lebih banyak menggunakan interpretasi citra satelit. Melihat kerusakan dan perubahan yang terjadi dari tutupan lahan yang sangat besar maka sangat perlu dilakukan evaluasi lapangan guna menilai kesesuaian fungsi.
<b>VII PROVINSI SULAWESI SELATAN</b>				



1.	Cagar Alam Faruhumpenai	90,48	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
2.	Cagar Alam Kalaena	95,24	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
3.	Cagar Alam Ponda-ponda	88,70	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
4.	Taman Buru Komara	75,36	Terganggu	- Rehabilitasi kawasan dengan jenis asli setempat - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
5.	Suaka Margasatwa Komara	71,11	Terganggu	- Rehabilitasi kawasan dengan jenis asli setempat - Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
6.	Taman Hutan Raya Abdul Latief/Sinjai	82,61	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
7.	Taman Hutan Raya Bontobahari	52,17	<b>Terdegradasi</b>	- Melaksanakan tata batas temu gelang dan penetapan kawasan - Rehabilitasi kawasan - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan - Melaksanakan evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan
8.	Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung	81,25	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
9.	Taman Nasional Taka Bonerate	75,76	Terganggu	- Rehabilitasi kawasan dengan jenis asli setempat - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
<b>VIII PROVINSI SULAWESI BARAT</b>				
1.	Suaka Alam Mesawa (Calon Tahura)	75,36	Terganggu	- Melaksanakan penetapan kawasan - Rehabilitasi kawasan dengan jenis asli setempat - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
<b>IX PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>				
1.	Suaka Margasatwa Bakiriang	75,27	Terganggu	- Melaksanakan tata batas temu gelang - Rehabilitasi kawasan dengan jenis asli setempat - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
2.	Cagar Alam Morowali	88,10	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
3.	Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah	56,52	<b>Terdegradasi</b>	- Rehabilitasi kawasan - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan



				- Melaksanakan evaluasi kesesuaian fungsi di tingkat lapangan
4.	Suaka Margasatwa Lombuyan	81,72	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
5.	Suaka Margasatwa Pati-pati	76,34	Terganggu	- Rehabilitasi kawasan dengan jenis asli setempat - Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
6.	Suaka Margasatwa Tanjung Santigi	72,04	Terganggu	- Rehabilitasi kawasan dengan jenis asli setempat - Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
7.	Cagar Alam Gunung Sojol	85,71	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
8.	Cagar Alam Gunung Tinombala	78,57	Utuh	- Rehabilitasi kawasan dengan jenis asli setempat - Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
9.	Cagar Alam Gunung Dako	78,57	Terganggu	- Rehabilitasi kawasan dengan jenis asli setempat - Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
10.	Suaka Margasatwa Pinjan/Tanjung Matop	83,87	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
11.	Taman Nasional Kepulauan Togean	83,33	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
12.	Taman Buru Landusa Tomata	86,67	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
13.	Cagar Alam Tanjung Api	78,57	Utuh	- Melaksanakan tata batas temu gelang - Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
14.	Cagar Alam Pangi Binangga	83,33	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem
15.	Suaka Margasatwa Pulau Dolangan	86,02	Utuh	- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem



16.	Cagar Alam Pamona	71,43	Terganggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tata batas temu gelang dan penetapan kawasan</li> <li>- Rehabilitasi kawasan dengan jenis asli setempat</li> <li>- Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan</li> </ul>
17.	Taman Nasional Lore Lindu	85,42	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem</li> </ul>
<b>X PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>				
1.	Cagar Alam Kakenaue	82,14	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> <li>- Pemulihan fungsi kawasan dan ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi</li> </ul>
2.	Cagar Alam Lamedae	85,71	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistemn kawasan</li> </ul>
3.	Cagar Alam Napabalano	80,95	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi kawasan dengan jenis asli setempat</li> <li>- Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> <li>- Pertahankan kekhasan ekosistem kawasan</li> </ul>
4.	Suaka Margasatwa Buton Utara	77,08	Terganggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> <li>- Pertahankan kekhasan ekosistem kawasan</li> <li>- Lakukan monitiring /penelitian tentang kecukupan luas jelajah satwa (terutama satwa endemik)</li> <li>- Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> </ul>
5.	Suaka Margasatwa Lambusango	77,08	Terganggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> <li>- Lakukan monitiring /penelitian tentang kecukupan luas jelajah satwa (terutama satwa endemik)</li> <li>- Pemulihan fungsi kawasan dan ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi</li> <li>- Sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan areal</li> </ul>



				<p>pada kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> </ul>
6.	Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo	87,50	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakukan monitiring /penelitian tentang kecukupan luas jelajah satwa (terutama satwa endemik)</li> <li>- Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> </ul>
7.	Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo	79,17	Terganggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> <li>- Lakukan monitiring /penelitian tentang kecukupan luas jelajah satwa (terutama satwa endemik)</li> <li>- Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> </ul>
8.	Suaka Margasatwa Tanjung Peropa	81,25	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lakukan monitiring /penelitian tentang kecukupan luas jelajah satwa (terutama satwa endemik)</li> <li>- Pemulihan fungsi kawasan dan ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi</li> <li>- Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> </ul>
9.	Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai	81,25	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan fungsi kawasan dan ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi</li> <li>- Lakukan monitiring /penelitian tentang kecukupan luas jelajah satwa (terutama satwa endemik)</li> <li>- Sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan areal pada kawasan</li> <li>- Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> </ul>
10.	Taman Hutan Raya Murhum/Nipa-Nipa	83,33	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem</li> </ul>



<b>XI</b>	<b>PROVINSI GORONTALO</b>			-
1.	Suaka Margasatwa Nantu	79,17	Terganggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> <li>- Pemulihan fungsi kawasan dan ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi</li> <li>- Lakukan monitiring /penelitian tentang kecukupan luas jelajah satwa (terutama satwa endemik)</li> <li>- Sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan areal pada kawasan</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> </ul>
2.	Cagar Alam Panua	80,95	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> <li>- Sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan, <i>illegal logging</i> dan perburuan satwa liar pada kawasan</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> <li>- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem</li> </ul>
3.	Cagar Alam Tanjung Panjang	83,33	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> <li>- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> </ul>
4.	Cagar Alam Tangale	85,71	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> <li>- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> </ul>
5.	Cagar Alam Mas Popoya Raja	88,09	Utuh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> <li>- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem</li> <li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan</li> </ul>
<b>XII</b>	<b>PROVINSI SULAWESI UTARA</b>			
1.	Taman Nasional Bogani Nani Wartabone	79,17	Terganggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li> <li>- Lakukan monitiring /penelitian tentang kecukupan luas jelajah satwa (terutama satwa endemik)</li> <li>- Sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan, <i>illegal logging</i> dan perburuan satwa liar pada kawasan</li> <li>- Pemulihan fungsi kawasan dan ekosistem pada areal yang telah</li> </ul>



				berubah fungsi - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan
2.	Cagar Alam Gunung Tangkoko, Gunung Dua Saudara	80,95	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal - Sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan, <i>illegal logging</i> dan perburuan satwa liar pada kawasan - Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan - Pemulihan fungsi kawasan dan ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi
3.	Taman Nasional Bunaken	86,27	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal - Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan
4.	Taman Hutan Raya HV. Worang	91,67	Utuh	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal - Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem - Sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan areal pada kawasan - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
5.	Suaka Margasatwa Gunung Manembo Nembo	75,00	Terganggu	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal - Pemulihan fungsi kawasan dan ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi - Lakukan monitiring /penelitian tentang kecukupan luas jelajah satwa (terutama satwa endemik) - Sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan, <i>illegal logging</i> dan perburuan satwa liar pada kawasan - Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan
6.	Cagar Alam Gunung Lokon	78,57	Terganggu	- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal - Pemulihan fungsi kawasan dan ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi - Sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan dan perburuan satwa liar pada kawasan



				<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan</li><li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan</li></ul>
7.	Suaka Margasatwa Karakelang	81,25	Utuh	<ul style="list-style-type: none"><li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li><li>- Pemulihan dan pemeliharaan ekosistem</li><li>- Lakukan monitoring /penelitian tentang kecukupan luas jelajah satwa (terutama satwa endemik)</li><li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan</li></ul>
8.	Cagar Alam Gunung Ambang	78,57	Terganggu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Segera tata batas temu gelang sebagai pengamanan areal</li><li>- Pemulihan fungsi kawasan dan ekosistem pada areal yang telah berubah fungsi</li><li>- Sosialisasi ke masyarakat untuk mengurangi tindakan perambahan, <i>illegal logging</i> dan perburuan satwa liar pada kawasan</li><li>- Meningkatkan SDM, peralatan dan tindakan pencegahan kebakaran kawasan</li><li>- Memperkuat tindakan pengamanan dan pengawasan kawasan</li></ul>



**JUMLAH PAKET DATA DAN INFORMASI KAWASAN KONSERVASI  
YANG VALID DAN RELIABLE PADA 521 KSA, KPA DAN TB DI SELURUH  
INDONESIA TAHUN 2018**

<b>BULAN</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>Januari</b>	Data sosekbud: Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di Kawasan Konservasi (13 TN di Jawa-Bali)
<b>Februari</b>	Data sosekbud: Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di Kawasan Konservasi (13 TN di Sumatera)
<b>Maret</b>	Data sosekbud: Ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di Kawasan Konservasi (9 TN di Kalimantan dan Sulawesi)
<b>April</b>	Data sosekbud: ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di 60 Kawasan Konservasi (19 TN dan 41 CA )
<b>Mei</b>	Data sosekbud: ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di Kawasan Konservasi (79 SM)
<b>Juni</b>	Data sosekbud: ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di Kawasan Konservasi ( 173 CA)
<b>Juli</b>	Data sosekbud: ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di Kawasan Konservasi (26 TWA)
<b>Agustus</b>	Data sosekbud: ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di Kawasan Konservasi (53 TWA)
<b>September</b>	Data sosekbud: ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di Kawasan Konservasi ( 52 TWA)
<b>Oktober</b>	Data sosekbud: ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di Kawasan Konservasi (25 Tahura)
<b>November</b>	Data sosekbud: ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di Kawasan Konservasi ( 9 Tahura dan 11 TB)
<b>Desember</b>	Data sosekbud: ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam di 60 Kawasan Konservasi (29 KSA/KPA)



## Berita Acara Integrasi Percepatan Pelaksanaan KSP Tahun 2018



### BERITA ACARA KEGIATAN INTEGRASI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA



Dalam rangka perwujudan Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk pemenuhan target Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, bersama ini kami menerangkan bahwa:

Kelompok IGT : IGT Potensi  
Peta Tematik : **Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000**  
ID IGT : 84  
Penanggung Jawab Peta : Endarmiyati (081287571588)

Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

telah selesai di-*update* dan diintegrasikan untuk **52 Zonasi Kawasan Konservasi** (dengan penambahan 2 Zonasi Kawasan Konservasi) terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala 1:50.000 dengan cakupan wilayah di 30 Provinsi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka:

1. Data spasial Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 hasil *update* dan integrasi akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Bila diperlukan perubahan/*update* data spasial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta dalam melakukan pemutakhiran terhadap perubahan/*update* tersebut;
3. Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 hasil *update* dan integrasi siap dijadikan bahan untuk tahap Sinkronisasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas II di Sekretariat Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta.

Koordinator Peta Tematik (Data Spasial  
Kebijakan Satu Peta) Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

  
(Tuti Setiawati)

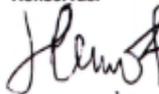
Koordinator Bidang  
Perekonomian

  
(Wahyu Dicky)

Mengetahui,

Jakarta, 04 Desember 2018

Walidata  
Peta Zonasi Kawasan  
Konservasi

  
(Endarmiyati)

Badan Informasi Geospasial

  
(Jamp Mktg)



**Catatan Klinik Fasilitasi Integrasi terkait Peta Zonasi Kawasan Konservasi, 04 Desember 2018**

1. Telah dilakukan *update* Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 yaitu berupa penambahan 2 (dua) Zonasi Kawasan Konservasi yaitu :
  - a. Taman Nasional Kepulauan Togean di Provinsi Sulawesi Tengah;
  - b. Taman Nasional Zamrud di Provinsi Riau
2. Zonasi Kawasan Konservasi hanya terdapat di 30 Provinsi di Indonesia. Zonasi Kawasan Konservasi tidak terdapat di 4 provinsi berikut :
  - a. Provinsi Kalimantan Selatan;
  - b. Provinsi Sulawesi Barat;
  - c. Provinsi Bangka Belitung; serta
  - d. Provinsi Kepulauan Riau;

Jakarta, 04 Desember 2018

Mengetahui,

No	Instansi	Nama	Paraf
1	Koordinator Peta Tematik (Data Spasial Kebijakan Satu Peta) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tuti Setiawati	1.
2	Walidata Peta Zonasi Kawasan Konservasi	Endarimiyati	2.
3	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	wahyu diddy	3.
4	Badan Informasi Geospasial	Juf mba	

**DAFTAR REKAPITULASI USULAN PENETAPAN KPHK NON TAMAN NASIONAL  
TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA UPT</b>	<b>NAMA KPHK</b>	
1	Balai Besar KSDA Riau	1	Giam Siak Kecil - Bukit Batu (71.500 ha)
		2	Danau Pulau Besar / Danau Bawah (28.237,95 ha)
		3	Bukit Rimbang Bukit Baling (136.000 ha)
2	Balai KSDA Bengkulu	1	Enggano (8.736,57 ha)
		2	Bukit Kaba (13.497,47 Ha)
3	Balai KSDA Jambi	1	Durian Luncuk
		2	Hutan Bakau Pantai Timur
4	Balai KSDA Sumatera Selatan	1	Padang Sugihan
5	Balai KSDA Lampung	1	Kepulauan Krakatau
6	Balai KSDA DKI Jakarta	1	Jakarta (232,84 ha)
7	Balai Besar KSDA Jawa Barat	1	Simpang Tilu
		2	Burangrang Tangkuban Parahu
8	Balai KSDA Jawa Tengah	1	Cilacap
		2	Pati Barat
9	Balai Besar KSDA Jawa Timur	1	Kawah Ijen
		2	Dataran Tinggi Yang
10	Balai KSDA Bali	1	Bedugul – Sangeh (3.635,09 Ha)
		2	Kintamani (2.649,27 ha)
11	Balai KSDA Nusa Tenggara Barat	1	Moyo
		2	Gunung Tunak
12	Balai KSDA Kalimantan Barat	1	Muara Kendawangan
		2	Gunung Nyiut
13	Balai KSDA Kalimantan Tengah	1	Pararawen (5.855 ha)
		2	Sei Lamandau (76.110 ha)
14	Balai KSDA Kalimantan Selatan	1	Kuala Lupak
15	Balai KSDA Kalimantan Timur	1	Muara Kaman Sedulang
16	Balai KSDA Sulawesi Tengah	1	Gunung Dako Pinjan Tanjung Matop Dolangon



		2	Pangi Binangga Wera Gunung Sojo Pasoso
		3	Gunung Tinombala Tanjung Santigi
		4.	Pamona Bancea Tomata
		5.	Morowali Tanjung Api Tokobae
		6.	Bakiriang Lombuyan Pati-Pati
17	Balai KSDA Sulawesi Tenggara	1	Lambusango
		2	Peropa
18	Balai KSDA Maluku	1	Gunung Sahuwai
		2	Taliabu
19	Balai Besar KSDA Papua Barat	1	Waigeo
		2	Gunung Meja Sidei Kaironi
		3	Arfak
		4	Beriat
		5	Sorong Klamono
20	Balai Besar KSDA Papua	1	Cycloops Youtefa

**DAFTAR REKAPITULASI USULAN PENETAPAN KPHK NON TAMAN NASIONAL  
TAHUN 2016**

NO	NAMA UPT	NAMA KPHK	
1	Balai KSDA Aceh	1	Pulau Weh
		2	Lingga Isaq
		3	KPHK Jantho
		4	KPHK Pulau Banyak
2	Balai Besar KSDA Sumatera Utara	1	Barumon
		2	Sicike cike
		3	Karang Gading Langkat Timur Laut
		4	Sibolangit
		5	Sipirok
		6	Dolok Tinggi Raja
		7	Dolok Surungan
		8	TB Pulau Pini
		9	Holiday Resort
		10	Sijaba Hutaginjang
2	Balai KSDA Sumatera Barat	3	50 Kota



		4	Lembah Anai
3	BKSDA Bengkulu	5	KPHK Seblat
		6	KPHK Pantai Panjang
4	BKSDA Sumatera Selatan	1	KPHK Isau-Isau
		2	KPHK Gumai Pasemah
		3	KPHK Gunung Raya
5	BKSDA Sulawesi Utara	7	Tangkoko
6	BKSDA Yogyakarta	8	Yogyakarta
7	BKSDA Jawa Tengah	1.	KPHK Pewoba
		2.	KPHK Sablokare
8	BBKSDA Jawa Timur	1	Baung - Abang - Tretes
		2	Picis-Sigogor-Nglirip-Manggis-Besowo
		3	Bawean-Noko Nusa
		4	Nusa Barong-Watangan-Curah Manis
		5	Pulau Sempu
		6	Pulau Saobi
9	BKSDA Nusa Tenggara Barat	9	Semongkat
		10	Taliwang
		11	Suranadi
		12	Sangiang
		13	Pelangan
10	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	1	Harlu
		2	Gunung Mutis
		3	Tuti Adegae
		4	Ndeta Kilikima
		5	Wae Wuul
		6	Teluk Maumere
		7	Riung
		8	Kateri
		9	Camplong
		10	Ale Aisio
		11	Watu Ata
		12	Teluk Kupang
11	BKSDA Kalimantan Barat	1.	Kepulauan Karimata



		2	Kelam Komplek
		3	Mandor - Pasi
12	BKSDA Kalimantan Tengah	1	KPHK Tanjung Keluang
13	Balai KSDA Kalimantan Selatan	1.	KPHK Tanah Laut - Gunung
14	BKSDA Sulawesi Tenggara	1	Mangolo
		2	Buton Utara
15	BBKSDA Sulawesi Selatan	1	Mario
		2	Ko'mara
16	BKSDA Maluku	1	KPHK Gunung Api Banda
17	BBKSDA Papua	1	Nabire-Tanjung Wiay

**DAFTAR REKAPITULASI USULAN PENETAPAN KPHK NON TAMAN NASIONAL  
TAHUN 2018**

NO	NAMA UPT	NAMA KPHK	
1	BBKSDA Riau	1	TN Zamrud
		2	Muka - Rempang
		3	Buluh Cina
2	BBKSDA Papua	1	Kimaam
		2	Bupul Bian
		3	Membramo Foja
3	BKSDA Sulawesi Utara	1	Karakelang
		2	Lokon Manembo
		3	Panua Tanjung Panjang
		4	Gunung Ambang
4	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	1	Tahura Bukit Suharto
5	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DI Yogyakarta	1	Tahura Bunder



**DAFTAR SK PENETAPAN WILAYAH KPHK YANG TERBIT  
PADA TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA KPHK</b>	<b>NOMOR SK</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>PROVINSI</b>
1	Bolmalit-Maghlit	<u>SK.450/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Papua Barat
2	Sorong-Klamono	<u>SK.456/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Papua Barat
3	Gunung Meja Sidei Kaironi	<u>SK.457/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Papua Barat
4	Arfak	<u>SK.458/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Papua Barat
5	Waigeo	<u>SK.459/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Papua Barat
6	Morowali	<u>SK.460/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulawesi Tengah
7	Bakiriang	<u>SK.461/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulawesi Tengah
8	Pamona	<u>SK.462/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulawesi Tengah
9	Pangi Binangga	<u>SK.463/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulawesi Tengah
10	Gunung Tinombala	<u>SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulawesi Tengah
11	Gunung Dako	<u>SK.465/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Sulawesi Tengah
12	Kuala Lupak	<u>SK.466/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Kalimantan Selatan
13	Giam Siak Kecil-Bukit Batu	<u>SK.467/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Riau
14	Bukit Rimbang Bukit Baling	<u>SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Riau
15	Bukit Kaba	<u>SK.469/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Bengkulu
16	Pati Barat	<u>SK.471/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Jawa Tengah
17	Cilacap	<u>SK.472/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Jawa Tengah
18	Pararawen	<u>SK.473/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Kalimantan Tengah
19	Lamandau	<u>SK.474/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Kalimantan Tengah
20	Bedugul-Sangeh	<u>SK.475/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Bali
21	Kintamani	<u>SK.476/Menlhk/Setjen/PLA.0/6/2016</u>	17 Juni 2016	Bali
22	Enggano	<u>SK.723/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Bengkulu
23	Kawah Ijen	<u>SK.725/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Jawa Timur
24	Dataran Tinggi Yang	<u>SK.726/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Jawa Timur



NO	NAMA KPHK	NOMOR SK	TANGGAL	PROVINSI
25	Cycloops Youtefa	<u>SK.727/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Papua
26	Muara Kaman Sedulang	<u>SK.728/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Kalimantan Timur
27	KPHK Gunung Sahuwai	<u>SK.729/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Maluku
28	Taliabu	<u>SK.730/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Maluku Utara
29	Jakarta	<u>SK.731/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	DKI Jakarta
30	Kepulauan Krakatau	<u>SK.732/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Lampung
31	Lambusango	<u>SK.733/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Sulawesi Tenggara
32	Peropa	<u>SK.734/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Sulawesi Tenggara
33	Durian Luncuk	<u>SK.735/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Jambi
34	KPHK Hutan Bakau Pantai Timur	<u>SK.736/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Jambi
35	Muara Kendawangan	<u>SK.737/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Kalimantan Barat
36	Gunung Nyiut	<u>SK.738/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Kalimantan Barat
37	Simpang Tilu	<u>SK.739/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Jawa Barat
38	Burangrang Tangkuban Perahu	<u>SK.740/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Jawa Barat
39	Moyo	<u>SK.741/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	NTB
40	KPHK Gunung Tunak	<u>SK.742/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Nusa Tenggara Barat
41	Padang Sugihan	<u>SK.743/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Sumatera Selatan
42	Barumun	<u>SK.694/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Sumatera Utara
43	Sicike Cike	<u>SK.724/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Sumatera Utara
44	Harlu	<u>SK.744/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	NTT
45	Gunung Mutis	<u>SK.745/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	NTT
46	Pulau Weh	<u>SK.746/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Aceh
47	Lingga Isaq	<u>SK.747/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Aceh
48	Tangkoko	<u>SK.748/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	Sulawesi Utara
49	Yogyakarta	<u>SK.749/Menlhk/Setjen/PLA.0/9/2016</u>	20 Sept 2016	DI. Yogyakarta



**DAFTAR SK PENETAPAN WILAYAH KPHK YANG TERBIT  
PADA TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA KPHK</b>	<b>NOMOR SK</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>PROVINSI</b>
1	Karang Gading dan Langkat Timur Laut	<u>SK.410/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Sumatera Utara
2	Sibolangit	<u>SK.411/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Sumatera Utara
3	Sipirok	<u>SK.412/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Sumatera Utara
4	Dolok Tinggi Raja	<u>SK.413/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Sumatera Utara
5	Dolok Surungan	<u>SK.414/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Sumatera Utara
6	Holiday Resort	<u>SK.415/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Sumatera Utara
7	TB Pulau Pini	<u>SK.416/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Sumatera Utara
8	Sijaba Hutaginjang	<u>SK.417/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Sumatera Utara
9	Semongkat	<u>SK.418/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Barat
10	Taliwang	<u>SK.419/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Barat
11	Suranadi	<u>SK.420/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Barat
12	Sangiang	<u>SK.421/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Barat
13	Tuti Adagae	<u>SK.422/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Timur
14	Ndeta Kilikima	<u>SK.423/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Timur
15	Wae Wuul	<u>SK.424/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Timur
16	Teluk Maumere	<u>SK.425/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Timur
17	Riung	<u>SK.426/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Timur
18	Kateri	<u>SK.427/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Timur
19	Camplong	<u>SK.428/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara



NO	NAMA KPHK	NOMOR SK	TANGGAL	PROVINSI
				Timor
20	Ale Aisio	<u>SK.429/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Timur
21	Watu Ata	<u>SK.430/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Timur
22	Teluk Kupang	<u>SK.431/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Nusa Tenggara Timur
23	Nabire Tanjung Wiay	<u>SK.432/Menlhk/Setjen/PLA.0/8/2017</u>	21 Agustus 2017	Papua

**DAFTAR SK PENETAPAN WILAYAH KPHK YANG TERBIT  
PADA TAHUN 2018**

NO	NAMA KPHK	NOMOR SK	TANGGAL	PROVINSI
1	Jhantoi	SK.123/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Aceh
2	Pulau Banyak	SK.124/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Aceh
3	Lima Puluh Koto	SK.125/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sumatera Barat
4	Seblat	SK.126/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Bengkulu
5	Pantai panjang	SK.127/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Bengkulu
6	Gumai Pasemah	SK.128/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sumatera Selatan
7	Gunung Raya	SK.129/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sumatera Selatan
8	Sablokare	SK.130/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Tengah
9	Nusa Barung - Watangan - Curah Manis	SK.131/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Timur
10	Pulau Sempu	SK.132/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Timur
11	Pulau Saobi	SK.133/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Timur
12	Baung - Abang - Tretes	SK.134/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Timur
13	Picis - Sigogor - Nglirip - Manggis - Besowo	SK.135/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Jawa Timur
14	Kepulauan Karimata	SK.136/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Kalimantan Barat



<b>NO</b>	<b>NAMA KPHK</b>	<b>NOMOR SK</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>PROVINSI</b>
15	Kelam Komplek	SK.137/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Kalimantan Barat
16	Mandor - Pasi	SK.138/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Kalimantan Barat
17	Tanjung Keluang	SK.139/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Kalimantan Tengah
18	Tanah Laut Gunung Kentawan	SK.140/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Kalimantan Selatan
19	Mangolo	SK.141/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sulawesi Tenggara
20	Buton Utara	SK.142/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sulawesi Tenggara
21	Mario	SK.143/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sulawesi Selatan
22	Ko'mara	SK.144/Menlhk/Setjen/PLA.0/3/2018	5 Maret 2018	Sulawesi Selatan
23	Bawean - Noko Nusa	SK.299/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2018	5 Juli 2018	Jawa Timur
24	Pewoba	SK.301/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2018	5 Juli 2018	Jawa Tengah
25	Pelangan	SK.302/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2018	5 Juli 2018	Nusa Tenggara Barat

**DATA PERJANJIAN KERJA SAMA TAHUN 2018**

## A. PERJANJIAN KERJA SAMA PENGUATAN FUNGSI TAHUN 2018

No	Pemohon	UPT/Instansi	Surat Permohonan			Status I	Penandatanganan PKS	Kategori	Status II	Jangka Waktu	Keterangan
			Nomor	Tanggal	Hal						
1	Yayasan ARSARI	Balai KSDA Sumatera Barat	-	-	Lembaga Konservasi Khusus Pusat Rehabilitasi Satwa Harimau Sumatera dan Satwa Endemik Sumatera Lainnya di Dharmasraya	Baru	PKS. 83/K.9/TU/KSA/01/2018 dan 005/SPK LKK/1/2018 tanggal 22 Januari 2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (22 Januari 2018 - 22 Januari 2023)	-
2	Pemerintah Kabupaten Kepahiang	Balai KSDA Bengkulu	S.2126/K.10/TU/PKS/11/2017	29 November 2017	Penguatan Fungsi dalam rangka pengembangan Wisata Alam di Taman Wisata Alam Bukit Kaba, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu	Baru	PKS. 43/K.10/TU/PKS/01/2018 dan 556/16/Disparpora/2018 tanggal 9 Januari 2018	Taman Wisata Alam	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (9 Januari 2018 - 9 Januari 2023)	-
3	PT. Gudang Garam Tbk	Tahura R. Soerjo	21/PIKA/T/2018	-	Penguatan Fungsi dalam rangka Perlindungan Rehabilitasi dan Pembangunan dan Peningkatan Sarana Prasarana Wisata Kawasan Taman Hutan Raya Raden Soerjo	Baru	PKS.120.23/160/123.1/2018 dan 0173/GG-18/PER/I-18 tanggal 18 Januari 2018	Rehabilitasi	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (18 Januari 2018- 18 Januari 2023)	-



4	Yayasan SIPEF Indonesia	Balai KSDA Bengkulu	S.1650/K.10/TU/KSK/10/2017	04 Oktober 2017	Penguatan Fungsi melalui Konservasi Penyu di Taman Wisata Alam Air Hitam Kabupaten Muko Muko, Provinsi Bengkulu	Baru	PKS.577/K.10/TU/ PKS/03/2018 dan 01/ENC- YSI/HO/III-2018 tanggal 14 Maret 2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati	PKS (Tahun 2018)	4 Tahun (14 Maret 2018 - 31 Desember 2022)	-
5	Direktur Eksekutif Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia	Balai TN Aketajawe Lolobata	-	-	Penguatan fungsi Taman Nasional Aketajawe Lolobata serta Konservasi Keanekaragaman Hayati melalui Optimalisasi Konservasi Spesies Prioritas dan Pengelolaan Tapak	Baru	PKS.05/T.25/TU/KSA/03/2018 dan 05/NK-PKS-BTN Aketajawe Lolobata/III/2018 tanggal 9 Maret 2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati	PKS (Tahun 2018)	4 Tahun ( 9 Maret 2018 - 12 September 2022)	-
6	Direktur Eksekutif Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia	Balai KSDA Sulawesi Utara	-	-	Penguatan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa (SM) Karakelang provinsi Sulawesi Utara, SM Nantu dan Cagar Alam (CA) Panua Provinsi Gorontalo dalam Rangka Pelestarian Burung Liar dan Jenis Satwa Terancam Punah Lainnya serta Habitatnya di Wilayah Kerja Balai KSDA Sulawesi Utara	Baru	PKS.01/BKSDA-Sulut/03/2018 dan 03/NK-PKS-BKSDA Sulawesi Utara/III/2018 tanggal 9 Maret 2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati	PKS (Tahun 2018)	4 Tahun ( 9 Maret 2018 - 12 September 2022)	-
7	Direktur Eksekutif Perhimpunan Pelestarian Burung	Balai TN Bantimurung Bulusaraung	-	-	Penguatan Fungsi Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan Konservasi	Baru	PKS.02/T.46/TU/PLY/1/2018 dan 06/NK-PKS-BTN Bantimurung Bulusaraung/III/2018 tanggal 9 Maret 2018	Pemberdayaan Masyarakat	PKS (Tahun 2018)	4 Tahun ( 9 Maret 2018 - 12 September 2022)	-



	Liar Indonesia										
8	Rektor Universitas Mulawarman	Direktur Jenderal KSDAE	-	-	Penguatan Fungsi berupa dukungan penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam Pelestarian Alam dengan pendekatan ilmiah ( <i>Scientific Based</i> ) untuk tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kalimantan Timur	Baru	PKS.7/KSDAE/SET/KUM.3/4/2018 dan 1555/UN17/KS/2018 tanggal 7 April 2018	Penguatan Kelembagaan	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun ( 7 April 2018 - 7 April 2023)	-
9	Direktur Utama PT Supreme Muara Laboh (PT SEML)	Balai Besar TN Kerinci Seblat	-	-	Kerja sama dalam rangka Penguatan Fungsi berupa kegiatan Pemulihan Ekosistem di Taman Nasional Kerinci Seblat	Baru	PKS.326/T.1/BTU/REN/4/2018 dan ML-MGT-LTR.036.IV.2018 tanggal 13 April 2018	Pemulihan ekosistem	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (13 April 2018 - 13 April 2023)	-
10	PT. Alas Tiara Lestari	Balai Besar TN Gunung Gede Pangrango	-	-	Penguatan fungsi TN Gunung Gede Pangrango melalui perlindungan kawasan, pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat	Baru	PKS.486/BBTNGG P/KBTU/KS/04/2018 dan 001/DIR-ATL/PKS/IV/2018 tanggal 3 April 2018	Pemulihan ekosistem	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (13 April 2018 - 13 April 2023)	Luas areal berada di Resort PTN Gn. Putri - SPTN Wilayah I Cibodas dan Resort PTN Sarongge - SPTN Wilayah II Gedeh, dengan luas 10 Ha



11	Saudara Kurniadi	Tahura Ir.H.Juanda	522/126/UPTDTHR/2018	18 April 2018	Penguatan Fungsi Kawasan dalam rangka Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan Wisata Alam di Blok Batugarok Taman Hutan Raya Ir.H. Juanda, Bandung, Provinsi Jawa Barat	Baru	522/93/PK/UPTD-THR tanggal 19 Maret 2018	Taman Wisata Alam	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (19 Maret 2018 - 19 Maret 2023)	Luas areal berada di Blok Batugarok seluas 7 Ha
12	Ketua Kelompok Sadar Wisata Top Selfie Desa Pogalan Kecamatan Pakis Magelang	Balai TN Gunung Merbabu	-	-	Penguatan Fungsi melalui Pengembangan Wisata Alam di Zona Tradisional Taman Nasional Gunung Merbabu sebagai wisata alam terbatas	Baru	PKS.01/T.35/TU/M ANF/02/2018 dan 01/KSWTP/II/2018 tanggal 15 Februari 2018	Taman Wisata Alam	PKS (Tahun 2018)	3 Tahun (15 Februari 2018 - 15 Februari 2021)	Luas areal wisata alam terbatas dengan luas 5.29 Ha dan berada di blok tradisional
13	Desa Sangatta Selatan	Balai TN Kutai	S.208/T.44-TU/KSDAE/3/2018	9 Maret 2018	Penguatan Fungsi Taman Nasional Kutai	Baru	PKS./T.44/TU/Ren/2018 dan 145/005/2001/II/2018 tanggal 2018	Penguatan Kelembagaan	PKS (Tahun 2018)	-	Luas Areal kerja sama penguatan fungsi TN Kutai 4.3 Ha, dan
14	Ketua Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk (APPS)	Balai Besar TN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	S.711/T.4/TU/PKS/4/2018	23 April 2018	Pengawetan Jenis Ikan Arwana Super Red ( <i>Scleropages formosus</i> ) di habitat alaminya pada kawasan Taman Nasional Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	Baru	PKS.10/KSDAE/KKH/KSA.2/4/2018 dan 004/IV/APPS/18 tanggal 17 April 2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati	Nota Kesepahaman (Tahun 2018)	5 Tahun (17 April 2018 - 17 April 2023)	-



15	Rektor Universitas Atmajaya	Direktur Jenderal KSDAE	-	-	Penguatan Fungsi berupa dukungan penyelenggaraan Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan pendekatan ilmiah ( <i>Scientific Based</i> )	Baru	PKS. 11/KSDAE/SET/KU M.3/5/2018 dan 011/UAJY.R/MOU-Dn/2018 tanggal 5 Mei 2018	Penguatan Kelembagaan	Nota Kesepahaman (Tahun 2018)	5 Tahun (5 Mei Mei 2018 - 5 Mei 2023)	-
16	Rektor Institut Pertanian (INTAN) Yogyakarta	Direktur Jenderal KSDAE	-	-	Dukungan penyelenggaraan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam terintegrasi dengan Tridharma Perguruan Tinggi untuk tujuan konservasi	Baru	PKS. 12/KSDAE/SET/KU M.3/5/2018 dan 041/REKTOR/MOU/INTAN/V/2018 tanggal 5 Mei 2018	Penguatan Kelembagaan	Nota Kesepahaman (Tahun 2018)	5 Tahun (5 Mei Mei 2018 - 5 Mei 2023)	-
17	PT. Lestari Asri Jaya	Balai TN Bukit Tiga Puluh	-	-	Penguatan fungsi dalam rangka pengelolaan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	Baru	PKS. 177/BTNBT/TU/05/2018 dan 42/LAJ-DIR/V/2018 tanggal 15 Mei 2018	Penguatan Kelembagaan	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (15 Mei 2018 - 15 Mei 2023)	-
18	PT. Sari Aditya Loka (SAL)	Balai TN Bukit Dua Belas	S.125/T.32/TU/Humas/04/2018	16 April 2018	Penguatan Fungsi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)/Suku Anak Dalam (SAD) secara berkelanjutan di dalam kawasan Taman Nasional Bukit Dua Belas	Baru	PKS.06/TN.32/TU/HMS/04/2018 dan Leco/013/SPK-SAL/Ext/IV/2018 tanggal 5 April 2018	Pemberdayaan Masyarakat/Komunitas Adat Terpencil	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (5 April 2018 - 5 April 2023)	-
19	Yayasan Leuser Internasional (YLI)	Direktur Jenderal KSDAE	-	-	Kerja sama Penguatan Fungsi berupa dukungan penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di kawasan Ekosistem Leuser	Perpanjangan	PKS. 11/KSDAE/SET/KU M.3/5/2018 dan 005-Pgrs.YLI/MoU.KSDAE/2018 tanggal 18 Mei 2018	Penguatan Kelembagaan	Nota Kesepahaman (Tahun 2018)	5 Tahun (18 Mei 2018 - 18 Mei 2023)	-



20	PT. Adaro Energy	Balai KSDA Kalimantan Selatan	-	-	Penguatan Fungsi Pengelolaan Taman Wisata Alam Pulau Bakut di Kalimantan Selatan	Baru	PKS. /BKSDAKALSEL-1.5/2018	Taman Wisata Alam	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (28 Mei 2018 - 28 Mei 2023)	Areal TWA Pulau Bakut dengan luas (15.58 Ha), dan nomor PKS pihak Balai KSDA Kalimantan Selatan belum memberikan
21	Direktur Utama PT. Pandu Harapan Nusa	Balai TN Bunaken	-	-	Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Bunaken berupa Pengembangan Wisata Alam dalam bentuk Pemanfaatan Dermaga (Jetty) di Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara	Baru	PKS. 310/BTNB/TU/TEK/07/2018 dan 001/PKS-LGL-PHN/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018	Taman Wisata Alam	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (19 Juli 2018 - 19 Juli 2023)	areal dermaga/jetty yang menjadi kerja sama berada di TN Bunaken di Kelurahan Tongkeina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado pada koordinat N01°34'42,73" E124°48'32,58",
22	PT Indonesia Power UJP Banten 2 Labuan	Balai TN Ujung Kulon	-	-	Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem serta Pemberdayaan Masyarakat di Taman Nasional Ujung Kulon	Baru	PKS. 06/T.12/TU/K3/05/2018 dan 01.PJ/060/UJPBLB/2018 tanggal 21 Mei 2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (21 Mei 2018 - 21 Mei 2023)	Naskah PKS masuk di bulan Juli, tetapi penandatanganan tanggal 21 Mei 2018



23	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Balai KSDA Jakarta	-	-	Penguatan Fungsi Suaka Margasatwa Muara Angke sebagai Pusat Edukasi Lingkungan dan Restorasi Ekosistem Mangrove untuk mendukung pengelolaan terpadu ekosistem Mangrove di Jakarta	Baru	PKS. 840/K.13/TU/HMS/7/MOU/2018 dan 005/DOC/YKAN/MERA/VII/18 tanggal 26 Juli 2018	Taman Wisata Alam	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (26 Juli 2018 - 26 Juli 2023)	areal kegiatan di SM Muara Angke seluas 25,02 Ha
24	Ketua KMPH Lendu Loru	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	S.588/T.28/TU/KSA/08/2018	1 Agustus 2018	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Zona Tradisional Blok Hutan Tanah Daru Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Baru	PKS. 12/T.28/TU/KSA/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (1 Agustus 2018 - 1 Agustus 2023)	areal kegiatan berada di Zona Tradisional Blok Hutan Tanah Daru Taman Nasional Matalawa seluas 62.4 Ha
25	Ketua KMPH Ngadu Praing	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	S.588/T.28/TU/KSA/08/2018	1 Agustus 2018	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Zona Tradisional Blok Hutan Umamanu Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Baru	PKS. 13/T.28/TU/KSA/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (1 Agustus 2018 - 1 Agustus 2023)	areal kegiatan berada di Zona Tradisional Blok Hutan Umamanu Taman Nasional Matalawa seluas 32.17 Ha



26	Ketua KMPH Watu Uma	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	S.588/T.28/TU/KS A/08/2018	1 Agustus 2018	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Zona Tradisional Blok Hutan Watumbelar Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Baru	PKS. 14/T.28/TU/KSA/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (1 Agustus 2018 - 1 Agustus 2023)	areal kegiatan berada di Zona Tradisional Blok Hutan Watumbelar Taman Nasional Matalawa seluas 44.1 Ha
27	Ketua KMPH Pinggi Wangga Wundut	Balai TN Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	S.588/T.28/TU/KS A/08/2018	1 Agustus 2018	Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Zona Tradisional Blok Hutan Kambata Wundut Taman Nasional Manupeu Tanah Daru dan Laiwangi Wanggameti	Baru	PKS. 15/T.28/TU/KSA/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (1 Agustus 2018 - 1 Agustus 2023)	areal kegiatan berada di Zona Tradisional Blok Hutan Kambata Wundut Taman Nasional Matalawa seluas 40.23 Ha
28	Yayasan Peduli Orangutan Indonesia (YPOI)	Balai Besar TN Gunung Leuser	S.705/BB TNGL/KB TU/PKS/6/2018	14 Juni 2018	Program Konservasi Orangutan Indonesia dan Habitatnya di Taman Nasional Gunung Leuser dan Sekitarnya	Baru	PKS.288/BBTNGL/KB TU/PKS/6/2018 tanggal 16 Mei 2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati	PKS (Tahun 2018)	3 Tahun (16 Mei 2018 - 16 Mei 2021)	areal kegiatan kerja sama berada dikawasan TNGL dan daerah penyanggannya



29	Yayasan Hutan untuk Anak (YHUA)	Balai Besar TN Gunung Leuser	S.705/BB TNGL/KB TU/PKS/6 /2018	14 Juni 2018	Program Perlindungan Satwa Liar dan Habitatnya di Taman Nasional Gunung Leuser dan Daerah Penyangganya di SPTN Wilayah V Bohorok BPTN Wilayah III Stabat	Baru	PKS.211/BBTNGL/ KBTU/PKS/4/2018 tanggal 12 April 2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati	PKS (Tahun 2018)	3 Tahun (12 April 2018 - 12 April 2021)	areal kegiatan kerja sama berada dikawasan TNGL dan daerah penyangganya di SPTN Wilayah V Bohorok BPTN Wilayah III Stabat
30	Perkumpulan Elang	Balai Besar KSDA Riau	-	-	Pengelolaan Kelembagaan Taman Nasional Zamrud melalui penyusunan dokumen rencana pengelolaan	Baru	PKS. 891/K.6/BTU/Kum .3/05/2018 dan 025/Elang/05.2018 tanggal 30 Mei 2018	Penguatan Kelembagaan	PKS (Tahun 2018)	1 Tahun (30 Mei 2018 - 30 Mei 2019)	Areal Kegiatan seluas ± 31.480 Ha
31	PT Pertamina dan Perkumpulan Raptor Indonesia	Balai Besar KSDA Jawa Barat	S.4741/K .1/TU/TU .2/8/2018	23 Agustus 2018	Pengelolaan Pusat Konservasi Elang Jawa di Taman Wisata Alam Kamojang	Baru	PKS. 4503/K.1/TU/TU.2 /PKS/8/2018 dan 001/PGE240/2018 -S0 dan 01/RAIN-ADM-01/2018 tanggal 8 Agustus 2018	Taman Wisata Alam	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (8 Agustus 2018 - 8 Agustus Mei 2022)	Areal kerja sama di Petak Citepus, blok pemanfaatan TWA Kawah Kamojang
32	Jakarta Animal Aid Network (JAAN)	Balai Besar KSDA Jawa Barat	S.4762/K .1/TU/TU .2/8/2018	24 Agustus 2018	Program Rehabilitasi dan Pelepasliaran Monyet Ekor Panjang Eks Topeng Monyet di wilayah Balai Besar KSDA Jawa Barat	Baru	PKS. 3752/K.1/TU/TU.2 /7/2018 dan 03/JAAN/PKS/VII/ 2018 tanggal 3 Juli 2018	Rehabilitasi	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (8 Juli 2018 - 8 Juli 2022)	-



33	Direktur Eksekutif Perhimpunan Pelestarian Burung Liar Indonesia	Balai KSDA Maluku	S.650/K.19/TU/KSA/A/8/2018	3 Agustus 2018	Penguatan Fungsi Perlindungan dan Pelestarian Satwa Liar beserta habitatnya	Baru	PKS. 246/K.19/TU/KSA/3/2018 tanggal 19 Juli 2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati	PKS (Tahun 2018)	4 Tahun (19 Juli 2018 - 20 September 2022)	-
34	Bupati Kabupaten Teluk Wondama dan Direktur Program Papua Yayasan WWF Indonesia	Balai Besar TN Teluk Cenderawasih	-	-	Optimalisasi Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih di Wilayah Kabupaten Teluk Wondama	Baru	PKS. 20/T.6/TU/PK/6/2018 dan 326/429/SETDA-TW/VI/2018 dan 191/WWF-ID/LGL-PJJ/50417IV/2018 tanggal 29 Juni 2018	Penguatan Kelembagaan	PKS (Tahun 2018)	3 Tahun (29 Juni 2018 - 29 Juni 2021)	Areal kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Taman Nasional Teluk Cenderawasih berada di Wilayah Kabupaten Teluk Wondama dengan luas ± 744.035,7 Ha (Kawasan TNTC) dan daerah penyangga
35	Kepala Museum Geologi, Badan Geologi, Kementerian ESDM	Balai KSDA Bali	S.854/BKSDA.BL-1/KK/2018	8 Oktober 2018	Penguatan Fungsi Taman Wisata Alam Panelokan dan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang melalui Pemanfaatan dan Pengembangan Museum Gunung Api Batur	Perpanjangan	PKS. 03/BKSDA.BI-1/KK/2018 dan 457/05/SBG.MG/2018 tanggal 4 Juni 2018	Taman Wisata Alam	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (4 Juni 2018 - 4 Juni 2023)	Areal kerja sama berada di TWA Panelokan seluas 574.275 Ha dan TWA Gunung Batur Bukit



											Payang seluas 2.075 Ha
36	Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI)	Direktur Jenderal KSDAE	-	-	Dukungan Penguatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati di Indonesia	Baru	PKS. 12/KSDAE/SET/KU M.3/6/2018 tanggal 036/PILI/NK/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018	Penguatan Kelembagaan	Nota Kesepahaman (Tahun 2018)	5 Tahun (4 Juni 2018 - 4 Juni 2023)	-
37	PT. Rimba Raya Conservation	Balai TN Tanjung Puting	-	-	Kerja sama dalam rangka Penguatan Fungsi Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting	Perpanjangan	PKS. 08/T.18/TU/PSL/10/2018 dan 300/RRC-TNTP/JKT/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018	Penguatan Kelembagaan	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (16 Oktober 2018 - 16 Oktober 2023)	Areal kerja sama seluas ±18.642 Ha
38	Kelompok Masyarakat Banteng Afrika	Balai TN Baluran	S.781/T.37/TU/KS A.2/9/2018	3 September 2018	Pemulihan Ekosistem Savana Akibat Tanaman Invasif <i>Acacia nilotica</i> di Kawasan Taman Nasional Baluran	Baru	PKS. 778/T.37/TU/KSA. 6/2018 dan 5/KMBA/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018	Pemulihan ekosistem	PKS (Tahun 2018)	2 Tahun (27 Agustus 2018 - 27 Agustus 2020)	Areal kerja sama berada di Zona Rehabilitasi Resort Labuhan Merak dan Bilik Sejile SPTN Wilayah II Karangketok seluas 700 Ha



39	General Manager EMP Malacca Strait	Balai TN Tesso Nilo	-	-	Penguatan Fungsi Taman Nasional Tesso Nilo Serta Konservasi Keanekaragaman Hayati dengan Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo	Baru	SPK. 50/T.29/TU/PAK/11/2018 tanggal 28 November 2018	Rehabilitasi DAS	PKS (Tahun 2018)	3 Tahun (28 November 2018 - 28 November 2021)	Areal kerja sama berada di wilayah administrasi Desa Bagan Limau, Kecamatan Ukui, Kab. Pelalawan - Riau seluas 592 Ha
40	Direktur Utama PT Nusantara Regas	Balai TN Kepulauan Seribu	-	-	Penguatan Fungsi Kawasan Pelestarian Alam serta Konservasi Keanekaragaman Hayati berupa Flora dan Fauna di Kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu	Baru	PKS.1006/T.13/TU/HMS/11/2018 dan 006/NR/A020/CSR/XI/2018 tanggal 26 November 2018	Rehabilitasi	PKS (Tahun 2018)	3 Tahun (26 November 2018 - 26 November 2021)	Areal kerja sama berada di wilayah SPTN III Pulau Pramuka pada Zona Pemanfaatan II seluas 3.201 Ha
41	Yayasan Sintas Indonesia	Balai KSDA Sumatera Barat	-	-	Kerja sama Dalam Rangka Penguatan Fungsi Konservasi Keanekaragaman Hayati Satwa Liar Harimau Sumatera di Kawasan Konservasi Lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat	Baru	PKS. 888/K.9/TU/KSA/10/2018 dan 001/10/PKS/SIF/2018 tanggal 9 Oktober 2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati	PKS (Tahun 2018)	5 Tahun (9 Oktober 2018 - 9 Oktober 2023)	-
42	Yayasan WWF Indonesia	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	-	-	Penguatan Fungsi Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	Baru	PKS. 12/BTNBBBR/TU/KUM.3/04/2018 dan 001/WWF-KB/PK/IV/2018 tanggal 18 April 2018	Penguatan Kelembagaan	PKS (Tahun 2018)	18 April 2018 - 30 Juni 2019	Areal Kerja sama di wilayah TN Bukit Baka Bukit Raya, seluas 111.802,20 Ha



43	Yayasan WWF Indonesia	Balai TN Sebangau	-	-	Penguatan Fungsi/Pembangunan Strategis tentang Pengelolaan Kolaborasi Area Pungualas Taman Nasional Sebangau untuk kegiatan wisata alam terbatas	Baru	PKS.01/BTNS-1/HMS/01/2018 dan 01/KJSM-SMPL-KRG/01/2018 dan 001/WWF ID-Kalteng/01/2018 tanggal 22 Januari 2018	Taman Wisata Alam	PKS (Tahun 2018)	22 Januari 2018 - 22 Januari 2023	Areal Kerja sama di zona pemanfaatan Pungualas TN Sebangau
44	Orangutan Foundation Internasional (OFI)	Balai TN Bukit Baka Bukit Raya	-	-	Konservasi Orangutan dan Habitatnya	Baru	PKS. 24/BTNBBBR/TU/KUM.3/12/2018 dan 003/OFI/A/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018	Konservasi Keanekaragaman Hayati	PKS (Tahun 2018)	28 Desember 2018 - 28 Desember 2023	Areal kerja sama berada di wilayah SPTN Wilayah I Nanga Pinoh TNBBBR, seluas 27.164,97 Ha
45	Yayasan WWF Indonesia	Balai Besar TN Bukit Barisan Selatan	-	-	Penguatan Fungsi Melalui Dukungan Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	Baru	PKS.19/T.7/TU/PKS.2/10/2018 dan 1/WWF-BBS/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018	Penguatan Kelembagaan	PKS (Tahun 2018)	10 Oktober 2018 - 10 Oktober 2023	Areal kerja sama berada di seluruh wilayah kawasan TNBBS, seluas 313.372,48 Ha



46	Ketua Kelompok PAL IV Sejahtera	Balai TN Meru Betiri	S.851/T.15/TU/EV LAP/12/2018	28 Desember 2018	Penguatan Fungsi tentang Kemitraan Konservasi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberian Akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Zona Tradisional Blok Pal IV Taman Nasional Meru Betiri	Baru	PKS. 834/T.15/TU/KSK/12/2018 dan 3/PAL-IV/12/2018 tanggal 18 Desember 2018	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	PKS (Tahun 2018)	18 Desember 2018 - 18 Desember 2023	Areal Kerja sama berada di Zona Tradisional Blok Durenan Pal IV, Dusun Sumberjambé, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Wilayah Resort Sumberpacet (SPTN Wilayah III Kalibaru) seluas 8.0 Ha
47	Ketua Kelompok PAL VI Kalicawang Barokah	Balai TN Meru Betiri	S.851/T.15/TU/EV LAP/12/2018	28 Desember 2018	Penguatan Fungsi tentang Kemitraan Konservasi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberian Akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Zona Tradisional Blok Pal VI Taman Nasional Meru Betiri	Baru	PKS. 835/T.15/TU/KSK/12/2018 dan 3/PAL-VI/12/2018 tanggal 18 Desember 2018	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	PKS (Tahun 2018)	18 Desember 2018 - 18 Desember 2023	Areal Kerja sama berada di Zona Tradisional Blok Pal VI, Dusun Sumberjambé, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Wilayah Resort Sumberpacet (SPTN



											Wilayah III Kalibaru) seluas 9.50 Ha
48	Ketua Kelompok Durian Sukamade Lestari	Balai TN Meru Betiri	S.851/T.15/TU/EV LAP/12/2018	28 Desember 2018	Penguatan Fungsi Tentang Kemitraan Konservasi Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberian Akses Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Zona Tradisional Blok Sukamade Taman Nasional Meru Betiri	Baru	PKS. 836/T.15/TU/KSK/12/2018 dan 3/DSL/12/2018 tanggal 18 Desember 2018	Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	PKS (Tahun 2018)	18 Desember 2018 - 18 Desember 2023	Areal Kerja sama berada di Zona Tradisional Blok Sukamade, Dusun Sukamade, Desa Sarongan, Kecamatan Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Wilayah Resort Sukamade (SPTN Wilayah I Sarongan) seluas 7.50 Ha

B. PERJANJIAN KERJA SAMA PENGUATAN FUNGSI TAHUN 2018



No	Pemohon	Surat Permohonan		Status	Penandatanganan PKS (IKK)	Kategori	Status
		Hal					
1	Gubernur Bengkulu	Kerja Sama Pemeliharaan dan Peningkatan Ruas Jalan Nakau-Air Sebakul melintasi CA Danau Dusun Besar Reg 61 Kota Bengkulu sepanjang 2,4 Km, di TB Semidang Bukit Kabu sepanjang 3,1 Km (7,2 ha)		Baru	PKS.871/K.10/TU/PKS/04/2018 dan No.01/PKS-BAPPEDA/2018 tgl 23 April 2018	Transportasi Terbatas	PKS
2	Gubernur Sumatera Utara	Pembangunan ruas jalan provinsi jurusan Namu Ukur-Batas Karo di Kabupaten Langkat sepanjang 5,362 km di TN Gunung Leuser		Baru	MoU DJ KSDAE dg Gubernur Sumut No.PKS.13/KSDAE/PIKA/KSA.0/6/2018 dan No. 415.4/6060/2018 tgl 6 Juni 2018	Transportasi Terbatas	PKS
3	Direktur PT. Industrial Forest Plantation	Kerja Sama Penggunaan Jalan Koridor di Kawasan KSAIKPA sepanjang 3.416 meter An. IUPHHK-HT PT. Industrial Forest Plantation		Baru	12 Mei 2018	Transportasi Terbatas	PKS
4	Pimpinan Perusahaan PT. Borneo Mandiri Prima Energi	Permohonan Kerja Sama Pengelolaan Kawasan (Pemanfaatan Jalan 7 Km dan dermaga 13 ha di CA Teluk Kelumpang		Baru	PKS.2220/BKSDAKALSEL-1.5/2018 dan No.05/BMPE-BKSDA/PKS/III/2018 tgl 21 Maret 2018	Transportasi Terbatas	PKS
5	Bupati Lebong	Peningkatan Jalan Sebelat Ulu - Sungai Lisai Kab. Lebong Prov. Bengkulu sepanjang 9,7 km di TNKS		Baru	26 April 2018	Transportasi Terbatas	PKS
6	Bupati Rejang Lebong	Peningkatan Jalan menuju Puncak TWA Bukit Kaba sepanjang ±5 Km lebar 12 meter		Baru	---	Transportasi Terbatas	PKS
7	Bupati Rejang Lebong	Peningkatan Jalan menuju Air Terjun Batu Betiang di TNKS sepanjang ±5 Km lebar 12 meter		Baru	---	Transportasi Terbatas	PKS
8	GM Area IV Pamasuka PT. Dayamitra Telekomunikasi	Pembangunan Sarana Komunikasi di TWA Lejja, Kab. Soppedng, Sulse		Baru	No. PKS.02/K.8/TU/REN/3/2018 dan No.DMT.015/CL1/DBS-1000000/III/2018 tgl 20 Maret 2018	Komunikasi	PKS



9	Gubernur Bali, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, Kepala Badan Pengelola Kebersihan Sarbagita, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI	Kerja Sama Penanganan TPA Sampah Suwung di Tahura Ngurah Rai, Provinsi Bali seluas 32,46 ha	Baru	No.522/427/UPT.Tahura/2017 dan No.602/16271/DPUPR/2017 tgl 21 Des 2017	TPA	PKS
10	Plh. Direktur Pengadaan Strategis 1, Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero)	Amandemen Persetujuan Kerja Sama Jaringan SUTM 20 kV di TNBBS	Baru	No.PKS.14/T.7/TU/KS/01/2017 dan No. 0078.PJ/HKM.00.01/DIST-LPG/2017 tgl 27 Jan 2018	Jaringan Listrik	PKS
11	Direktur Pengadaan PT. PLN (Persero)	Kerja Sama Jaringan Distribusi SUTM 20 kV di Kec. Grogak TN Bali Barat 20,91 Km,tiang 442 batang tinggi 13 meter (sejak 1999/2000)	Baru	20 Juli 2018	Jaringan Listrik	PKS
12	Direktur Operasional PT Paramitha Persada Tama	Kerja Sama Transportasi Terbatas Pemanfaatan Alur Perairan sepanjang ±4,98 Km di Blok Khusus di TWA Teluk Lasolo a.n. PT Paramitha Persada Tama	Baru	---	Transportasi Terbatas	PKS
13	Direktur Pengadaan Strategis 1 PT. PLN (Persero)	Kerja Sama Pembangunan Jaringan SUTT 150 kV Raha -Baubau di TWA Tirta Rimba Kota Baubau , Sultra (6 tower, 4,8 Ha P=2,4 Km Lebar 20 m)	Baru	26 Februari 2018	Jaringan Listrik	PKS
14	Direktur Utama PT Jasamarga Balikpapan Samarinda	Pemanfaatan Borrow seluas ±71,01 Ha dan Disposal seluas ±24,25 Ha di Tahura Bukit Soeharto untuk Mendukung Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda	Baru	No.073/513/DK-I/2018 dan No.BA.KS.01.02.141 dan No.TP.02.01/B.TBSM/0601/II/18 tgl 5 Feb 2018	Transportasi Terbatas	PKS
15	Direktur PT Surya Karya Setiabudi	Normalisasi / Pemeliharaan Sungai Kali Putih di TN Gn Merapi sepanjang 990 m vol material 224.522m3	Baru	PKS.08/KSDAE/PIKA/KSA.0/4/2018 tgl 9 April 2018	Mitigasi Bencana	PKS
16	PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat dielakkan berupa Menara Telekomunikasi dan Sarana Pendukungnya di Taman Wisata Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur	Baru	PKS.488/K.2/TU.2/KSA/8/2018 dan 0003/DMT/RC-3/M-R06/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018	Komunikasi	PKS



17	PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat dielakkan berupa Menara Telekomunikasi dan Sarana Pendukungnya di Cagar Alam Kawah Ijen Provinsi Jawa Timur	Baru	PKS.487/K.2/TU.2/KSA/8/2018 dan 126/LG.05/AR.003/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018	Komunikasi	PKS
18	PT Indosat Tbk	Pembangunan Strategis dalam rangka pemasangan Menara Komunikasi/Base Transceiver Station (BTS) di Kawasan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	Baru	PKS. 1020/T.4/TU/PKS/8/2018 dan 2560/I00-I0AFC/LGL/18 tanggal 24 Agustus 2018	Komunikasi	PKS
19	Kementerian Pertahanan	Pembangunan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP), Jalur Administrasi (JA) dan Pos Pengamanan Perbatasan (POS PAMTAS) di Taman Nasional Kayan Mentarang Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara	Baru	PKS.17/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2018 dan PKS/02/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018	Transportasi Terbatas	PKS
20	Kementerian Pertahanan	Pembangunan Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP), Jalur Administrasi (JA) dan Pos Pengamanan Perbatasan (POS PAMTAS) di Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	Baru	PKS.16/KSDAE/PIKA/KSA.0/8/2018 dan PKS/02/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018	Transportasi Terbatas	PKS
21	Direksi PT Palapa Timur Telematika	Pembangunan Strategis dalam rangka Penempatan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palang Ring Paket Timur sepanjang ±325 Km yang melewati kawasan Taman Nasional Teluk Cenderawasih Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat	Baru	PKS. 16/T.6/TU/PK/6/2018 dan 0801/PTT/PD-DIR/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018	Komunikasi	PKS
22	Direktur Operasional PT Paramitha Persada Tama	Kerja Sama Transportasi Terbatas Pemanfaatan Alur Perairan sepanjang ±4,98 Km di Blok Khusus di TWA Teluk Lasolo a.n. PT Paramitha Persada Tama	Baru	-	Transportasi Terbatas	PKS
23	PT. PLN Persero	Pembangunan Strategis yang tidak dapat dielakkan berupa Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Listrik 150 KV melintasi Taman Wisata Alam Sungai Dumai	Baru	PKS. 1575/K.6/BTU/KUM.3/10/2018 dan 0010.PJ/DIPSBT/2018 tanggal 16 Oktober 2018	Jaringan Listrik	PKS



24	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang	Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan berupa Peningkatan Jalan Nasional Trans Sumba melintasi Kawasan Taman Nasional Manupeu Tanah Daru di Provinsi Nusa Tenggara Timur sepanjang ±16.5 Km	Baru	PKS. 27/T.28/TU/KSA/10/2018 dan Ku 0102-Bb.10/1922 tanggal 22 November 2018	Transportasi Terbatas	PKS
25	General Manager Area Jawa Bali PT Dayamitra Telekomunikasi (MITRATEL) RO Jatim	Penempatan Infrastruktur Telekomunikasi di Desa Paltuding Ijen Banyuwangi di TWA Kawah Ijen	Baru	No.PKS.488/K.2/TU.2/KSA/8/2018 dan No. 0003/DMT/RC-3/M-R06/VIII/2018 tgl 14 Agustus 2018	Komunikasi	PKS
26	Kepala Devisi Operasi Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kantor Pusat PT PLN (Persero)	Pembangunan Jaringan Listrik 20 kV di Kawasan SM Bawean sepanjang 1,5 Km, TWA Ijen sepanjang 7 Km, CA Pulau Saobi sepanjang 2 Km, dan TN Meru Betiri sepanjang 5,5 Km	Baru	3 Desember 2018	Jaringan Listrik	PKS
27	Kepala Devisi Operasi Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kantor Pusat PT PLN (Persero) dan GM PT PLN (Persero) Distribusi Jatim	Pembangunan Jaringan Listrik 20 kV di Kawasan SM Bawean sepanjang 1,5 Km, CA/TWA Ijen sepanjang 7 Km	Baru	3 Desember 2018	Jaringan Listrik	PKS
28	Direktur PT PLN (Persero)	Pembangunan Jaringan Listrik 20 kV di CA/TWA Ijen, BTN Alas Purwo, dan TN Meru Betiri	Baru	3 Desember 2018	Jaringan Listrik	PKS

**DIREKTORAT PEMOLAAN DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN  
EKOSISTEM  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
2019**

